

LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 041 TAHUN 2019 Audited

KEMENTERIAN BUMN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian BUMN adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian BUMN. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 Mei 2020

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	5
I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	6
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8
III. NERACA	9
IV. LAPORAN OPERASIONAL	10
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
A. PENJELASAN UMUM	12
1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN	12
2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	14
3. BASIS AKUNTANSI	15
4. DASAR PENGUKURAN	15
5. KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	21
1. PENDAPATAN	21
2. BELANJA	24
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	27
1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	27
2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	27
3. Piutang Bukan Pajak	27
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	30
5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	31
6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 31	
7. Persediaan.....	31
8. Tanah.....	32
9. Peralatan dan Mesin.....	32
10. Gedung dan Bangunan	33
11. Jalan, Irigasi dan Jaringan	35
12. Aset Tetap Lainnya.....	35
13. Konstruksi Dalam Pengerjaan	35
14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	36

15. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	37
16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR	37
17. Aset Tak Berwujud	37
18. Aset Lain-lain	42
19. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	42
20. Utang Kepada Pihak Ketiga	43
21. Pendapatan Diterima Dimuka	44
22. Ekuitas	44
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	45
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	45
2. Beban Pegawai	45
3. Beban Persediaan	46
4. Beban Barang dan Jasa	46
5. Beban Pemeliharaan	49
6. Beban Perjalanan Dinas	50
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	50
9. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	51
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	52
1. Ekuitas Awal	52
2. Surplus (Defisit) LO	52
3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	52
4. Transaksi Antar Entitas	52
5. Ekuitas Akhir	52
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	53
1. Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN)	53
2. Data Tuntutan Hukum	54
3. Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara	55
4. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan	56

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian BUMN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2020

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

I. RINGKASAN

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.523.210.937 atau mencapai 226,75% dari target anggaran Tahun 2019 sebesar Rp4.199.855.000.

Realisasi Belanja Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp202.523.377.661 atau mencapai 97,24% dari alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp208.269.902.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.863.610.167.730 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.973.764.440, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.855.478.305.611, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp28.819.588 dan Rp5.129.278.091.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.381.026.015 dan Rp1.860.229.141.715.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.607.618.739, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp203.893.195.999 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(199.285.577.260).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp38.889.681 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(199.246.687.579).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp560.895.704.225, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(199.246.687.579), Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp1.305.579.958.345 dan Transaksi Antar Entitas senilai total Rp193.000.166.724, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp1.860.229.141.715.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
 (DALAM RUPIAH)

No	URAIAN	CATT.	2019				2018			
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA		4.199.855.000	9.523.210.937	5.323.355.937	226,75	1.469.850.000	6.512.815.502	5.042.965.502	443,09
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak		4.199.855.000	9.523.210.937	5.323.355.937	226,75	1.469.850.000	6.512.815.502	5.042.965.502	443,09
A.1.2	HIBAH		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)			4.199.855.000	9.523.210.937	5.323.355.937	226,75	1.469.850.000	6.512.815.502	5.042.965.502	443,09
B	BELANJA NEGARA	B.2.								
B.1.1	Rupiah Murni		208.269.902.000	202.523.377.661	(5.746.524.339)	97,24	247.041.755.000	227.448.357.037	(19.593.397.963)	92,07
B.1.1.a	Belanja Pegawai	B.3.	58.358.323.000	57.738.232.224	(620.090.776)	98,94	52.159.826.000	48.701.098.828	(3.458.727.172)	93,37
B.1.1.b	Belanja Barang	B.4.	134.885.923.000	129.812.902.846	(5.073.020.154)	96,24	137.436.650.000	125.054.565.466	(12.382.084.534)	90,99
B.1.1.c	Belanja Modal	B.5.	15.025.656.000	14.972.242.591	(53.413.409)	99,64	57.445.279.000	53.692.692.743	(3.752.586.257)	93,47
JUMLAH BELANJA (B. I + B. II)			208.269.902.000	202.523.377.661	(5.746.524.339)	97,24	247.041.755.000	227.448.357.037	(19.593.397.963)	92,07

III. NERACA

III. NERACA

NERACA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	Catt.	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	601.380.961	481.258.001	120.122.960	24,96
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2	379.285.240	0	379.285.240	
Piutang Bukan Pajak	C.3	366.556.424	3.879.053.586	(3.512.497.162)	(90,55)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.4	(108.215.814)	(444.927.415)	336.711.601	(75,68)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		258.340.610	3.434.126.171	(3.175.785.561)	(92,48)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.5	3.500.004	3.500.004	0	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.6	(17.500)	(17.500)	0	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		3.482.504	3.482.504	0	0,00
Persediaan	C.7	1.731.275.125	1.633.934.371	97.340.754	5,96
JUMLAH ASET LANCAR		2.973.764.440	5.552.801.047	(2.579.036.607)	(46,45)
ASET TETAP					
Tanah	C.8	1.448.189.807.000	273.198.404.650	1.174.991.402.350	430,09
Peralatan dan Mesin	C.9	125.125.261.746	122.026.524.215	3.098.737.531	2,54
Gedung dan Bangunan	C.10	396.488.627.387	245.548.812.957	150.939.814.430	61,47
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	3.201.056.420	3.201.056.420	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.12	1.066.410.162	1.046.413.262	19.996.900	1,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.13	1.647.770.000	47.802.332.780	(46.154.562.780)	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.14	(120.240.627.104)	(135.496.029.092)	15.255.401.988	(11,26)
JUMLAH ASET TETAP		1.855.478.305.611	557.327.515.192	1.298.150.790.419	232,92
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.15	28.964.410	33.964.410	(5.000.000)	(14,72)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.16	(144.822)	(169.822)	25.000	(14,72)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		28.819.588	33.794.588	(4.975.000)	(14,72)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		28.819.588	33.794.588	(4.975.000)	(14,72)
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud	C.17	23.246.192.650	23.033.447.590	212.745.060	0,92
Aset Lain-lain	C.18	151.433.500	906.938.624	(755.505.124)	(83,30)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(18.268.348.059)	(17.704.379.904)	(563.968.155)	3,19
JUMLAH ASET LAINNYA		5.129.278.091	6.236.006.310	(1.106.728.219)	(17,75)
JUMLAH ASET		1.863.610.167.730	569.150.117.137	1.294.460.050.593	227,44
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.20	102.881.340	6.626.846.612	(6.523.965.272)	(98,45)
Pendapatan Diterima Dimuka	C.21	3.278.144.675	1.627.566.300	1.650.578.375	101,41
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.381.026.015	8.254.412.912	(4.873.386.897)	(59,04)
JUMLAH KEWAJIBAN		3.381.026.015	8.254.412.912	(4.873.386.897)	(59,04)
EKUITAS					
Ekuitas	C.22	1.860.229.141.715	560.895.704.225	1.299.333.437.490	231,65
JUMLAH EKUITAS		1.860.229.141.715	560.895.704.225	1.299.333.437.490	231,65
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.863.610.167.730	569.150.117.137	1.294.460.050.593	227,44

IV. LAPORAN OPERASIONAL

IV. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

URAIAN	CATT.	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	4.607.618.739	5.426.639.145	(819.020.406)	(15,09)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		4.607.618.739	5.426.639.145	(819.020.406)	(15,09)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		4.607.618.739	5.426.639.145	(819.020.406)	(15,09)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	57.720.486.671	48.702.330.544	9.018.156.127	18,52
Beban Persediaan	D.3	3.004.863.573	2.559.623.991	445.239.582	17,39
Beban Barang dan Jasa	D.4	76.714.908.814	72.494.109.162	4.220.799.652	5,82
Beban Pemeliharaan	D.5	4.950.367.928	6.827.184.291	(1.876.816.363)	(27,49)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	41.313.124.922	46.542.732.472	(5.229.607.550)	(11,24)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	20.526.180.692	17.948.202.462	2.577.978.230	14,36
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(336.736.601)	4.310.661	(341.047.262)	(7.911,72)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		203.893.195.999	195.078.493.583	8.814.702.416	4,52
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(199.285.577.260)	(189.651.854.438)	(9.633.722.822)	5,08
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	1.165.099.999	(1.165.099.999)	100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		10.462.600	417.028.624	(406.566.024)	(97,49)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(10.462.600)	748.071.375	(758.533.975)	(101,40)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		223.068.055	190.361.534	32.706.521	17,18
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		173.715.774	742.605	172.973.169	23.292,76
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		49.352.281	189.618.929	(140.266.648)	(73,97)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	38.889.681	937.690.304	(898.800.623)	(95,85)
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(199.246.687.579)	(188.714.164.134)	(10.532.523.445)	5,58

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

URAIAN	CATT.	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
EKUITAS AWAL	E.1	560.895.704.225	478.399.403.951	82.496.300.274	17,24
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(199.246.687.579)	(188.714.164.134)	(10.532.523.445)	5,58
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	1.305.579.958.345	(169.611.259)	1.305.749.569.604	(769.848,40)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	1.310.039.462.883	0	1.310.039.462.883	100,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	(4.487.063.792)	(169.611.259)	(4.317.452.533)	2.545,50
LAIN-LAIN	E.3.5	27.559.254	0	27.559.254	100,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	193.000.166.724	271.380.075.667	(78.379.908.943)	(28,88)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.299.333.437.490	82.496.300.274	1.216.837.137.216	1.475,02
EKUITAS AKHIR	E.5	1.860.229.141.715	560.895.704.225	1.299.333.437.490	231,65

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/badan usaha milik negara. Kementerian BUMN bertransformasi dari unit eselon II (1973-1993) menjadi unit eselon I (1993-1998) lalu menjadi Kementerian BUMN pada tahun 1998. Kementerian BUMN berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110.

Sejalan dengan pembentukan kabinet pada tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 dan perubahannya. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya adalah sebagai berikut:

- a. Wakil Menteri I dijabat oleh Sdr. Budi Gunadi Sadikin;
- b. Wakil Menteri II dijabat oleh Sdr. Kartika Wirjoatmodjo;
- c. Sekretariat Kementerian dijabat oleh Sdr. Susyanto;
- d. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dijabat oleh Sdr. Carlo B. Tewu;
- e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi dijabat oleh Sdr. Alex Denni;
- f. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dijabat oleh Sdri. Nawal Nely;

- g. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis dijabat oleh Sdr. Warih Sadono;
- h. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijabat oleh Sdri. Loto Srinaita Ginting;
- i. Staf Ahli Bidang Industri sedang dalam proses pengisian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019, Kementerian BUMN telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019 yang didalamnya tercantum Visi dan Misi Kementerian BUMN yang sejalan dengan Visi dan Misi Presiden yaitu:

Visi Kementerian BUMN:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."

Misi Kementerian BUMN:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/ Lembaga memiliki kewajiban untuk menyiapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/ Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis harus berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 serta Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian BUMN tahun 2020-2024 terdiri dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian BUMN. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan, program, kegiatan pembinaan BUMN, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan hingga target kinerja yang akan dicapai dalam periode 2020-2024. Dengan

mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan, serta pencapaian pembangunan Indonesia, maka tema yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN 2020-2024 ini adalah "Menciptakan Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan makmur."

Tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 adalah tahapan yang krusial dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena periode ini merupakan fase terakhir yang akan menentukan pencapaian target pembangunan. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Melalui Renstra Kementerian BUMN 2020-2024, diharapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan bangsa. Diharapkan Renstra Kementerian BUMN tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan serta pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan BUMN sebagai Agen Pencipta Nilai maupun Agen Pembangunan guna mencapai Grand Visi Indonesia 2045 yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Sampai dengan saat ini, Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 masih dalam proses penyusunan.

2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. SIMAK-BMN digunakan untuk mencatat dan mengorganisasi barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.

Selain mengelola DIPA Bagian Anggaran 041, Kementerian BUMN juga mendapatkan DIPA BA 999.03 (Penyertaan Modal Negara) yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini.

3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian BUMN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian BUMN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian BUMN yaitu Pendapatan Sewa Gedung yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D dan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN, Kemenkeu. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Termasuk didalamnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp208.269.902.000. Dengan adanya perubahan kegiatan sesuai kebutuhan unit kerja dan juga untuk optimalisasi realisasi anggaran di masing-masing unit kerja mengakibatkan perlunya dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selama Tahun Anggaran 2019 Kementerian BUMN telah melakukan 6 (enam) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dengan mengubah komposisi mata anggaran belanja yang dalam pelaksanaannya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan pagu anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan	0	4.199.855.000
Jumlah Pendapatan	0	4.199.855.000
Belanja		
Belanja Pegawai	48.160.880.000	58.358.323.000
Belanja Barang	148.766.807.000	135.938.909.000
Belanja Modal	11.342.215.000	15.025.656.000
Jumlah Belanja	208.269.902.000	208.269.902.000

Sedangkan apabila dilihat dari program kegiatan, maka perubahannya adalah sebagai berikut:

PROGRAM	31 Desember 2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	140.053.745.000	147.469.740.000
Program Pembinaan BUMN	68.216.157.000	60.800.162.000
Total Belanja	208.269.902.000	208.269.902.000

1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp9.523.210.937. Rincian Realisasi Pendapatan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.199.855.000	7.637.115.403	181,84
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	5.000.000	100,00
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	64.782.405	100,00
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	166.664.137	100,00
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.649.648.924	100,00
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68	100,00
	Total	4.199.855.000	9.523.210.937	226,75

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 secara total mengalami kenaikan sebesar 46,22% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018. Terdapat akun-akun pendapatan tahun

anggaran 2019 yang mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan antara lain realisasi penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu dengan nominal yang besar dan pembayaran sekaligus atas tagihan sewa ruangan dengan perjanjian sewa jangka panjang dengan jangka waktu perjanjian antara 2 sampai 5 tahun yang dilakukan oleh tenant.

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2019 dan 2018**

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31/12/2019	31/12/2018		
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	7.637.115.403	4.144.952.294	3.492.163.109	84,25
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	5.000.000	0	5.000.000	100,00
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	64.782.405	621.954.793	(557.172.388)	(89,58)
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	166.664.137	500.248.050	(333.583.913)	(66,68)
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	1.649.648.924	60.170.000	1.589.478.924	2.641
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	68	18.525.963	(18.525.895)	(99,99)
7	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1.165.099.999	(1.165.099.999)	(100,00)
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1.864.403	(1.864.403)	(100,00)
Total		9.523.210.937	6.512.815.502	3.010.395.435	46,22

Keterangan:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp7.637.115.403 merupakan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Ruangan, Listrik dan Air dari *tenant* yang menyewa gedung dan bangunan Kementerian BUMN dengan rincian sebagai berikut:

Teenant	Pembayaran Ruangan	Pembayaran Air	Pembayaran Listrik	Total
Koperasi Prabunara	2.815.936.125	9.172.210	109.733.806	2.934.842.141
PT BNI, Tbk	1.258.178.000	1.622.849	146.609.584	1.406.410.433
PT BRI, Tbk	19.093.000	1.371.827	168.718.653	189.183.480
PT Pos Indonesia	0	0	8.610.019	8.610.019
PT Telkomsel	1.857.445.920	0	28.893.994	1.886.339.914
PT XL Axiata	268.045.000	0	15.992.339	284.037.339
PT Bank Mandiri, Tbk	140.846.000	0	5.862.758	146.708.758
PT Nitraya Bimasakti	164.768.000	9.264.881	42.558.499	216.591.380
PT BTN, Tbk	0	0	4.472.740	4.472.740
PT Danareksa	156.855.000	0	4.920.014	161.775.014
PT Garuda Indonesia, Tbk	0	78.011	1.931.410	2.009.421
PT Indosat	0	0	1.351.987	1.351.987
PT Wika Bangunan Gedung	0	4.499.137	69.530.760	74.029.897
Piutang Bakrie	320.752.880	0	0	320.752.880
Total	7.001.919.925	26.008.915	609.186.563	7.637.115.403

2. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp5.000.000 merupakan pembayaran tuntutan ganti rugi oleh Sdr. DNZ.

3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp64.782.405 terdiri atas:
 - Denda restitusi *down time* atas nama PT Unedo Sarana Mediatama senilai Rp7.013.544;
 - Denda restitusi *down time* atas nama PT Sriyau Multi Kreasi senilai Rp7.273.950;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas nama PT Wijaya Karya sebesar Rp48.737.023;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas nama PT Visualindo Presentaprima sebesar Rp816.200;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas nama Perum Percetakan Negara RI sebesar Rp514.800;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas nama PT Primissima sebesar Rp426.888.
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp166.664.137 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja barang yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu antara lain berupa pengembalian honorarium tim, PPNNP, dan konsinyering.
5. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp1.649.648.924 terdiri atas:
 - Penyetoran kembali selisih volume pekerjaan yang sudah terbayarkan atas nama PT. Uniteknindo Inti Sarana senilai Rp17.481.484;
 - Penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja modal per 31 Desember 2018 an PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sebesar Rp1.624.567.440;
 - Penyetoran kembali Honor Tim Renovasi Gedung Tahun 2018 sebesar Rp7.600.000.
6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp68 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja pegawai yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu.

2. BELANJA

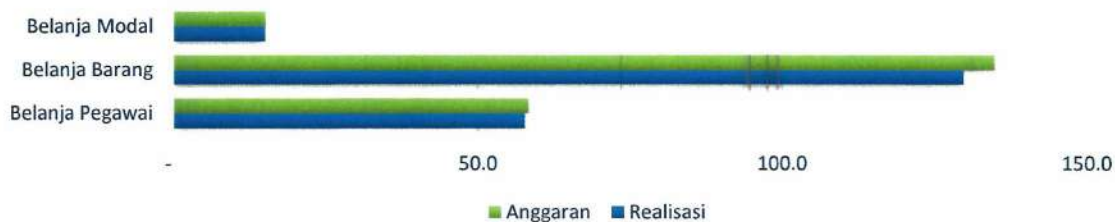
Realisasi Belanja Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp202.523.377.661 atau 97,24% dari anggaran belanja sebesar Rp208.269.902.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Belanja	Per 31 Desember 2019		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	58.358.323.000	57.756.280.242	98,96
2	Belanja Barang	134.885.923.000	129.875.783.386	96,28
3	Belanja Modal	15.025.656.000	14.972.242.591	99,64
	Total Belanja Kotor	208.269.902.000	202.604.306.219	97,28
	Pengembalian Belanja		(80.928.558)	
	Jumlah	208.269.902.000	202.523.377.661	97,24

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Anggaran dan Realisasi Belanja



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program	Per 31 Desember 2019		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	147.469.740.000	144.756.579.790	98,16
2	Program Pembinaan BUMN	60.800.162.000	57.766.797.871	95,01
	Jumlah	208.269.902.000	202.523.377.661	97,24

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp57.738.232.224 dan Rp48.701.098.828. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 18,56% dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2018. Kenaikan ini disebabkan karena terdapat penerimaan 20 pegawai pada akhir tahun 2018 dan 88 pegawai pada awal tahun 2019.

LK Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/Turun Antar Tahun
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	22.593.390.639	18.255.402.029	4.337.988.610	23,76
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	575.102.555	484.394.400	90.707.855	18,76
3	Belanja Lembur	0	0	0	0,00
4	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	34.587.787.348	29.978.655.525	4.609.131.823	15,37
	Jumlah Belanja Kotor	57.756.280.242	48.718.451.954	9.037.828.288	18,55
	Pengembalian Belanja Pegawai	(18.048.018)	(17.353.126)	(694.892)	
	Total	57.738.232.224	48.701.098.828	9.037.133.396	18,56

b) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp129.812.902.846 dan Rp125.054.565.466. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,81% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan aktivitas kegiatan khususnya kegiatan belanja barang operasional, belanja barang persediaan dan belanja pemeliharaan di lingkup Kementerian BUMN.

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/Turun Antar Tahun
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Belanja Barang Operasional	11.283.838.062	7.143.511.313	4.140.326.749	57,96
2	Belanja Barang Non Operasional	22.178.987.383	20.357.817.299	1.821.170.084	8,95
3	Belanja Barang Persediaan	4.194.262.444	2.114.695.999	2.079.566.445	98,34
4	Belanja Jasa	45.931.174.418	46.841.391.503	(910.217.085)	(1,94)
5	Belanja Pemeliharaan	4.567.630.617	2.427.418.230	2.140.212.387	88,17
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	41.419.049.462	46.028.579.073	(4.609.529.611)	(10,01)
7	Belanja Perjalanan Luar Negeri	300.841.000	302.047.740	(1.206.740)	(0,40)
	Jumlah Belanja Kotor	129.875.783.386	125.215.461.157	4.660.322.229	3,72
	Pengembalian Belanja Barang	(62.880.540)	(160.895.691)	98.015.151	
	Total	129.812.902.846	125.054.565.466	4.758.337.380	3,81

c) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.972.242.591 dan Rp53.692.692.743. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar 72% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018. Hal ini disebabkan penurunan pada pos belanja modal gedung dan bangunan serta pos belanja modal lainnya dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, dimana pada tahun 2018 terdapat pekerjaan renovasi *Cladding* sebesar Rp47.048.000.000.

LK Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/Turun Antar Tahun
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.592.697.050	3.637.543.603	4.955.153.447	136,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.501.038.641	48.408.174.140	(42.907.135.499)	(89,00)
3	Belanja Modal Lainnya	878.506.900	1.646.975.000	(768.468.100)	(47,00)
	Jumlah Belanja Kotor	14.972.242.591	53.692.692.743	(38.720.450.152)	(72,00)
	Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	
	Total	14.972.242.591	53.692.692.743	(38.720.450.152)	(72,00)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing adalah sebesar Rp601.380.961 dan Rp481.258.001 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Pembayaran Voucher BBM	6.700.000	14.425.000
2	Pembayaran Biaya <i>License</i>	0	466.833.001
3	Pembayaran Biaya <i>Warranty</i>	594.680.961	0
	Total	601.380.961	481.258.001

2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp379.285.240 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya serta hak pemerintah yang telah teridentifikasi diterima di kas negara setelah 31 Desember 2019 selama periode penyusunan Laporan Keuangan. Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp379.285.240 terdiri atas:

1. Kelebihan pembayaran atas gaji pokok untuk 4 orang pegawai a.n. R.N.Z. dkk sebesar Rp26.100.900;
2. Kelebihan pembayaran atas tunjangan kinerja untuk 4 orang pegawai sebesar a.n. M.W. dkk. sebesar Rp19.184.794;
3. Kelebihan Pembayaran honorarium dan tunjangan kinerja sesuai temuan BPK a.n. J.J.D. sebesar 27.559.254;
4. Kelebihan Pembayaran honorarium pegawai a.n. P.N. sebesar Rp416.667;
5. Kelebihan pembayaran honorarium pegawai a.n. A.S. dan A.A. sebesar Rp8.662.500;
6. Kelebihan pembayaran Honor PPNPN TA 2019 sebesar Rp11.029.625;
7. Kelebihan pembayaran pekerjaan belanja modal Pengadaan Pekerjaan Ruang Kantin VIP sebesar Rp3.676.000;
8. Tagihan sewa ruangan gedung kementerian BUMN a.n. PT BRI (Persero) sebesar Rp282.655.500.

3. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp366.556.424 dan Rp3.879.053.586. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang bukan pajak sebesar Rp366.556.424 terdiri atas:

1. Tagihan sewa ruangan Gedung Kementerian BUMN sebesar Rp192.936.787;

2. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Konsultansi Pengawas Renovasi Ruang Kerja Kementerian BUMN Tahun 2017 a.n. PT Artefak Arkindo sebesar Rp80.784.677;
3. Kelebihan pembayaran iuran BPJS Kesehatan kepada PT Wika Realty sebesar Rp30.113.250;
4. Sisa kelebihan pembayaran PPN ke Kas Negara atas pekerjaan pengadaan jasa housekeeping, pengamanan dan pengemudi a.n. PT Provinces Indonesia sebesar Rp41.678.902;
5. Kelebihan pembayaran honorarium Staf Khusus a.n. H.R.H dkk. sebesar Rp21.042.808;

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 berkurang sebesar Rp3.512.497.162 dibandingkan dengan Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2018		3.879.053.586
Penambahan		
Kelebihan pembayaran honorarium Staf Khusus a.n. H. R.H. dan A.Sy.	21.042.808	
Koreksi kurang catat atas Piutang PT Telkomsel September 2018 yang belum dibayar	1.738.269	
Jumlah penambahan		22.781.077
Pengurangan		
- Mutasi tagihan Sewa Ruangan dari Tenant s.d. 31 Desember 2019	1.713.806.969	
- Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konsultan Renovasi PT Uniteknindo Inti Sarana	17.481.484	
- Setoran atas Kelebihan Pembayaran Belanja Perjadin, Belanja Jasa, Belanja Modal dan Honor Tahun 2018 yang disetor Tahun 2019	84.888.800	
- Setoran Pencairan Bank Garansi atas pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Cladding Gedung Utama Kementrian BUMN an PT Wijaya Karya Gedung, Tbk. yang cair pada Bulan Januari 2019	1.624.567.440	
- Setoran atas Kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi Ex Ruang Klinik (PT Unedo Sarana Mediatama)	7.013.544	
- Setoran atas Kelebihan pembayaran pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Sopir (PT Sriayu Multi Kreasi)	7.273.950	
- Setoran atas Kelebihan pembayaran honor Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Tanah BUMN yang disetorkan ke Kas Negara Tahun 2019	7.650.000	
- Setoran atas Kelebihan pembayaran JFA dan Tukin ex BPKP an Sdr ABB	6.787.260	
- Setoran Kelebihan atas pekerjaan pengadaan jasa housekeeping, pengamanan dan pengemudi a.n. PT Provinces Indonesia	65.808.792	
Jumlah Pengurangan		(3.535.278.239)
Mutasi Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2019		(3.512.497.162)
Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2019		366.556.424

Kementerian BUMN melakukan perpanjangan perjanjian sewa dengan para *tenant* menggunakan tarif sewa sementara dengan klausul apabila telah terbit tarif definitif, maka tenant wajib membayar sesuai tarif definitif. Apabila tenant sudah membayar biaya sewa dengan tarif sementara, maka wajib menyetorkan selisih tarif ke kas negara melalui mekanisme Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam hal harga sewa sementara lebih kecil dari harga sewa definitif. Dalam hal harga sewa sementara lebih besar

dari harga sewa definitif maka Kementerian BUMN akan memperhitungkan sebagai pembayaran sewa periode berikutnya.

Sampai dengan 31 Desember 2019, telah terbit surat Kepala KPKNL Jakarta V atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan BMN dalam Bentuk Sewa berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian BUMN yang menyatakan tarif definitif masing-masing tenant, yaitu:

No	No Surat	Tenant	Tarif Definitif	Periode Sewa
1	S-165/MK.06/WKN.07/KNL.05/2019	PT XL Axiata, Tbk.	268.045.000	2020 s.d. 2024
2	S- 166 /MK.6/WKN.07/KNL.05/2019	PT Telekomunikasi Seluler	266.100.000	2019 s.d. 2024
3	S-167/MK.06/WKN.07/KNL.05/2019	Koperasi Prabunara (Basement Baru)	411.430.500	2019 s.d. 2024
4	S-66/MK.06/WKN.07/KNL.05/2019	PT Nitraya Bimasakti	164.768.000	2019
5	S-168/MK.06/WKN.07/KNL.05/2019	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	140.846.000	2019 s.d. 2024
6	S-164/MK.06/WKN.07/KNL.05/2019	PT Danareksa	156.855.000	2019 s.d. 2024
7	S-145/MK.6/WKN.07/KNL.05/2019	PT BNI (Persero), Tbk.	1.258.178.000	2019 s.d. 2020
8	S-67/MK.6/WKN.07/KNL.05/2019	PT BRI (Persero), Tbk	19.093.000	2019

Atas surat dari Kementerian Keuangan tersebut diatas, maka Kementerian BUMN telah melakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan nilai sewa, piutang, dan pendapatan diterima dimuka sesuai tarif definitif, serta mengakomodasi klausul pengakuan beban listrik dan air yang harus dibayar oleh tenant.

Rincian perhitungan piutang sewa ruangan per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

No	Nama	Pendapatan Sewa Yg Menjadi Hak	Pembayaran Yang Disesuaikan dengan Hak	Piutang 31 Des 2019
1	2	3	4	5
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (ATM)	290.049.000	290.049.000	0
2	PT BRI (Persero), Tbk	0	0	0
3	PT Telekomunikasi Seluler	2.171.445.920	2.171.445.920	0
4	PT BNI (Persero), Tbk	2.306.659.667	2.306.659.667	0
5	PT BNI (Persero), Tbk (ATM)	32.155.200	32.155.200	0
6	PT Bakrie Telecom	427.670.500	320.752.880	106.917.620
7	PT XL Axiata	1.763.790.000	1.763.790.000	0
8	PT Danareksa	120.285.000	120.285.000	0
9	Koperasi Prabunara (Basement)	137.167.933	137.167.933	0
10	Koperasi Prabunara (Lobby)	232.976.000	232.976.000	0
11	PT Pos Indonesia	40.560.000	40.560.000	0
12	Perum PNRI	12.320.000	12.320.000	0
13	PT BRI (Persero), Tbk (ATM)	39.916.800	39.916.800	0
14	PT Nitraya Bimasakti	164.768.000	164.768.000	0
15	PT BTN (ATM)	39.916.800	39.916.800	0
16	BRI Banking Hall	50.801.750	50.801.750	0
17	Koperasi Prabunara (48)	496.561.975	496.561.975	0
18	Koperasi Prabunara (Basement Baru)	68.571.750	68.571.750	0
	Jumlah	8.399.558.695	8.292.641.075	106.917.620

Addendum kontrak sewa ruangan mewajibkan tenant membayar beban listrik dan air sehingga piutang sewa ruangan ditambah dengan piutang atas listrik dan air per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Piutang 31 Des 2019			
		Ruangan	Listrik	Air	Total
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (ATM)	0	921.452	0	921.452
2	PT BRI (Persero), Tbk	0	23.632.159	124.558	23.756.717
3	PT Telekomunikasi Seluler	0	7.518.013	0	7.518.013
4	PT BNI (Persero), Tbk	0	12.453.529	181.205	12.634.734
5	PT Bakrie Telecom	106.917.620	0	0	106.917.620
6	PT XL Axiata	0	4.665.879	0	4.665.879
7	PT Danareksa	0	894.548	0	894.548
8	Koperasi Prabunara (Lobby)	0	7.305.725	939.634	8.245.359
9	PT Pos Indonesia	0	1.565.458	0	1.565.458
10	PT Nitraya Bimasakti	0	7.308.397	1.608.522	8.916.919
11	PT BTN (ATM)	0	1.341.822	0	1.341.822
12	Koperasi Prabunara (48)	0	0	15.558.266	15.558.266
13	PT Indosat Tbk	0	0	0	0
14	PT Garuda Indonesia	0	0	0	0
Jumlah		106.917.620	67.606.982	18.412.185	192.936.787

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp(108.215.814) dan Rp(444.927.415) yang merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rangkuman perhitungan penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak disajikan sebagai berikut:

No	Debitur	Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (ATM)	921.452	0,50%	4.607	Lancar
2	PT BRI (Persero), Tbk	23.756.717	0,50%	118.784	Lancar
3	PT Telekomunikasi Seluler	7.518.013	0,50%	37.590	Lancar
4	PT BNI (Persero), Tbk	12.634.734	0,50%	63.174	Lancar
5	PT Bakrie Telecom	106.917.620	100,00%	106.917.620	Macet
6	PT XL Axiata	4.665.879	0,50%	23.329	Lancar
7	PT Danareksa	894.548	0,50%	4.473	Lancar
8	Koperasi Prabunara (Lobby)	8.245.359	0,50%	41.227	Lancar
9	PT Pos Indonesia	1.565.458	0,50%	7.827	Lancar
10	PT Nitraya Bimasakti	8.916.919	0,50%	44.585	Lancar
11	PT BTN (ATM)	1.341.822	0,50%	6.709	Lancar
12	Koperasi Prabunara (48)	15.558.266	0,50%	77.791	Lancar
13	PT Artefak Arkindo	80.784.677	0,50%	403.923	Lancar
14	PT Wika Realty	30.113.250	0,50%	150.566	Lancar
15	PT Provinces Indonesia	41.678.902	0,50%	208.395	Lancar
16	Pegawai dan Staf Khusus Kementerian BUMN	21.042.808	0,50%	105.214	Lancar
Jumlah		366.556.424		108.215.814	

Terhadap debitur PT Bakrie Telecom yang digolongkan dalam kualitas piutang macet dengan penyisihan sebesar 100%, Kementerian BUMN telah melakukan Penyerahan Pengurusan Piutang PT Bakrie Telecom kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Kementerian Keuangan melalui

Surat Pengguna Barang Nomor S-211 /KPB.MBU/10/2018 Tanggal 9 Oktober 2018. Berdasarkan Laporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Kementerian Keuangan, Piutang PT Bakrie Telecom sebesar Rp427.670.500 telah dicicil dengan total pembayaran diterima sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp350.782.880 sehingga sisa piutang PT Bakrie Telecom per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp106.917.620.

5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Kementerian BUMN per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.500.004 dan Rp3.500.004. Terdapat pembayaran untuk Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada 2019 (lihat catatan 15). Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa tuntutan ganti rugi kedalam aset lancar disebabkan adanya tuntutan ganti rugi jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun berikutnya. Bagian lancar tuntutan ganti rugi Kementerian BUMN merupakan tagihan ganti rugi yang akan jatuh tempo satu tahun berikutnya atas kehilangan barang milik negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ a.n. DNZ yang sudah ditetapkan nilai penggantianannya sebesar Rp70.000.000 dengan cicilan sebesar Rp291.667 per bulan selama 20 tahun dengan pembayaran cicilan pertama ditetapkan pada bulan November 2011.

6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp17.500 dan Rp17.500 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
DNZ	3.500.004	0,50%	17.500	Lancar

7. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan digunakan untuk dikonsumsi/ diserahkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.731.275.125 dan Rp1.633.934.371. Nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2019 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	1.716.681.205	1.600.009.049
2	Bahan untuk Pemeliharaan	7.366.150	18.335.350
3	Suku Cadang	0	1.382.236
4	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
5	Bahan Baku	735.350	1.335.950
6	Persediaan Lainnya	6.492.420	12.871.786
Jumlah		1.731.275.125	1.633.934.371

Seluruh jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Persediaan dalam kondisi rusak/usang per 31 Desember 2019 senilai Rp116.173.552, sudah diusangkan dan dikeluarkan dari laporan persediaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Barang Persediaan Usang Nomor BA-04/PHS/2019 tanggal 29 Maret 2019.

8. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.448.189.807.000 dan Rp273.198.404.650. Sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Nomor 1, Tanah Kementerian BUMN seluruhnya seluas 17.776 M². Tanggal 11 Agustus 2015 telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 116/Gambir/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Ukur Nomor 00013/Gambir/2015 tanggal 23 Februari 2015.

Peningkatan nilai tanah berdasarkan hasil pelaksanaan investarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) merujuk pada Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (LHIP) yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN No. LHIP-716/REV/WKN.7/KNL.05/2019 tanggal 20 November 2019.

9. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp125.125.261.746 dan Rp122.026.524.215 dengan rincian sebagai berikut:

No	Peralatan dan Mesin	Saldo Per 31 Desember 2019	Saldo Per 31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Alat Besar	24.153.623.017	24.153.623.017	0	0,00
2	Alat Angkutan	6.315.799.100	6.315.799.100	0	0,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.963.626.187	2.963.626.187	0	0,00
4	Alat Pengolahan	36.710.960	36.710.960	0	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	45.155.130.768	42.992.452.321	2.162.678.447	5,03
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.755.087.271	3.855.160.981	(100.073.710)	(2,60)
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	40.301.250	40.301.250	0	0,00
8	Alat Laboratorium	7.047.333.202	7.047.333.202	0	0,00
9	Alat Persenjataan	41.450.200	41.450.200	0	0,00
10	Komputer	35.514.047.941	34.477.915.147	1.036.132.794	3,01
11	Alat Keselamatan Kerja	99.132.000	99.132.000	0	0,00
12	Peralatan Proses/Produksi	3.019.850	3.019.850	0	0,00
Nilai Peralatan dan Mesin		125.125.261.746	122.026.524.215	3.098.737.531	2,54
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(100.730.167.953)	(92.638.266.811)	(8.091.901.142)	8,73
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		24.395.093.793	29.388.257.404	(4.993.163.611)	(16,99)

Rincian kenaikan/penurunan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2018	122.026.524.215
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2019	8.592.697.050
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Lantai 4	284.295.000
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pekerjaan Ruang Kantin VIP	104.892.563
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pekerjaan Sekat Kubikel Lantai 9	12.143.010
- Barang Ekstrakomptabel	16.149.624
Jumlah Mutasi Tambah	9.010.177.247
Mutasi Kurang	
- Pembayaran tunggakan belanja modal sekaligus (100%) biaya Pembelian Notebook untuk Pelatihan TI	372.400.000
- Pembayaran tunggakan belanja modal sekaligus (100%) biaya Pembelian Notebook Untuk Pegawai	1.680.000.000
- Pembayaran tunggakan belanja modal sekaligus (100%) biaya Pembelian Access Point	144.000.000
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan Pekerjaan Upgrade EMS (Environment Monitoring System)	193.696.250
- Peralatan dan Mesin yang dihentikan penggunaannya	3.515.293.466
- Barang Ekstrakomptabel	6.050.000
Jumlah Mutasi Kurang	5.911.439.716
Jumlah Mutasi	3.098.737.531
Saldo Akhir 31/12/2019	125.125.261.746
Akumulasi Penyusutan	(100.730.167.953)
Nilai Buku per 31/12/2019	24.395.093.793

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

10. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp396.488.627.387 dan Rp245.548.812.957. Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan di Kementerian BUMN sebagian besar diakibatkan oleh adanya Mutasi Tambah dari Cladding Gedung Utama yang selesai pada Tahun 2019 yang semula masih dikategorikan dalam Akun Konstruksi

dalam Pengerjaan. Disamping itu, terdapat juga peningkatan dari hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) sebagaimana tertuang dalam laporan LHIP-716/REV/WKN.7/KNL.05/2019 dan LHIP-717/REV/WKN.7/KNL.05/2019. Rincian kenaikan/ penurunan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2018		245.548.812.957
Mutasi Tambah		
- Take In atas Koreksi Penilaian Kembali Gedung dan Bangunan Tahun 2019	90.326.945.581	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019	5.501.038.641	
- Reklasifikasi dari KDP Jasa Konstruksi Renovasi Cladding Gedung Utama	1.624.567.440	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pekerjaan Upgrade EMS (Environment Monitoring System)	193.696.250	
- Reklasifikasi dari KDP Berupa Jasa Konstruksi Renovasi Cladding Gedung Utama	45.423.432.560	
- Reklasifikasi dari KDP Berupa Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Renovasi Cladding	956.615.000	
- Reklasifikasi dari KDP Berupa Jasa Konsultan Perencana Renovasi Cladding Gedung Utama	1.369.985.220	
- Reklasifikasi dari KDP Berupa Tim Pengelola Kegiatan Renovasi Gedung Kementerian BUMN	52.300.000	
- Reklasifikasi dari KDP Berupa Jasa Konsultansi Renovasi Ruang Kerja Lantai 4	65.010.000	
- Koreksi Nilai Inventarisasi dan Penilaian Kembali Tahun 2019	17.960.643.000	
Jumlah Mutasi Tambah		163.474.233.692
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pekerjaan Sekat Kubikel Lantai 9	12.143.010	
- Reklasifikasi ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Lantai 4	284.295.000	
- Reklasifikasi ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pekerjaan Ruang Kantin VIP	104.892.562	
- Reklasifikasi ke KDP Berupa Jasa Konstruksi Renovasi Cladding Gedung Utama	1.624.567.440	
- Pembayaran Tunggalan Berupa Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Gedung Kementerian BUMN	125.441.250	
- Reklasifikasi ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pekerjaan Jasa Audit Lift	94.930.000	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Jasa Konsultansi Perencana Renovasi Ruang Kerja, Perbaikan MEP dan Pengadaan Gondola	1.275.340.000	
- Reklasifikasi ke KDP berupa Manajemen Konstruksi Renovasi Ruang Kerja, Perbaikan MEP dan Pengadaan Gondola	282.480.000	
- Reklasifikasi Ke KDP Jasa konsultasi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Gedung Arsip, Data Center dan Assessment Center Kementerian BUMN TA 2019	89.950.000	
- Reklasifikasi Ke KDP Berupa Jasa Konsultansi Renovasi Ruang Kerja Lantai 4	65.010.000	
- Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan belanja modal Pengadaan Pekerjaan Ruang Kantin VIP atas audit BPK	3.676.000	
- Koreksi Tim Pemeriksa LKPP atas penentuan umur efektif bangunan dan persentase penyusutan	8.571.694.000	
Jumlah Mutasi Kurang		12.534.419.262
Jumlah Mutasi		150.939.814.430
Saldo Akhir		396.488.627.387
Akumulasi Penyusutan		(18.434.322.660)
Nilai Buku Per 31/12/2019		378.054.304.727

Sebagaimana rincian mutasi kurang tersebut di atas, revaluasi BMN berupa Gedung dan Bangunan diperhitungkan dengan umur efektif gedung sejak tahun pendirian sesuai KIB Gedung dan Bangunan yaitu tahun 1985, sehingga mempengaruhi juga nilai revaluasi Gedung dan Bangunan serta Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 disajikan di Lampiran Laporan Keuangan ini.

11. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.201.056.420 dan Rp3.201.056.420. Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset berupa instalasi gardu listrik, jaringan air minum, dan jaringan telepon. Rincian mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2018	3.201.056.420
Jumlah Mutasi	0
Saldo Akhir 31/12/2019	3.201.056.420
Akumulasi Penyusutan	(1.076.136.491)
Nilai Buku Per 31/12/2019	2.124.919.929

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.066.410.162 dan Rp1.046.413.262. Terdapat penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp19.996.900 pada akun Bahan Perpustakaan Tercetak. Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari Bahan Perpustakaan Tercetak senilai Rp576.910.162, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro senilai Rp489.500.000.

13. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.647.770.000 dan Rp47.802.332.780. Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.647.770.000 merupakan:

1. Pengadaan Manajemen Konstruksi Renovasi Ruang Kerja, Perbaikan MEP dan Pengadaan Gondola senilai Rp282.480.000;
2. Pengadaan Jasa Konsultansi, konsultan perencana renovasi ruang kerja, perbaikan mep dan pengadaan gondola senilai Rp1.275.340.000;
3. Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Arsip Tahun 2019 senilai Rp89.950.000. Namun saat ini belum ada rencana lanjutan atas pengadaan tanah ini di periode mendatang. Pengadaan tanah untuk gedung arsip di Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000 namun telah direalokasi seluruhnya pada Revisi Anggaran I TA 2020 menjadi penambahan atau peningkatan anggaran lain seperti tambahan tunjangan perumahan dan belanja

sewa karena reorganisasi, penambahan lingkup renovasi ruangan kerja, belanja modal peningkatan dan penggantian sarana dan prasarana kantor, serta belanja jasa lainnya.

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2018		47.802.332.780
Mutasi Tambah		
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 4	65.010.000	
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Panel Alat Pemadam Kebakaran	1.323.413.750	
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Jasa Konstruksi Renovasi Cladding Gedung Utama	1.624.567.440	
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Jasa Konsultan Perencana Ruang Kerja, Perbaikan MEP dan Pengadaan Gondola	1.275.340.000	
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Jasa Manajemen Konstruksi Renovasi Ruang Kerja, Perbaikan MEP dan Pengadaan Gondola	282.480.000	
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Jasa konsultasi perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan gedung arsip, data center dan assessment center Kementerian BUMN TA 2019	89.950.000	
Jumlah Mutasi Tambah		4.660.761.190
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Jasa Konstruksi Renovasi Cladding Gedung Utama	47.048.000.000	
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Renovasi Cladding Gedung Utama	956.615.000	
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Jasa Konsultan Perencana Renovasi Cladding Gedung Utama	1.369.985.220	
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Tim Pengelola Kegiatan Renovasi Gedung Kementerian BUMN	52.300.000	
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Panel Alat Pemadam	1.323.413.750	
- Reklasifikasi ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 4	65.010.000	
Jumlah Mutasi Kurang		50.815.323.970
Jumlah Mutasi		(46.154.562.780)
Saldo Akhir		1.647.770.000

14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp(120.240.627.104) dan Rp(135.496.029.092). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	125.125.261.746	100.730.167.953	24.395.093.793
2	Gedung dan Bangunan	396.488.627.387	18.434.322.660	378.054.304.727
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.201.056.420	1.076.136.491	2.124.919.929
4	Aset Tetap Lainnya	1.066.410.162	0	1.066.410.162
	Jumlah	525.881.355.715	120.240.627.104	405.640.728.611

15. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi Kementerian BUMN merupakan tagihan ganti rugi kepada Sdr. DNZ atas kehilangan BMN berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Kerugian Negara Nomor BA-01/TIM TGR/KBUMN/2011 tanggal 24 November 2011 menetapkan bahwa besarnya penggantian kerugian negara atas kendaraan dinas roda 4 (empat) diatas sebesar Rp70.000.000 dengan cara diangsur Rp291.667, per bulan selama 20 tahun terhitung mulai bulan November 2011.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi tersebut diatas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp28.964.410 dan Rp33.964.410. Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2019 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pembayaran oleh Sdr. DNZ sebesar Rp5.000.000. Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-82/PB/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian/ Lembaga diungkapkan bahwa Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5 ‰ (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar, sehingga perhitungan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto) adalah sebagai berikut:

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto):

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	28.964.410
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
5‰ x 28.964.410	(144.822)
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	28.819.588

16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp144.822 dan Rp169.822 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas piutang TGR. Ringkasan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi disajikan sebagai berikut:

Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	1	28.964.410	0,50%	144.822

17. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp23.246.192.650 dan Rp23.033.447.590. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2018		23.033.447.590
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal 2019	114.360.000	
- Reklasifikasi dari Belanja Barang Berupa Pekerjaan Langganan Aplikasi Pendukung	28.711.060	
- Reklasifikasi dari Belanja Barang Berupa Pekerjaan Jasa Konsultan Aplikasi Inspektorat (Simawas)	198.000.000	
Jumlah Mutasi Tambah		341.071.060
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Berupa Antivirus yang Dihentikan Penggunaannya	128.326.000	
Jumlah Mutasi Kurang		128.326.000
Jumlah Mutasi		212.745.060
Saldo Akhir 31/12/2019		23.246.192.650
Akumulasi Penyusutan		(18.200.326.459)
Nilai Buku Per 31/12/2019		5.045.866.191

Aset Tak Berwujud pada Kementerian BUMN berupa Aplikasi (*software*) dan Lisensi. Penjelasan atas Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Portal Publik (www.bumn.go.id) senilai Rp480.892.500 adalah portal yang menyediakan informasi secara umum tentang BUMN dan Kementerian BUMN yang dikelola secara kolektif oleh masing-masing BUMN bersama-sama Kementerian BUMN sebagai komponen pendukung untuk transparansi kepada publik, yang menjadi sarana bagi publik untuk berinteraksi dengan BUMN dan Kementerian BUMN. Dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari stakeholder, maka sistem tersebut diredesain pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2010 dilakukan perubahan yang semula Zend Framework menjadi open source Wordpress Frame work dengan menggunakan aplikasi CMS dari Wodrpress yang telah disesuaikan dengan user requirement pengguna BUMN dan Kementerian BUMN dengan PHP Programming Languade dan MySQL database dengan menghilangkan AJAX yang bertujuan portal dapat diakses dengan universalweb browser dan mobile content-friendly. Pada tahun 2016 dilakukan pengembangan secara mandiri dengan menggunakan Framework Zend Framework & database PostgreSQL dan digunakan sampai sekarang.
2. Sistem Informasi Manajemen ASN (simanis) <http://simanis.bumn.go.id> yang sebelumnya bernama office automation (OA) senilai Rp3.836.737.987 dibangun pada tahun 2008 dengan keseluruhan proses bisnis di Kementerian telah diakomodir dalam OA. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan dashboard eksekutif. Sampai dengan tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh internal bidang Teknologi Informasi (TI). Kondisi OA saat ini masih digunakan dalam proses bisnis internal di Kementerian BUMN seperti modul Pengelolaan Kepegawaian (SDM), Cuti, Izin, Absensi, Tunjangan Kinerja Perjalanan Dinas, Monitoring Tagihan dan SPBy, Layanan Survei Internal, Pelaporan Pajak, Manajemen Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.
3. Portal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) <http://pkbl.bumn.go.id> senilai Rp1.411.974.599 dibangun pada tahun 2008, dan saat ini telah digunakan oleh Kementerian BUMN untuk pengumpulan data penyerapan dana PKBL dari BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan

pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan dashboard eksekutif. Pada tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh Internal Bidang TI dengan menyesuaikan data dan peraturan yang berlaku saat ini.

4. Portal SDM Online (<http://sdm.bumn.go.id>) dibangun pada tahun 2008 senilai Rp 1.427.335.424, dan telah digunakan oleh Kementerian BUMN sebagai informasi masa jabatan Direksi dan Komisaris serta talent pool kandidat Direksi dan Komisaris BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan dashboard eksekutif.
5. Portal SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) (<http://silaba.bumn.go.id>) senilai Rp2.065.030.155 dibangun pada tahun 2008 dengan nama Executive Information System (EIS) yang kemudian diubah menjadi Portal Financial Information System (FIS) pada tahun 2011 dan terakhir diubah menjadi SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) pada tahun 2018. Portal tersebut digunakan oleh BUMN melaporkan laporan Keuangan/manajemen secara berkala kepada Kementerian BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan dashboard eksekutif. SiLABA berdasarkan fungsinya sebagai media pelaporan keuangan seluruh BUMN terdiri dari Laporan Audited, RKAP, Triwulanan, Tahunan/Manajemen dan Rencana Jangka Panjang.
6. Portal Aset (<http://aset.bumn.go.id>) mulai dibangun pada tahun 2008 dan telah diimplementasikan pada tahun 2009. Portal Aset adalah sistem informasi yang menginventarisasi data aset yang dimiliki BUMN, meliputi data fisik aset, data administrasi, data kepemilikan beserta dokumen terkait. Pada Tahun 2010 dilakukan perbaikan untuk beberapa menu untuk ringkasan eksekutif dan pemasukan data. Pada tahun 2015 dilakukan Redesain Portal Aset untuk menyempurnakan proses pengadministrasian dan pendayagunaan aset BUMN melalui Portal Aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN serta penghapusbukuan Aset BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010. Selain itu, dilakukan pula penghapusan fungsi rencana dan realisasi investasi pada Portal Aset untuk menghindari double inputing CAPEX/belanja modal yang telah diakomodir dalam Portal FIS.
7. Lisensi Aplikasi Penunjang Pilot Sistem BI senilai Rp276.092.300 adalah aplikasi penunjang Business Intelligence (BI) untuk memberikan manfaat kepada pimpinan Kementerian BUMN untuk membantu pekerjaannya. Lisensi Aplikasi ini saat ini masih digunakan untuk system virtualisasi HyperV.
8. Lisensi Windows Server 2012 R2 Data Center Edition senilai Rp367.591.912 Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
9. Lisensi Windows Server 2012 User Cal senilai Rp150.518.700 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.

10. Lisensi Exchange Server 2013 Standard senilai Rp21.125.952 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
11. Lisensi Exchange Server 2013 Enterprise senilai Rp120.921.608 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
12. Lisensi Exchange Standart CAL 2013 OLP NL USERCAL senilai Rp140.864.700 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
13. Lisensi Exchange Standart CAL 2013 OLP woSrvcs senilai Rp88.252.500 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
14. Lisensi WinRghtsMgmtSrvcsCAL 2012 olp nl Gov UsrCAL senilai Rp124.995.000 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
15. Dashboard BUMN senilai Rp2.251.541.016 yang dibangun tahun 2015 merupakan aplikasi untuk menampilkan dashboard monitoring atas informasi strategis BUMN, berupa kantor pusat dan anak perusahaan BUMN, Direksi & Komisaris BUMN, proyek strategis BUMN, serta data finansial BUMN.
16. Aplikasi Private Cloud senilai Rp800.000.000 yang dibangun pada tahun 2015 merupakan aplikasi untuk optimalisasi sistem file sharing di Kementerian BUMN yang terletak pada cloud internal Kementerian BUMN yaitu di Datacenter Kementerian BUMN. Aplikasi Private Cloud mendukung Pegawai Kementerian BUMN dapat mengakses file sharing pada saat berada diluar gedung Kementerian BUMN, dan juga menyediakan layanan personal cloud untuk para Pegawai Kementerian BUMN menyimpan data pribadi bersifat kedinasan dan non kedinasan yang memungkinkan data diakses secara online ataupun offline melalui PC, Laptop, Tablet, Mobile berbasis IOS, Android, Windows Phone dan Blackberry dengan menggunakan koneksi internet tanpa mengindahkan aspek keamanan dan fungsi kontrol IT dalam penggunaannya.
17. Lisensi Anti Spam senilai Rp70.180.000 merupakan perangkat Email Security Gateway sebagai sarana infrastruktur di Kementerian BUMN, sebagai proteksi fasilitas email Kementerian BUMN dari permasalahan spam.
18. Anti Virus Personal Computer senilai Rp128.326.000 merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi perlindungan dan keamanan pada data komputer pegawai dari serangan dan permasalahan virus. Pada tahun 2019, Anti Virus ini sudah dihentikan penggunaannya dan telah direklasifikasi ke Aset Lain-lain sesuai dengan BA-07/PHS/2019.
19. Lisensi Sistem Backup senilai Rp152.848.707 untuk sistem backup penyimpanan data server dari clustering server ke tape drive.
20. Lisensi VMware senilai Rp2.815.169.280 adalah suatu perangkat lunak virtual machine untuk menciptakan dan mensimulasikan server secara virtual. VMware berfungsi untuk menjalankan banyak sistem operasi dalam satu perangkat keras dan untuk menjalankan aplikasi yang ditujukan untuk sistem operasi lainnya.

21. Lisensi Cisco 5508 Series senilai Rp320.386.220 merupakan perangkat WLAN Controller yang berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan sinyal wifidn mengatur beberapa access point sesuai coverage areanya.
22. Antivirus Endpoint Protection senilai Rp26.048.611 adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi perlindungan dan keamanan pada server dari serangan dan permasalahan virus.
23. Lisensi Migrasi IP Telephony senilai Rp728.238.435 adalah upgrade sistem IP Telephony dari versi yang sudah menggunakan versi terbaru, layanan IP Telephony untuk menunjang sistem telepon sentral di Kementerian BUMN.
24. Datacom Call Partner senilai Rp28.094.000 merupakan sistem billing yang terpasang pada server untuk menghitung biaya yang dikeluarkan dari penggunaan IP Phone di Kementerian BUMN.
25. *Assesment* Jaringan dan *Data Center* senilai Rp140.283.000 berfungsi menyediakan hasil assessment, rekomendasi serta aplikasi monitoring jaringan, server dan storage serta kondisi data center Kementerian BUMN. Adapun aspek jaringan yang diuji adalah infrastruktur, performance, dan keamanan jaringan. Sedangkan untuk aspek data center yang diuji adalah keamanan, kelistrikan, pendinginan ruangan dan sistem pengkabelan data.
26. Microsft Sharepoint senilai Rp198.037.000 merupakan pembaruan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NDE) dengan *platform* Sharepoint yang memerlukan penambahan perangkat lunak dalam mendukung implementasi tersebut. Perangkat lunak pendukung aplikasi NDE terdiri dari Microsoft Sharepoint Server dan CAL yang merupakan Software untuk tempat yang aman untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun.
27. Lisensi SSL Digicert senilai Rp233.090.000 merupakan lapisan keamanan untuk melindungi transaksi di website melalui internet dengan teknologi enkripsi data yang canggih. SSL yang digunakan di Kementerian BUMN adalah SSL Digicert yang telah digunakan sejak tahun 2014 dengan jangka waktu 3 tahun sampai dengan 2017. Pembelian SSL Digicert sifatnya pembaruan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga untuk tahun 2017 ini, renewal/pembaruan SSL Digicert sampai tahun 2020.
28. Aplikasi Pendukung Infrastruktur IT senilai Rp1.546.589.000 merupakan aplikasi untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun secara aman dan sistem manajemen basis data relasional dengan menggunakan bahasa *query*.
29. Penambahan Agent for VMware and HyperV pada Aplikasi Sistem *backup* senilai Rp100.386.000 merupakan aplikasi untuk penambahan agen Vmware dan Hyper-V pada aplikasi sistem *backup*.
30. Software Office senilai Rp744.150.000 merupakan software untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai di lingkup Kementerian BUMN dalam menyelesaikan tugas.
31. Aplikasi Simawas (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Internal) senilai Rp99.000.000, merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan November 2019 dan digunakan untuk pengelolaan program (tahunan) pengawasan internal yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat.

32. Aplikasi Simaris (Sistem Informasi Manajemen Risiko) senilai Rp99.000.000, merupakan aplikasi yang di-launch pada bulan Desember 2019 dan digunakan untuk pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat.
33. Navicat PostgreSQL, Nitro PDF 12, Sectigo SSL DV Certificate, Sketch, UI8 Design Resources, Easus Data Recovery, Adobe CC All Aps, JetBrains PhpStorm senilai Rp28.711.060 merupakan aplikasi pendukung pengembangan TI di Kementerian BUMN yang diadakan pada tahun 2019.
34. Software Office 2019 senilai Rp114.360.000, merupakan software untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas di lingkup Kementerian BUMN.

18. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp151.433.500 dan Rp906.938.624. Selama Tahun 2019 terdapat Perubahan Kondisi dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sesuai dengan Berita Acara Nomor BA-02/PHS/2019 dan BA-07/PHS/2019 sehingga rincian Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Aset	Dasar	Nilai	Diusulkan Penghapusan	Nilai 2019
1	Aset Tetap	Berita Acara No BA-02/PHS/2017 tanggal 20 September 2017	359.288.314	359.288.314	0
2	Aset Tetap	Berita Acara No BA-01/PHS/2018 tanggal 16 Maret 2018	9.273.000	9.273.000	0
4	Aset Tetap	Berita Acara No BA-01/PHS/2019 tanggal 27 Maret 2019	515.269.810	515.269.810	0
5	Aset Tetap	Berita Acara No BA-03/PHS/2019 tanggal 15 April 2019	3.438.228.156	3.438.228.156	0
6	Aset Tetap	Berita Acara No BA-05/PHS/2019 tanggal 17 Juni 2019	77.065.310	77.065.310	0
7	Aset Tak Berwujud	Berita Acara No BA-07/PHS/2019 tanggal 11 November 2019	128.326.000	0	128.326.000
8	Aset Tak Berwujud	Berita Acara No BA-02/PHS/2019 tanggal 27 Maret 2019	23.107.500	0	23.107.500
Total			4.550.558.090	4.399.124.590	151.433.500

Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp151.433.500 dengan rincian sebagai berikut:

No	Aset	Kelompok	Kuantitas	NUP Awal	NUP Akhir	Jumlah
1	Microsoft Project	Lisensi	3	1	3	17.257.500
2	Microsoft Visio	Lisensi	2	4	5	5.850.000
3	Sophos Endpoint Protection	Lisensi	380	1529	1908	128.326.000
Jumlah						151.433.500

19. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(18.268.348.059) dan Rp(17.704.379.904). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2019	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2018	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6
A	Aset Tak Berwujud				
1	Software	15.962.893.725	15.491.280.760	14.789.563.210	471.612.965
2	Lisensi	7.283.298.925	2.709.045.699	2.010.287.445	4.574.253.226
	Jumlah	23.246.192.650	18.200.326.459	16.799.850.655	5.045.866.191
B	Aset Lain-lain				
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	882.577.124	0
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	151.433.500	68.021.600	21.952.125	83.411.900
	Jumlah	151.433.500	68.021.600	904.529.249	83.411.900
	Total	23.397.626.150	18.268.348.059	17.704.379.904	5.129.278.091

20. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp102.881.340 dan Rp6.626.846.612. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp6.523.965.272 dibandingkan Per 31 Desember 2018 karena terdapat mutasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian	Nilai Utang Per 31 Desember 2018	MUTASI		Nilai Utang Per 31 Desember 2019	Keterangan
				Tambah	Kurang		
1	Kekurangan pembayaran gaji Pegawai Tahun 2018	Rapel Gaji	8.375.400	0	8.375.400	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut: 190191301020435 190191301023691 190191301011387
		Gaji Susulan	29.965.799	0	29.965.799	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut: 190191301020436 190191301044283 190191301044282 190191301011387
2	Tagihan-tagihan yang pekerjaannya sudah selesai namun belum dilakukan pembayaran Tahun 2018	Belanja Modal	3.065.991.250	0	3.065.991.250	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut: 190191302011694 190191302010855 190191303003907 190191302012068 190191302010865
		Belanja Barang	3.518.139.163	0	3.518.139.163	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut: 190191303025302; 190191304004652; 190191301001816; 190191304004525; 190191304004632; 190191301010426; 190191304004652; 190191301011501; 190191304003907; 190191304004058; 190191303003448; 190191302012066; 190191304003903; 190191302007986; 190191302010971; 190191302010599; 190191302009359; 190191302010299
3	Kekurangan pembayaran honor staf khusus Menteri a.n. W.P. bulan Desember 2018	Honor Staf Khusus	4.375.000	0	4.375.000	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut: 190191301083789
4	Kekurangan pembayaran gaji Pegawai Tahun 2019	Rapel Gaji	0	15.862.480	0	15.862.480	Gaji pegawai tahun 2019 yang belum dibayarkan
		Gaji Susulan	0	7.075.673	0	7.075.673	
5	Pengadaan jasa service maintenance mesin	Belanja Barang	0	32.560.000	0	32.560.000	Tagihan-tagihan yang pekerjaannya sudah selesai namun belum dilakukan pembayaran Tahun 2019
6	Pengadaan tagihan air minum dalam kemasan	Belanja Barang	0	4.440.000	0	4.440.000	
7	Kekurangan pembayaran gaji Pegawai Tahun 2019	Belanja Pegawai	0	42.943.187	0	42.943.187	Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Oktober dan Desember yang ditunda karena pelaporan SKP bulanan atas kinerja September dan November 2019
Total			6.626.846.612	102.881.340	6.626.846.612	102.881.340	

21. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban atas Penerimaan pembayaran sewa ruangan Kantor Kementerian BUMN yang telah dibayarkan oleh *tenant* untuk periode sewa yang akan datang. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.278.144.675 dan Rp1.627.566.300. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.278.144.675 terdiri atas:

No	Nama	Pembayaran Yang Telah Dilakukan Tenant	Pendapatan Sewa Yang Menjadi Hak	Pendapatan Diterima Dimuka
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (ATM)	140.846.000	7.042.300	133.803.700
2	PT BNI (Persero), Tbk	2.516.356.000	2.306.659.667	209.696.333
3	PT BNI (Persero), Tbk (ATM)	66.528.000	35.481.600	31.046.400
4	PT XL Axiata	2.031.835.000	1.763.790.000	268.045.000
5	PT Danareksa	156.855.000	5.228.500	151.626.500
6	Koperasi Prabunara (Basement)	175.108.000	137.167.933	37.940.067
7	Koperasi Prabunara (Basement Baru)	411.430.500	68.571.750	342.858.750
8	PT Pos Indonesia	40.560.000	40.560.000	0
9	Perum PNRI	14.784.000	12.936.000	1.848.000
10	PT BRI (Persero), Tbk (ATM)	66.528.000	39.916.800	26.611.200
11	PT BTN (ATM)	66.528.000	39.916.800	26.611.200
12	Koperasi Prabunara (48)	2.291.824.500	496.561.975	1.795.262.525
13	PT Nitraya Bimasakti	164.768.000	164.768.000	0
14	PT Telekomunikasi Seluler	266.100.000	13.305.000	252.795.000
	Jumlah	8.410.051.000	5.131.906.325	3.278.144.675

22. Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.860.229.141.715 dan Rp560.895.704.225. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**1. Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp4.607.618.739 dan Rp5.426.639.145. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang diperoleh dari penyewaan ruangan Gedung Kantor Kementerian BUMN oleh para *tenant*, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Anggaran Lain-lain. Rincian Pendapatan untuk periode 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/(Turun)
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.557.123.828	5.416.067.626	(858.943.798)	(15,86)
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	50.494.911	8.707.116	41.787.795	479,93
3	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1.864.403	(1.864.403)	100,00
	Total	4.607.618.739	5.426.639.145	(819.020.406)	(15,09)

Keterangan:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.557.123.828 dapat dirinci sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa listrik dan air oleh <i>Tenant</i>	7.637.115.403
- Penyesuaian:	
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Awal)	1.627.566.300
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Akhir)	(3.278.144.675)
- Mutasi Piutang Bukan Pajak dari Tagihan Sewa Ruangan	(1.429.413.200)
	<u>4.557.123.828</u>

2. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp50.494.911 dapat dirinci sebagai berikut:

Pendapatan Denda

- Pendapatan Denda Pihak Ketiga	64.782.405
- Penyesuaian:	
- Penyetoran kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi Ex Ruang Klinik	(7.013.544)
- Penyetoran kelebihan pembayaran pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Sopir	(7.273.950)
	<u>50.494.911</u>

2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp57.720.486.671 dan Rp48.702.330.544. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun Antar Tahun
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	22.593.390.639	18.255.402.029	4.337.988.610	23,76
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	575.102.255	484.394.400	90.707.855	18,73
3	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	34.587.787.348	29.978.655.525	4.609.131.823	15,37
	Jumlah Belanja Kotor	57.756.280.242	48.718.451.954	9.037.828.288	18,55
	Pengembalian Belanja Pegawai	(18.048.018)	(17.353.126)	(694.892)	4,00
	Jumlah	57.738.232.224	48.701.098.828	9.037.133.396	18,56
	Pembayaran Kekurangan Gaji Okt sd Des 2017	0	(4.276.608)	4.276.608	100,00
	Pembayaran Kekurangan Uang Makan Nov & Des 2017	0	(861.000)	861.000	100,00
	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja Staf Khusus Menteri BUMN Des 2017	0	(31.971.875)	31.971.875	(100,00)
	Gaji Pegawai 2018 Belum Dibayar	0	38.341.199	(38.341.199)	(100,00)
	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai 2018	(38.341.199)	0	(38.341.199)	(100,00)
	Kelebihan Pembayaran Gaji Pokok Pegawai 2019	(26.100.900)	0	(26.100.900)	(100,00)
	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai 2019	(19.184.794)	0	(19.184.794)	(100,00)
	Utang Kekurangan Pembayaran Gaji & Tunjangan Struktural Pegawai 2019	65.881.340	0	65.881.340	100,00
	Total	57.720.486.671	48.702.330.544	9.018.156.127	18,52

3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.004.863.573 dan Rp2.599.623.991. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Beban Barang Konsumsi	2.998.520.287	2.559.623.991	438.896.296	17,15
4	Beban Bahan Baku	600.600	0	600.600	100,00
5	Beban Persediaan Lainnya	5.742.686	0	5.742.686	100,00
	Jumlah	3.004.863.573	2.559.623.991	445.239.582	17,39

4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp76.714.908.814 dan Rp72.494.109.162. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Beban Barang Operasional	10.007.322.059	11.151.696.961	(1.144.374.902)	(10,26)
2	Beban Barang Non Operasional	22.103.554.988	20.612.512.699	1.491.042.289	7,23
3	Beban Jasa	44.604.031.767	40.729.899.502	3.874.132.265	9,51
	Beban Jasa Kotor	76.714.908.814	72.494.109.162	4.220.799.652	5,82

1) Beban Barang Operasional

Beban Barang Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.007.322.059 dan Rp11.151.696.961. Rincian Beban Barang Operasional pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Belanja Barang Operasional	11.283.838.062	7.143.511.313	4.140.326.749	57,96
	Pengembalian Beban Jasa Operasional	0	(1.492.500)	1.492.500	(100,00)
	Penyesuaian atas Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	11.250.000	(11.250.000)	(100,00)
	Penyesuaian atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 yang belum dibayar	0	725.394.120	(725.394.120)	(100,00)
	Penyesuaian atas Biaya License Tahunan yang menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran	0	(466.833.001)	466.833.001	100,00
	Penyesuaian atas Pengadaan Persediaan yang menggunakan akun Belanja Barang Operasional Lainnya	0	(172.865.845)	172.865.845	100,00
	Penyesuaian atas Vas Bunga dan Lukisan yang menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	9.900.000	(9.900.000)	(100,00)
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas Pekerjaan pengadaan lisensi umur 1 tahun sebagai Belanja Keperluan Perkantoran	0	(143.181.679)	143.181.679	100,00
	Penyesuaian klasifikasi atas belanja pembayaran honorarium PPNP dan Staf Khusus Menteri sebagai Belanja Keperluan Perkantoran	0	6.674.464.983	(6.674.464.983)	(100,00)
	Penyesuaian klasifikasi Beban Honor Operasional Satuan Kerja atas belanja pembayaran honorarium PPNP dan Staf Khusus Menteri	0	(2.407.700.750)	2.407.700.750	100,00
	Pengakuan Beban Barang Operasional atas honor Staf Khusus Menteri bulan Desember 2018 yang belum terbayar.	0	4.375.000	(4.375.000)	(100,00)
	Penyesuaian atas Lisensi tahunan berlaku sejak 2018 s.d. 2019 yang menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran	0	(225.124.680)	225.124.680	100,00
	Pelunasan atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 yang belum dibayar	(725.394.120)	0	(725.394.120)	(100,00)
	Pelunasan pembayaran honor staf khusus menteri bulan Desember 2018 an Wianda Puspongoro	(4.375.000)	0	(4.375.000)	(100,00)
	Penyesuaian atas Pengadaan Persediaan yang menggunakan akun Belanja Barang Operasional Lainnya berupa Barang Pecah Belah dan Kardus Arsip	(153.418.330)	0	(153.418.330)	(100,00)
	Penyesuaian atas Biaya License Tahunan yang menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran	(373.219.761)	0	(373.219.761)	(100,00)
	Kelebihan pembayaran honorarium Staf Khusus a.n. Parman Nataatmadja Tahun 2019	(416.667)	0	(416.667)	(100,00)
	Kelebihan pembayaran honorarium Staf Khusus a.n. Arya Sinulingga dan Anhar Adel Tahun 2019	(8.662.500)	0	(8.662.500)	(100,00)
	Kelebihan pembayaran Honor PPNP Tahun 2019	(11.029.625)	0	(11.029.625)	(100,00)
	Jumlah	10.007.322.059	11.151.696.961	(1.144.374.902)	(10,26)

2) Beban Barang Non Operasional

Beban Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.103.554.988 dan Rp20.612.512.699. Rincian Beban Barang Non Operasional pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Belanja Barang Non Operasional	22.178.987.383	20.357.817.299	1.821.170.084	8,95
	Pengembalian Beban Barang Non Operasional	(10.775.000)	(2.622.600)	(8.152.400)	310,85
	Penyesuaian atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 yang belum dibayar	0	65.802.000	(65.802.000)	(100,00)
	Penyesuaian atas kelebihan pembayaran honor tim atas kegiatan TA 2018 yang dibayar di TA 2019	0	(7.650.000)	7.650.000	100,00
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas natura rapat koordinasi yang menggunakan akun Belanja Jasa Lainnya	0	199.166.000	(199.166.000)	(100,00)
	Pelunasan atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 yang belum dibayar	(65.802.000)	0	(65.802.000)	(100,00)
	Penyesuaian atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa yang menggunakan akun Persediaan	1.144.605	0	1.144.605	100,00
	Jumlah	22.103.554.988	20.612.512.699	1.491.042.289	7,23

3) Beban Jasa

Beban Barang Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44.604.031.767 dan Rp40.729.899.502. Rincian Beban Jasa pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Belanja Jasa	45.931.174.418	46.841.391.503	(910.217.085)	(1,94)
	Pengembalian Beban Jasa	0	(14.226.250)	14.226.250	100,00
	Penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Housekeeping, Pengamanan dan Pengemudi	0	(107.487.694)	107.487.694	100,00
	Penyesuaian atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 yang belum dibayar	0	1.285.948.943	(1.285.948.943)	(100,00)
	Penyesuaian pengakuan atas pengembalian belanja atas Pekerjaan pengadaan jasa housekeeping, pengamanan dan pengemudi sebagai setoran PNPB melalui SSBP	0	(350.980.224)	350.980.224	100,00
	Penyesuaian klasifikasi Beban Jasa Lainnya atas belanja pembayaran honorarium PPNPN dan Staf Khusus Menteri	0	(4.266.764.233)	4.266.764.233	100,00
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas natura rapat koordinasi yang seharusnya diklasifikasikan sebagai belanja bahan	0	(199.166.000)	199.166.000	100,00
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas service lift, dll yang seharusnya diklasifikasikan sebagai belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	0	(1.264.371.657)	1.264.371.657	100,00
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas pengadaan accu, dll yang seharusnya diklasifikasikan sebagai belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	0	(477.001.228)	477.001.228	100,00
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas pengadaan loker, dll yang seharusnya diklasifikasikan sebagai peralatan dan mesin	0	(90.928.057)	90.928.057	100,00

LK Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas pekerjaan canopy, dll yang seharusnya diklasifikasikan sebagai gedung dan bangunan	0	(626.515.601)	626.515.601	100,00
	Pelunasan atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 yang belum dibayar	(1.285.948.943)	0	(1.285.948.943)	(100,00)
	Penyesuaian atas Pengadaan Persediaan yang menggunakan akun Belanja Jasa berupa Pengadaan Kardus Arsip	(9.982.500)	0	(9.982.500)	(100,00)
	Penyesuaian atas Pengadaan Aset Tak Berwujud yang menggunakan akun Belanja Jasa berupa Aplikasi Simawas dan Aplikasi Simaris	(198.000.000)	0	(198.000.000)	(100,00)
	Pelunasan atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Housekeeping, Pengamanan dan Pengemudi Tahun 2018	65.808.792	0	65.808.792	100,00
	Penyesuaian atas Pengadaan Jasa Audit Lift Gedung Kementerian BUMN yang menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.930.000	0	94.930.000	100,00
	Penyesuaian atas Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	6.050.000	0	6.050.000	100,00
	Jumlah	44.604.031.767	40.729.899.502	3.874.132.265	9,51

5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.950.367.928 dan Rp6.827.184.291. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Belanja Pemeliharaan	4.547.511.917	2.427.418.230	2.120.093.687	87,34
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas Pekerjaan pengadaan lisensi umur 1 tahun sebagai Belanja Keperluan Perkantoran	0	143.181.679	(143.181.679)	(100,00)
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas Lisensi tahunan berlaku sejak 2018 s.d. 2019 yang seharusnya diklasifikasikan belanja pemeliharaan lainnya	0	225.124.680	(225.124.680)	(100,00)
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas service lift, dll yang seharusnya diklasifikasikan sebagai belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	0	1.264.371.657	(1.264.371.657)	(100,00)
	Penyesuaian klasifikasi belanja atas pengadaan accu, dll yang seharusnya diklasifikasikan sebagai belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	0	477.001.228	(477.001.228)	(100,00)
	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	142.703.770	2.277.000	140.426.770	6.167,18
	Beban Persediaan Bahan untuk Suku Cadang	3.206.500	0	3.206.500	100,00
	Koreksi biaya license	466.833.001	693.559.817	(226.726.816)	(32,69)
	Koreksi biaya warranty	0	1.598.575.000	(1.598.575.000)	(100,00)
	Koreksi pencatatan voucher BBM	7.725.000	(4.325.000)	12.050.000	(278,61)
	Penyesuaian atas Tagihan Belanja Pemeliharaan Tahun 2019 yang belum dibayar berupa Jasa Service Maintenance Chiller	32.560.000	0	32.560.000	100,00
	Penyesuaian Belanja Pemeliharaan yang diklasifikasikan sebagai Software berupa Langgan Aplikasi Pendukung Pengembangan TI 2019	(28.711.060)	0	(28.711.060)	100,00
	Penyesuaian Belanja Pemeliharaan yang diklasifikasikan sebagai Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) berupa Lisensi Anti Virus yang tidak memenuhi klasifikasi Aset Tak Berwujud	(221.461.200)	0	(221.461.200)	100,00
	Jumlah	4.950.367.928	6.827.184.291	(1.876.816.363)	(27,49)

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp41.313.124.922 dan Rp46.542.732.472. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2019	31 Desember 2018		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.419.049.462	46.028.579.073	(4.609.529.611)	(10,01)
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	300.841.000	302.047.740	(1.206.740)	(0,40)
		41.719.890.462	46.330.626.813	(4.610.736.351)	(9,95)
	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(52.105.540)	(142.554.341)	90.448.801	(63,45)
	Penyesuaian atas Tagihan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2018 yang belum dibayar	0	354.660.000	(354.660.000)	100,00
	Pelunasan atas Tagihan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2018 yang belum dibayar	(354.660.000)	0	(354.660.000)	(100,00)
	Jumlah	41.313.124.922	46.542.732.472	(5.229.607.550)	(11,24)

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp20.526.180.692 dan Rp17.948.202.462. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2019	31 Desember 2018		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.565.089.483	11.058.575.523	506.513.960	4,58
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.409.582.402	4.522.751.125	2.886.831.277	63,83
Beban Penyusutan Jaringan	88.216.628	88.216.628	0	0,00
Jumlah	19.062.888.513	15.669.543.276	3.393.345.237	21,66
Beban Amortisasi Software	701.717.550	947.507.461	(245.789.911)	(25,94)
Beban Amortisasi Lisensi	737.256.054	738.553.603	(1.297.549)	(0,18)
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dlm Operasional Pemerintah	7.571.675	592.347.322	(584.775.647)	(98,72)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dlm Operasional Pemerintah	16.746.900	250.800	16.496.100	6577,39
Jumlah	1.463.292.179	2.278.659.186	(815.367.007)	(35,78)
Total	20.526.180.692	17.948.202.462	2.577.978.230	14,36

8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(336.736.601) dan Rp4.310.661. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Per 31 Desember 2019 sebesar Rp(336.736.601) merupakan Beban Penyisihan Tak Tertagih dari Piutang Lancar dan Piutang Jangka Panjang.

9. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2019	31 Desember 2018		
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	1.165.099.999	(1.165.099.999)	(100,00)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(10.462.600)	(417.028.624)	406.566.024	(97,49)
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(10.462.600)	748.071.375	(758.533.975)	(101,40)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	68	18.525.963	(18.525.895)	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	174.264.137	500.248.050	(325.983.913)	(65,16)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	1.624.567.440	60.170.000	1.564.397.440	2599,96
Penyetoran Kelebihan Pembayaran Tukin yg diangkat Direksi	0	(5.813.043)	5.813.043	(100,00)
Penyetoran Kelebihan Pembayaran Biaya Personil Jasa Perawatan Gedung, Tata Graha dan Pengemudi an PT Provinces Indonesia	0	(28.535.257)	28.535.257	(100,00)
Penyetoran Pencairan Bank Garansi (6%) dari Konsultan Perencana Renovasi an Bina Karya	0	(74.547.780)	74.547.780	(100,00)
Penyetoran Kelebihan Pembayaran Perjadin, Konsinyering tahun sebelumnya yang disetor Tahun 2018	0	(324.348.110)	324.348.110	(100,00)
Kelebihan Pembayaran Belanja Perjadin, Belanja Jasa, dan Honor Tahun 2018 yang disetor Tahun 2019	0	77.288.800	(77.288.800)	(100,00)
Penyetoran Kelebihan Pembayaran Konsultan MK Renovasi 2018	0	(60.170.000)	60.170.000	(100,00)
Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konsultan Renovasi	0	17.481.484	(17.481.484)	(100,00)
Penyetoran Kelebihan Pembayaran Belanja Perjadin, Belanja Jasa, dan Honor Tahun 2018	(77.288.800)	0	(77.288.800)	100,00
Penyetoran Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tahun 2018	(7.600.000)	0	(7.600.000)	100,00
Pencairan Bank Garansi (3,453%) Jasa Konstruksi Renovasi Cladding Gedung Utama KBUMN	(1.624.567.440)	0	(1.624.567.440)	100,00
Pembayaran Kelebihan pembayaran honor Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Tanah BUMN 2018	(7.650.000)	0	(7.650.000)	100,00
Pembayaran Kelebihan Tunjangan JFA dan Tukin a.n. Abu Bakar	(6.787.260)	(10.300.000)	3.512.740	(34,10)
Kelebihan pembayaran honorarium Staf Khusus a.n. Herdy	21.042.808	0	21.042.808	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	127.087.102	20.361.427	106.725.675	524,16
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(57.542.222)	(742.605)	(56.799.617)	7648,70
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(116.173.552)	0	(116.173.552)	100,00
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	49.352.281	189.618.929	(140.266.648)	(73,97)
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	38.889.681	937.690.304	(898.800.623)	(95,85)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp560.895.704.225 dan Rp478.399.403.951.

2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(199.246.687.579) dan Rp(188.714.164.134). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.305.579.958.345 dan Rp(169.611.259). Koreksi yang terjadi selama tahun 2019 antara lain yaitu koreksi selisih revaluasi aset sebesar Rp1.310.039.462.883, koreksi nilai aset non revaluasi sebesar Rp(4.487.063.792), koreksi lain-lain sebesar Rp27.559.254.

4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp193.000.166.724 dan Rp271.380.075.667. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	202.523.377.661
Diterima dari Entitas Lain	(9.523.210.937)
Jumlah	193.000.166.724

5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.860.229.141.715 dan Rp560.895.704.225.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN)

Sesuai amanat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Pada tahun 2017 – 2018, Pemerintah melakukan Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN atau revaluasi BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Adapun pelaksanaan atas Penilaian Kembali BMN adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

Kementerian BUMN telah selesai melakukan inventaris dan penilain kembali (IP) BMN untuk aset Tanah serta Gedung dan Bangunan, namun secara nasional belum selesai dilaksananan. Untuk menghindari ketidak-konsistenan penyajian BMN dalam laporan keuangan, di mana sebagian barang dalam satu kelompok BMN yang telah dilakukan Penilaian Kembali disajikan menggunakan nilai wajar sedangkan sebagian lagi yang belum dilakukan Penilaian Kembali disajikan menggunakan nilai historis, maka nilai wajar hasil Penilaian Kembali belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Namun demikian, nilai wajar hasil Penilaian Kembali tersebut tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I. Selanjutnya, pemerintah melanjutkan dan menyelesaikan proses IP pada tahun 2018.

Tahun 2018

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018, hasil penilaian kembali BMN seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun, hasil penilaian kembali tersebut diatas belum disajikan pada Laporan Keuangan sampai seluruh objek revaluasi BMN di seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat selesai dinilai kembali. Kondisi ini berdampak terhadap perbedaan aset tetap berdasarkan Laporan BMN dan Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Saldo		Selisih
		Laporan Keuangan	Laporan BMN	
1	Tanah	273.198.404.650	1.307.839.814.000	1.034.641.409.350
2	Gedung dan Bangunan	161.240.853.682	286.899.965.215	125.659.111.533
Total		434.439.258.332	1.594.739.779.215	1.160.300.520.883

Tahun 2019

Pada Tahun 2019 dilakukan perbaikan agar pelaksanaan IP dapat masuk dalam Laporan Keuangan Tahun 2019. Salah satu yang menjadi perhatian BPK-RI adalah pelaksanaan penilaian kembali atas BMN dengan memastikan bahwa inventarisasi telah dilaksanakan dengan benar dan terverifikasi dengan baik. Pada tahun 2019, Kementerian BUMN telah melakukan verifikasi

kembali aset tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan yang menjadi objek inventarisasi dan penilaian kembali sebagaimana Laporan sebagai berikut:

- a) Laporan Nomor LHIP-716/REV/WKN.7/KNL.05/2019 tanggal 20 November 2019 untuk aset Tanah dan Bangunan Gedung Utama;
- b) Laporan Nomor LHIP-717/REV/WKN.7/KNL.05/2019 tanggal 20 November 2019 untuk aset Gedung 48.

2. Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan pencatatan kewajiban atas putusan pengadilan yang inkraht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Dalam hal tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkraht disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah inkraht hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat.
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht) atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CALK LKKL.

Sampai dengan 31 Desember 2019, tuntutan hukum kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang telah inkraht adalah putusan hukum dengan Nomor Perkara 341PK/Pdt/2017 dengan pokok gugatan berupa tanah Persekutuan Masyarakat Adat Deli. Atas gugatan tersebut, hasil putusan kasasi menetapkan:

- 1) Tergugat I (PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara - Aceh);
- 2) Tergugat II (PT Kereta Api (Persero) Kantor Pusat di Bandung); dan
- 3) Tergugat III Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri BUMN.

untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00. Nilai tersebut selanjutnya ditanggung renteng oleh ketiga pihak tergugat sehingga masing-masing tergugat memiliki kewajiban kepada penggugat sebesar Rp166.666.667,00.

Namun berdasarkan Putusan 133/Pdt.G.2019/PN/Mdn dinyatakan bahwa Permohonan Eksekusi aset PT KAI (Persero) di kawasan Pulo Brayen Kota Medan ditangguhkan karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 371/Pdt.G/2010/PN. Mdn Jo 433/Pdt/2011/PT. Mdn Jo 2113/Pdt/2013 Jo 341 PK/Pdt/2017 yang menyatakan bahwa tanah di Pulo Brayen seluas 40.000 m² (4 Ha) adalah milik Persekutuan Masyarakat Adat Deli (Sultan Deli).
- 2) Perkara Nomor 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo 122/PDT/2016/PT.Mdn Jo 2433K/Pdt/2017 menyatakan bahwa tanah di Pulo Brayen seluas kurang lebih 2.910 m² dan bangunan di atasnya seluasnya 180 m² adalah milik PT KAI (Persero).

Dengan kata lain tanah objek sengketa dalam perkara Nomor 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo 122/PDT/2016/PT.Mdn Jo 2433K/Pdt/2017 merupakan bagian tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 371/Pdt.G/2010/PN. Mdn Jo 433/Pdt/2011/PT. Mdn Jo 2113/Pdt/2013 Jo 341 PK/Pdt/2017.

PT KAI (Persero) belum melaksanakan hasil putusan yang telah inkraht sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya akan mengupayakan pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) sehubungan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan 133/Pdt.G.2019/PN/Mdn.

3. Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, maka Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah menetapkan struktur organisasi melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-10/MBU/07/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri tersebut diatas mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diperbaharui terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017.

Dalam rangka menindaklanjuti dinamika dalam pembinaan Badan Usaha Milik Negara, maka pada tahun 2019 Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah menetapkan perubahan atas pembagian Badan Usaha Milik Negara yang menjadi tugas pembinaan Deputy yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-194/MBU/09/2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Deputy Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi menangani 14 BUMN;
2. Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata menangani 18 BUMN;
3. Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media menangani 19 BUMN;

4. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan menangani 38 BUMN;
5. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan menangani 17 BUMN;
6. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha menangani 12 BUMN dan 4 Minoritas.

Memperhatikan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 mengenai Struktur Organisasi Kementerian BUMN dengan memiliki 2 (dua) Wakil Menteri serta dalam rangka mendukung efektivitas pembinaan BUMN, dilakukan klusterisasi BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN I dan II sebagai berikut:

- a) Wakil Menteri BUMN I: dari 65 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN I, dikelompokkan kedalam 13 kluster kelompok industri.
- b) Wakil Menteri BUMN II: dari 65 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN II, dikelompokkan kedalam 12 kluster kelompok industri.

4. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Presiden Republik Indonesia pada 31 Maret 2020 telah menetapkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditegaskan kembali melalui KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang berakibat pada terjadinya perlambatan ekonomi global dan nasional sehingga berpengaruh terhadap Petunjuk dan Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2020 Kementerian BUMN, termasuk ketidakpastian kemampuan penyerapan anggaran belanja modal tahun 2020 sekiranya kondisi pandemi terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Anggaran belanja modal tahun 2020 mengasumsikan keadaan Covid-19 diperkirakan bersifat sementara sesuai kondisi bencana yang diperkirakan pemerintah sampai dengan bulan Juni tahun 2020.

Beberapa hal yang sementara ini terkena dampak diantaranya penyesuaian anggaran dan belanja Tahun 2020. Sesuai surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-302/MK.2/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, Pagu Anggaran Tahun 2020 Kementerian BUMN mengalami pemotongan sebesar Rp79,44 miliar atau sebesar 22,9% dari semula Rp345,83 miliar menjadi Rp266,39 miliar. Penghematan dilakukan terhadap Program Kementerian BUMN melalui sisa anggaran lelang, perjalanan dinas, honor, pemeliharaan dan pendukung kegiatan lainnya. Adapun target penyerapan anggaran pada Tahun 2020 tetap sebesar 95% dari total anggaran dengan penyerapan Belanja Modal di atas 90%. Disamping pemotongan, dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan

penyebaran wabah COVID-19 dilakukan realokasi anggaran sebesar Rp1,81 miliar berupa anggaran dukungan alat perkantoran seperti disinfektan, masker, dll serta aplikasi rapat melalui media daring.

Dari sisi perolehan pendapatan serta realisasi pencairan piutang di masa yang akan datang yang sebagian besar berasal dari Tenant, tidak terdapat risiko signifikan terhadap kontrak eksisting mengingat Tenant telah melakukan penyetoran sewa di awal periode sewa. Disamping itu, sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait norma dan tarif penyisihan piutang. Kementerian BUMN akan tetap menjaga dan mengevaluasi seluruh kemungkinan yang berisiko terhadap operasional Kementerian BUMN sehingga seluruh target akan tetap tercapai di Tahun 2020. Laporan Keuangan Tahun 2019 tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian sebagaimana diungkapkan di atas.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATKER : KP KANTOR PUSAT

KD. LAPORAN : LRPS.T01
 TANGGAL : 06/05/20
 HAL : 1
 PROG. ID : lu_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSAKSI KAS						
I	Penerimaan Dalam Negeri						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PNBP LAINNYA						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN						
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN						
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,199,855,000	7,637,115,403	7,637,115,403	0	7,637,115,403	181.84
	Jumlah Penerimaan 42513	4,199,855,000	7,637,115,403	7,637,115,403	0	7,637,115,403	181.84
	Jumlah Penerimaan 4251	4,199,855,000	7,637,115,403	7,637,115,403	0	7,637,115,403	181.84
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan						
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42579	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 4257	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
4258	Pendapatan Denda						
42581	Pendapatan Denda I						
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	64,782,405	64,782,405	0	64,782,405	0.00
	Jumlah Penerimaan 42581	0	64,782,405	64,782,405	0	64,782,405	0.00
	Jumlah Penerimaan 4258	0	64,782,405	64,782,405	0	64,782,405	0.00
4259	Pendapatan Lain-Lain						
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I						
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68	68	0	68	0.00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	166,664,137	166,664,137	0	166,664,137	0.00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,649,648,924	1,649,648,924	0	1,649,648,924	0.00
	Jumlah Penerimaan 42591	0	1,816,313,129	1,816,313,129	0	1,816,313,129	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATKER : KP KANTOR PUSAT

KD. LAPORAN : LRPS.T01
 TANGGAL : 06/05/20
 HAL : 2
 PROG. ID : lu_pendsatk

KODE	U R A I A N	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Penerimaan 4259	0	1,816,313,129	1,816,313,129	0	1,816,313,129	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	4,199,855,000	9,523,210,937	9,523,210,937	0	9,523,210,937	226.75
	Jumlah Penerimaan 42	4,199,855,000	9,523,210,937	9,523,210,937	0	9,523,210,937	226.75
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	4,199,855,000	9,523,210,937	9,523,210,937	0	9,523,210,937	226.75
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	4,199,855,000	9,523,210,937	9,523,210,937	0	9,523,210,937	226.75
	JUMLAH PENDAPATAN	4,199,855,000	9,523,210,937	9,523,210,937	0	9,523,210,937	226.75
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	4,199,855,000	9,523,210,937	9,523,210,937	0	9,523,210,937	226.75

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN

UNTUK TAHUN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I :	01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI :	0199	INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA :	606538	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATKER :	XX	Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPE.T01b
TANGGAL : 06/05/20
HAL : 1
PROG. ID : lue_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, May 6,
Halaman : 1
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	TRANSAKSI KAS								
0	RUPIAH MURNI								
04	RM								
90	EKONOMI								
01	EKONOMI LAINNYA								
2617	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN								
952	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi								
52	Layanan Perencanaan								
5211	BELANJA BARANG								
52111	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	48,206,000	48,205,500	48,205,500	0	48,205,500	100.00	500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	48,206,000	48,205,500	48,205,500	0	48,205,500	100.00	500
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	223,135,000	266,262,000	266,252,605	266,252,605	0	266,252,605	100.00	9,395
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	785,950,000	511,350,000	511,350,000	511,350,000	(6,975,000)	504,375,000	98.64	6,975,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	114,402,000	182,524,000	182,129,405	182,129,405	0	182,129,405	99.78	394,595
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,123,487,000	960,136,000	959,732,010	959,732,010	(6,975,000)	952,757,010	99.96	7,378,990
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	932,000,000	553,527,000	545,809,991	545,809,991	0	545,809,991	98.61	7,717,009
522191	Belanja Jasa Lainnya	360,000,000	487,561,000	485,923,000	485,923,000	0	485,923,000	99.66	1,638,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,792,000,000	1,041,088,000	1,031,732,991	1,031,732,991	0	1,031,732,991	99.10	9,355,009
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	61,200,000	26,383,000	26,382,776	26,382,776	0	26,382,776	100.00	224
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	602,328,000	689,581,000	685,552,115	685,552,115	(60,000)	685,492,115	99.41	4,088,885
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	369,812,000	958,319,000	958,317,440	958,317,440	(150,000)	958,167,440	99.98	151,560
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,033,340,000	1,674,283,000	1,670,252,331	1,670,252,331	(210,000)	1,670,042,331	99.76	4,240,669
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,948,827,000	3,723,713,000	3,709,922,832	3,709,922,832	(7,185,000)	3,702,737,832	99.63	20,975,168
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2617.952	4,948,827,000	3,723,713,000	3,709,922,832	3,709,922,832	(7,185,000)	3,702,737,832	99.63	20,975,168
954	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	71,847,000	71,830,250	71,830,250	0	71,830,250	99.98	16,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	71,847,000	71,830,250	71,830,250	0	71,830,250	99.98	16,750
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	177,500,000	256,795,000	256,779,250	256,779,250	0	256,779,250	99.99	15,750
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	348,080,000	122,750,000	122,700,000	122,700,000	0	122,700,000	99.96	50,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,256,978,000	5,692,106,000	5,692,105,178	5,692,105,178	0	5,692,105,178	100.00	822
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,782,558,000	6,071,651,000	6,071,584,428	6,071,584,428	0	6,071,584,428	100.00	66,572
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultansi	195,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	57,500,000	78,378,000	38,390,000	38,390,000	0	38,390,000	48.98	39,988,000
522151	Belanja Jasa Profesi	779,100,000	344,009,000	319,250,000	319,250,000	0	319,250,000	92.80	24,759,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 3
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,095,000,000	617,582,000	616,477,000	616,477,000	0	616,477,000	99.82	1,105,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,126,600,000	1,139,969,000	1,074,117,000	1,074,117,000	0	1,074,117,000	94.22	65,852,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	210,541,000	279,038,000	279,038,000	279,038,000	0	279,038,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,600,000	21,600,000	19,290,000	19,290,000	0	19,290,000	89.31	2,310,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	716,930,000	1,195,603,000	1,192,819,500	1,192,819,500	0	1,192,819,500	99.77	2,783,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,307,064,000	1,776,415,000	1,759,352,157	1,759,352,157	(5,910,000)	1,753,442,157	98.71	22,972,843
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,256,135,000	3,272,656,000	3,250,499,657	3,250,499,657	(5,910,000)	3,244,589,657	99.32	28,066,343
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	190,830,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	190,830,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,356,123,000	10,556,123,000	10,468,031,335	10,468,031,335	(5,910,000)	10,462,121,335	99.17	94,001,665
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2617.954	10,356,123,000	10,556,123,000	10,468,031,335	10,468,031,335	(5,910,000)	10,462,121,335	99.17	94,001,665
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2617	15,304,950,000	14,279,836,000	14,177,954,167	14,177,954,167	(13,095,000)	14,164,859,167	99.29	114,976,833
2617	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi								
960	Layanan Manajemen Organisasi								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	0	89,334,000	89,334,000	89,334,000	0	89,334,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	610,078,000	610,078,000	604,400,000	604,400,000	0	604,400,000	99.07	5,678,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	125,830,000	152,560,000	152,297,650	152,297,650	0	152,297,650	99.83	262,350

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 4
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	735,908,000	851,972,000	846,031,650	846,031,650	0	846,031,650	99.30	5,940,350
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	0	0	0	0	0	0.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	136,900,000	135,500,000	101,900,000	101,900,000	0	101,900,000	75.20	33,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	270,000,000	534,665,000	534,234,817	534,234,817	0	534,234,817	99.92	430,183
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	406,900,000	670,165,000	636,134,817	636,134,817	0	636,134,817	94.92	34,030,183
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	14,072,000	13,119,000	13,118,400	13,118,400	0	13,118,400	100.00	600
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	644,370,000	357,373,000	357,372,200	357,372,200	0	357,372,200	100.00	800
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	363,470,000	272,091,000	268,510,393	268,510,393	0	268,510,393	98.68	3,580,607
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,021,912,000	642,583,000	639,000,993	639,000,993	0	639,000,993	99.44	3,582,007
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,164,720,000	2,164,720,000	2,121,167,460	2,121,167,460	0	2,121,167,460	97.99	43,552,540
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2617.960	2,164,720,000	2,164,720,000	2,121,167,460	2,121,167,460	0	2,121,167,460	97.99	43,552,540
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2617	2,164,720,000	2,164,720,000	2,121,167,460	2,121,167,460	0	2,121,167,460	97.99	43,552,540
2617	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi								
994	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,800,183,000	15,657,549,000	15,631,221,440	15,631,221,440	(13,744,100)	15,617,477,340	99.74	40,071,660
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	210,000	272,000	262,935	262,935	(18,974)	243,961	89.69	28,039
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	933,717,000	1,040,102,000	1,037,086,714	1,037,086,714	(1,329,120)	1,035,757,594	99.58	4,344,406

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 5
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	285,570,000	318,765,000	317,962,109	317,962,109	0	317,962,109	99.75	802,891
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,651,090,000	2,369,749,000	2,309,210,000	2,309,210,000	0	2,309,210,000	97.45	60,539,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	59,800,000	66,900,000	66,900,000	66,900,000	0	66,900,000	100.00	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	254,711,000	108,309,000	108,308,761	108,308,761	0	108,308,761	100.00	239
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	760,937,000	764,958,000	764,320,680	764,320,680	0	764,320,680	99.92	637,320
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,288,880,000	1,910,316,000	1,807,408,000	1,807,408,000	0	1,807,408,000	94.61	102,908,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	535,853,000	550,710,000	550,710,000	550,710,000	0	550,710,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	19,570,951,000	22,787,630,000	22,593,390,639	22,593,390,639	(15,092,194)	22,578,298,445	99.15	209,331,555
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara								
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	124,800,000	166,943,000	144,835,055	144,835,055	0	144,835,055	86.76	22,107,945
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	214,500,000	310,268,000	290,267,200	290,267,200	0	290,267,200	93.55	20,000,800
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	10,140,000	10,140,000	0	0	0	0	0.00	10,140,000
511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	0	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	140,000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	349,440,000	627,351,000	575,102,255	575,102,255	0	575,102,255	91.67	52,248,745
5122	Belanja Lembur								
512211	Belanja Uang Lembur	99,504,000	99,504,000	0	0	0	0	0.00	99,504,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	99,504,000	99,504,000	0	0	0	0	0.00	99,504,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito								
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	28,140,985,000	34,843,838,000	34,587,787,348	34,587,787,348	(2,955,824)	34,584,831,524	99.26	259,006,476
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	28,140,985,000	34,843,838,000	34,587,787,348	34,587,787,348	(2,955,824)	34,584,831,524	99.27	259,006,476
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	48,160,880,000	58,358,323,000	57,756,280,242	57,756,280,242	(18,048,018)	57,738,232,224	98.97	620,090,776

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 6
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,411,870,000	3,411,870,000	3,298,953,719	3,298,953,719	0	3,298,953,719	96.69	112,916,281
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,411,870,000	3,411,870,000	3,298,953,719	3,298,953,719	0	3,298,953,719	96.69	112,916,281
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,411,870,000	3,411,870,000	3,298,953,719	3,298,953,719	0	3,298,953,719	96.69	112,916,281
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2617.994	51,572,750,000	61,770,193,000	61,055,233,961	61,055,233,961	(18,048,018)	61,037,185,943	98.84	733,007,057
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2617	51,572,750,000	61,770,193,000	61,055,233,961	61,055,233,961	(18,048,018)	61,037,185,943	98.84	733,007,057
2618	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum								
002	Layanan Hukum								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	23,400,000	22,990,000	22,990,000	0	22,990,000	98.25	410,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	23,400,000	22,990,000	22,990,000	0	22,990,000	98.25	410,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	180,000,000	130,145,000	130,145,000	130,145,000	0	130,145,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	432,750,000	513,150,000	508,325,000	508,325,000	0	508,325,000	99.06	4,825,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	272,020,000	188,100,000	185,869,872	185,869,872	0	185,869,872	98.81	2,230,128
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	884,770,000	831,395,000	824,339,872	824,339,872	0	824,339,872	99.15	7,055,128
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	325,300,000	256,314,000	253,900,000	253,900,000	0	253,900,000	99.06	2,414,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	325,000,000	35,050,000	35,040,250	35,040,250	0	35,040,250	99.97	9,750

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 7
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	650,300,000	291,364,000	288,940,250	288,940,250	0	288,940,250	99.17	2,423,750
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	640,620,000	592,320,000	589,714,628	589,714,628	0	589,714,628	99.56	2,605,372
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	91,800,000	100,800,000	96,630,000	96,630,000	0	96,630,000	95.86	4,170,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	372,590,000	391,900,000	391,590,000	391,590,000	0	391,590,000	99.92	310,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	714,850,000	1,023,470,000	1,023,470,000	1,023,470,000	0	1,023,470,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,819,860,000	2,108,490,000	2,101,404,628	2,101,404,628	0	2,101,404,628	99.66	7,085,372
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	200,560,000	300,841,000	300,841,000	300,841,000	0	300,841,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	200,560,000	300,841,000	300,841,000	300,841,000	0	300,841,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,555,490,000	3,555,490,000	3,538,515,750	3,538,515,750	0	3,538,515,750	99.52	16,974,250
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2618.002	3,555,490,000	3,555,490,000	3,538,515,750	3,538,515,750	0	3,538,515,750	99.52	16,974,250
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2618	3,555,490,000	3,555,490,000	3,538,515,750	3,538,515,750	0	3,538,515,750	99.52	16,974,250
2619	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Keuangan, Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol								
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
52	BELANJA BARANG								
5221	Belanja Jasa								
522141	Belanja Sewa	8,624,647,000	872,883,000	872,883,000	872,883,000	0	872,883,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	8,624,647,000	872,883,000	872,883,000	872,883,000	0	872,883,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,624,647,000	872,883,000	872,883,000	872,883,000	0	872,883,000	100.00	0
53	BELANJA MODAL								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 8
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,600,000,000	2,492,238,000	2,469,854,200	2,469,854,200	0	2,469,854,200	99.10	22,383,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	4,600,000,000	2,492,238,000	2,469,854,200	2,469,854,200	0	2,469,854,200	99.10	22,383,800
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450,000,000	3,484,842,000	3,478,292,391	3,478,292,391	0	3,478,292,391	99.81	6,549,609
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	2,033,202,000	2,022,746,250	2,022,746,250	0	2,022,746,250	99.49	10,455,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	450,000,000	5,518,044,000	5,501,038,641	5,501,038,641	0	5,501,038,641	99.69	17,005,359
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,050,000,000	8,010,282,000	7,970,892,841	7,970,892,841	0	7,970,892,841	99.51	39,389,159
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2619.951	13,674,647,000	8,883,165,000	8,843,775,841	8,843,775,841	0	8,843,775,841	99.56	39,389,159
955	Layanan Manajemen Keuangan								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	28,687,000	24,879,250	24,879,250	0	24,879,250	86.73	3,807,750
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	39,000,000	39,000,000	36,900,000	36,900,000	0	36,900,000	94.62	2,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	39,000,000	67,687,000	61,779,250	61,779,250	0	61,779,250	91.27	5,907,750
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	391,160,000	407,964,000	405,783,170	405,783,170	0	405,783,170	99.47	2,180,830
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	129,720,000	154,363,000	151,525,798	151,525,798	0	151,525,798	98.16	2,837,202
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	520,880,000	562,327,000	557,308,968	557,308,968	0	557,308,968	99.11	5,018,032
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	553,600,000	380,675,000	309,372,500	309,372,500	0	309,372,500	81.27	71,302,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, May 6,
Halaman : 9
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522191	Belanja Jasa Lainnya	572,650,000	418,371,000	413,461,375	413,461,375	0	413,461,375	98.83	4,909,625
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,126,250,000	799,046,000	722,833,875	722,833,875	0	722,833,875	90.46	76,212,125
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	280,430,000	266,978,000	250,690,000	250,690,000	0	250,690,000	93.90	16,288,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,310,700,000	1,083,298,000	1,083,224,096	1,083,224,096	0	1,083,224,096	99.99	73,904
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,591,130,000	1,350,276,000	1,333,914,096	1,333,914,096	0	1,333,914,096	98.79	16,361,904
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,277,260,000	2,779,336,000	2,675,836,189	2,675,836,189	0	2,675,836,189	96.28	103,499,811
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2619.955	3,277,260,000	2,779,336,000	2,675,836,189	2,675,836,189	0	2,675,836,189	96.28	103,499,811
956	Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	80,000,000	110,715,000	110,715,000	110,715,000	0	110,715,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	333,000,000	169,200,000	89,200,000	89,200,000	0	89,200,000	52.72	80,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	318,596,000	143,123,000	139,284,913	139,284,913	0	139,284,913	97.32	3,838,087
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	731,596,000	423,038,000	339,199,913	339,199,913	0	339,199,913	80.18	83,838,087
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	41,339,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	75.00	2,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	41,339,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	75.00	2,500,000
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	151,200,000	38,700,000	32,182,500	32,182,500	0	32,182,500	83.16	6,517,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	260,000,000	198,830,000	198,330,000	198,330,000	0	198,330,000	99.75	500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	411,200,000	237,530,000	230,512,500	230,512,500	0	230,512,500	97.05	7,017,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 10
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	68,238,000	68,238,000	68,237,697	68,237,697	0	68,237,697	100.00	303
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	8,250,000	8,240,000	8,240,000	0	8,240,000	99.88	10,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	657,960,000	420,442,000	420,192,000	420,192,000	0	420,192,000	99.94	250,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	347,420,000	424,480,000	424,480,000	424,480,000	(5,748,000)	418,732,000	98.65	5,748,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,080,818,000	921,410,000	921,149,697	921,149,697	(5,748,000)	915,401,697	99.97	6,008,303
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,264,953,000	1,591,978,000	1,498,362,110	1,498,362,110	(5,748,000)	1,492,614,110	94.12	99,363,890
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2619.956	2,264,953,000	1,591,978,000	1,498,362,110	1,498,362,110	(5,748,000)	1,492,614,110	94.12	99,363,890
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	49,800,000	49,011,500	49,011,500	0	49,011,500	98.42	788,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19,470,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	19,470,000	74,800,000	74,011,500	74,011,500	0	74,011,500	98.95	788,500
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	98,000,000	49,335,000	49,335,000	49,335,000	0	49,335,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	119,700,000	0	0	0	0	0	0.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	733,910,000	1,000,027,000	970,136,528	970,136,528	0	970,136,528	97.01	29,890,472
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	951,610,000	1,049,362,000	1,019,471,528	1,019,471,528	0	1,019,471,528	97.15	29,890,472
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	160,000,000	157,954,000	157,950,605	157,950,605	0	157,950,605	100.00	3,395
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	160,000,000	157,954,000	157,950,605	157,950,605	0	157,950,605	100.00	3,395

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 11
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	190,000,000	165,385,000	165,385,000	165,385,000	0	165,385,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	150,000,000	200,000,000	190,000,000	190,000,000	0	190,000,000	95.00	10,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	106,500,000	138,720,000	127,848,000	127,848,000	0	127,848,000	92.16	10,872,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	798,000,000	531,962,000	531,244,000	531,244,000	0	531,244,000	99.87	718,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,244,500,000	1,036,067,000	1,014,477,000	1,014,477,000	0	1,014,477,000	97.92	21,590,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,002,955,000	1,198,261,000	1,190,074,441	1,190,074,441	0	1,190,074,441	99.32	8,186,559
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74,580,000	109,580,000	104,929,000	104,929,000	0	104,929,000	95.76	4,651,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	197,223,000	205,566,000	204,535,000	204,535,000	0	204,535,000	99.50	1,031,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	344,040,000	371,860,000	371,343,176	371,343,176	0	371,343,176	99.86	516,824
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,618,798,000	1,885,267,000	1,870,881,617	1,870,881,617	0	1,870,881,617	99.24	14,385,383
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	109,072,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	109,072,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,103,450,000	4,203,450,000	4,136,792,250	4,136,792,250	0	4,136,792,250	98.41	66,657,750
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2619.958	4,103,450,000	4,203,450,000	4,136,792,250	4,136,792,250	0	4,136,792,250	98.41	66,657,750
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2619	23,320,310,000	17,457,929,000	17,154,766,390	17,154,766,390	(5,748,000)	17,149,018,390	98.26	308,910,610
2619	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Keuangan, Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol								
962	Layanan Umum								
52	BELANJA BARANG								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 12
 Prog.Id : lu_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	614,470,000	605,412,750	605,412,750	0	605,412,750	98.53	9,057,250
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	118,919,000	94,799,000	79,582,500	79,582,500	0	79,582,500	83.95	15,216,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	396,360,000	144,520,000	99,600,000	99,600,000	0	99,600,000	68.92	44,920,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	468,400,000	428,400,000	428,146,428	428,146,428	0	428,146,428	99.94	253,572
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	983,679,000	1,282,189,000	1,212,741,678	1,212,741,678	0	1,212,741,678	94.58	69,447,322
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	458,250,000	455,502,000	451,017,600	451,017,600	0	451,017,600	99.02	4,484,400
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	165,000,000	115,500,000	88,200,000	88,200,000	0	88,200,000	76.36	27,300,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	340,600,000	247,329,000	220,985,994	220,985,994	0	220,985,994	89.35	26,343,006
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	963,850,000	818,331,000	760,203,594	760,203,594	0	760,203,594	92.90	58,127,406
5221	Belanja Jasa								
522141	Belanja Sewa	360,000,000	5,390,766,000	5,384,594,100	5,384,594,100	0	5,384,594,100	99.89	6,171,900
522151	Belanja Jasa Profesi	293,700,000	196,500,000	87,100,000	87,100,000	0	87,100,000	44.33	109,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,262,050,000	2,192,464,000	2,171,176,541	2,171,176,541	0	2,171,176,541	99.03	21,287,459
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,915,750,000	7,779,730,000	7,642,870,641	7,642,870,641	0	7,642,870,641	98.24	136,859,359
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	189,778,000	103,574,000	95,269,272	95,269,272	0	95,269,272	91.98	8,304,728
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	821,740,000	705,220,000	628,410,000	628,410,000	0	628,410,000	89.11	76,810,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,153,755,000	1,459,055,000	1,427,851,616	1,427,851,616	0	1,427,851,616	97.86	31,203,384
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,183,273,000	2,272,349,000	2,156,030,888	2,156,030,888	0	2,156,030,888	94.88	116,318,112

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, May 6,
Halaman : 13
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,046,552,000	12,152,599,000	11,771,846,801	11,771,846,801	0	11,771,846,801	96.87	380,752,199
53	BELANJA MODAL								
5361	Belanja Modal Lainnya								
536111	Belanja Modal Lainnya	20,000,000	20,000,000	19,996,900	19,996,900	0	19,996,900	99.98	3,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	20,000,000	20,000,000	19,996,900	19,996,900	0	19,996,900	99.98	3,100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	20,000,000	20,000,000	19,996,900	19,996,900	0	19,996,900	99.98	3,100
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2619.962	8,066,552,000	12,172,599,000	11,791,843,701	11,791,843,701	0	11,791,843,701	96.87	380,755,299
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2619	8,066,552,000	12,172,599,000	11,791,843,701	11,791,843,701	0	11,791,843,701	96.87	380,755,299
2619	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Keuangan, Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol								
994	Layanan Perkantoran								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	909,203,000	701,854,000	509,364,160	509,364,160	0	509,364,160	72.57	192,489,840
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	909,203,000	701,854,000	509,364,160	509,364,160	0	509,364,160	72.57	192,489,840
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	0	1,440,000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	0	1,440,000,000	100.00	0
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,420,000,000	4,193,867,000	4,028,811,839	4,028,811,839	0	4,028,811,839	96.06	165,055,161
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,420,000,000	4,193,867,000	4,028,811,839	4,028,811,839	0	4,028,811,839	96.06	165,055,161
5221	Belanja Jasa								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 14
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522111	Belanja Langganan Listrik	7,200,000,000	5,040,000,000	4,942,160,641	4,942,160,641	0	4,942,160,641	98.06	97,839,359
522112	Belanja Langganan Telepon	216,000,000	144,000,000	127,957,488	127,957,488	0	127,957,488	88.86	16,042,512
522113	Belanja Langganan Air	360,000,000	318,000,000	316,563,823	316,563,823	0	316,563,823	99.55	1,436,177
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	360,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	18,700,000,000	18,385,123,000	18,247,375,517	18,247,375,517	0	18,247,375,517	99.25	137,747,483
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	26,836,000,000	23,887,123,000	23,634,057,469	23,634,057,469	0	23,634,057,469	98.94	253,065,531
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	500,000,000	461,997,282	461,997,282	0	461,997,282	92.40	38,002,718
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	761,390,000	1,896,749,000	1,604,246,630	1,604,246,630	0	1,604,246,630	84.58	292,502,370
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,287,000,000	34,000,000	20,118,700	20,118,700	0	20,118,700	59.17	13,881,300
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,000,000	70,000,000	27,434,500	27,434,500	0	27,434,500	39.19	42,565,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,118,390,000	2,500,749,000	2,113,797,112	2,113,797,112	0	2,113,797,112	84.53	386,951,888
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	32,723,593,000	32,723,593,000	31,726,030,580	31,726,030,580	0	31,726,030,580	96.95	997,562,420
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2619.994	32,723,593,000	32,723,593,000	31,726,030,580	31,726,030,580	0	31,726,030,580	96.95	997,562,420
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2619	32,723,593,000	32,723,593,000	31,726,030,580	31,726,030,580	0	31,726,030,580	96.95	997,562,420
2620	Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN								
965	Layanan Audit Internal								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	148,180,000	151,759,000	151,483,714	151,483,714	0	151,483,714	99.82	275,286

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 15
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	404,360,000	367,600,000	320,450,000	320,450,000	(1,275,000)	319,175,000	86.83	48,425,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	115,230,000	115,230,000	115,183,671	115,183,671	0	115,183,671	99.96	46,329
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	667,770,000	634,589,000	587,117,385	587,117,385	(1,275,000)	585,842,385	92.52	48,746,615
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	200,000,000	200,000,000	198,000,000	198,000,000	0	198,000,000	99.00	2,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	355,200,000	166,400,000	155,180,000	155,180,000	0	155,180,000	93.26	11,220,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000,000	200,000,000	199,980,000	199,980,000	0	199,980,000	99.99	20,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	855,200,000	566,400,000	553,160,000	553,160,000	0	553,160,000	97.66	13,240,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	18,012,000	160,112,000	156,089,236	156,089,236	0	156,089,236	97.49	4,022,764
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	310,008,000	191,808,000	191,540,000	191,540,000	(273,500)	191,266,500	99.72	541,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	587,270,000	885,351,000	885,351,000	885,351,000	0	885,351,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	915,290,000	1,237,271,000	1,232,980,236	1,232,980,236	(273,500)	1,232,706,736	99.65	4,564,264
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,438,260,000	2,438,260,000	2,373,257,621	2,373,257,621	(1,548,500)	2,371,709,121	97.33	66,550,879
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2620.965	2,438,260,000	2,438,260,000	2,373,257,621	2,373,257,621	(1,548,500)	2,371,709,121	97.33	66,550,879
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2620	2,438,260,000	2,438,260,000	2,373,257,621	2,373,257,621	(1,548,500)	2,371,709,121	97.33	66,550,879
2621	Penelaahan Kebijakan Pimpinan								
001	Layanan Dukungan Kegiatan Pimpinan								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	124,200,000	174,200,000	174,179,576	174,179,576	0	174,179,576	99.99	20,424
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	124,200,000	174,200,000	174,179,576	174,179,576	0	174,179,576	99.99	20,424

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, May 6,
Halaman : 16
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	567,103,000	667,103,000	617,554,802	617,554,802	0	617,554,802	92.57	49,548,198
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	215,817,000	65,817,000	64,515,300	64,515,300	0	64,515,300	98.02	1,301,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	782,920,000	732,920,000	682,070,102	682,070,102	0	682,070,102	93.06	50,849,898
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	907,120,000	907,120,000	856,249,678	856,249,678	0	856,249,678	94.39	50,870,322
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2621.001	907,120,000	907,120,000	856,249,678	856,249,678	0	856,249,678	94.39	50,870,322
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2621	907,120,000	907,120,000	856,249,678	856,249,678	0	856,249,678	94.39	50,870,322
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04.90.01	140,053,745,000	147,469,740,000	144,795,019,308	144,795,019,308	(38,439,518)	144,756,579,790	98.19	2,713,160,210
06	Program Pembinaan BUMN								
2622	Pembinaan Bumh Sektor Industri Agro dan Farmasi I								
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi I								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	21,132,000	100,950,000	100,946,670	100,946,670	0	100,946,670	100.00	3,330
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	220,455,000	162,017,000	162,016,516	162,016,516	0	162,016,516	100.00	484
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	241,587,000	262,967,000	262,963,186	262,963,186	0	262,963,186	100.00	3,814
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	200,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, May 6,
Halaman : 17
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522151	Belanja Jasa Profesi	34,400,000	54,797,000	54,300,000	54,300,000	0	54,300,000	99.09	497,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	265,000,000	402,137,000	398,015,750	398,015,750	0	398,015,750	98.98	4,121,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	499,400,000	456,934,000	452,315,750	452,315,750	0	452,315,750	98.99	4,618,250
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	320,894,000	602,443,000	599,151,449	599,151,449	0	599,151,449	99.45	3,291,551
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	234,960,000	168,698,000	168,435,000	168,435,000	0	168,435,000	99.84	263,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	455,199,000	398,912,000	398,832,800	398,832,800	0	398,832,800	99.98	79,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,011,053,000	1,170,053,000	1,166,419,249	1,166,419,249	0	1,166,419,249	99.69	3,633,751
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,753,840,000	1,889,954,000	1,881,698,185	1,881,698,185	0	1,881,698,185	99.56	8,255,815
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2622.001	1,753,840,000	1,889,954,000	1,881,698,185	1,881,698,185	0	1,881,698,185	99.56	8,255,815
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi I yang profesional								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	151,099,000	103,486,000	98,813,600	98,813,600	0	98,813,600	95.48	4,672,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	151,099,000	103,486,000	98,813,600	98,813,600	0	98,813,600	95.48	4,672,400
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	89,354,000	115,644,000	114,012,056	114,012,056	0	114,012,056	98.59	1,631,944
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,000,000	28,800,000	28,375,000	28,375,000	0	28,375,000	98.52	425,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	153,540,000	101,060,000	101,060,000	101,060,000	0	101,060,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	177,376,000	184,176,000	184,136,589	184,136,589	0	184,136,589	99.98	39,411
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	456,270,000	429,680,000	427,583,645	427,583,645	0	427,583,645	99.51	2,096,355

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 18
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	61,911,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	61,911,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	669,280,000	533,166,000	526,397,245	526,397,245	0	526,397,245	98.73	6,768,755
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2622.002	669,280,000	533,166,000	526,397,245	526,397,245	0	526,397,245	98.73	6,768,755
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2622	2,423,120,000	2,423,120,000	2,408,095,430	2,408,095,430	0	2,408,095,430	99.38	15,024,570
2623	Pembinaan Bumh Sektor Industri Agro dan Farmasi II								
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi II								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	23,400,000	6,920,000	6,820,000	6,820,000	0	6,820,000	98.55	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	23,400,000	6,920,000	6,820,000	6,820,000	0	6,820,000	98.55	100,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	0	94,457,000	94,457,000	94,457,000	0	94,457,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	112,470,000	198,720,000	190,326,874	190,326,874	0	190,326,874	95.78	8,393,126
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	112,470,000	293,177,000	284,783,874	284,783,874	0	284,783,874	97.14	8,393,126
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	20,400,000	39,900,000	36,100,000	36,100,000	0	36,100,000	90.48	3,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	20,400,000	39,900,000	36,100,000	36,100,000	0	36,100,000	90.48	3,800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	729,994,000	729,994,000	729,831,296	729,831,296	(3,085,000)	726,746,296	99.56	3,247,704

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 19
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	168,900,000	264,450,000	264,426,238	264,426,238	0	264,426,238	99.99	23,762
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	919,894,000	1,015,444,000	1,015,257,534	1,015,257,534	(3,085,000)	1,012,172,534	99.98	3,271,466
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,076,164,000	1,355,441,000	1,342,961,408	1,342,961,408	(3,085,000)	1,339,876,408	99.08	15,564,592
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2623.001	1,076,164,000	1,355,441,000	1,342,961,408	1,342,961,408	(3,085,000)	1,339,876,408	99.08	15,564,592
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi II yang profesional								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	24,000,000	23,630,000	23,630,000	0	23,630,000	98.46	370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	24,000,000	23,630,000	23,630,000	0	23,630,000	98.46	370,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	122,299,000	99,938,000	99,937,200	99,937,200	0	99,937,200	100.00	800
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	70,380,000	99,360,000	98,614,406	98,614,406	0	98,614,406	99.25	745,594
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	192,679,000	199,298,000	198,551,606	198,551,606	0	198,551,606	99.63	746,394
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	20,400,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	0	19,800,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	232,189,000	203,573,000	203,323,750	203,323,750	0	203,323,750	99.88	249,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	252,589,000	223,373,000	223,123,750	223,123,750	0	223,123,750	99.89	249,250
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	287,258,000	287,258,000	286,792,835	286,792,835	0	286,792,835	99.84	465,165
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	426,660,000	157,230,000	157,210,000	157,210,000	0	157,210,000	99.99	20,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 20
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	260,250,000	249,000,000	248,967,932	248,967,932	0	248,967,932	99.99	32,068
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	974,168,000	693,488,000	692,970,767	692,970,767	0	692,970,767	99.93	517,233
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,419,436,000	1,140,159,000	1,138,276,123	1,138,276,123	0	1,138,276,123	99.83	1,882,877
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2623.002	1,419,436,000	1,140,159,000	1,138,276,123	1,138,276,123	0	1,138,276,123	99.83	1,882,877
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2623	2,495,600,000	2,495,600,000	2,481,237,531	2,481,237,531	(3,085,000)	2,478,152,531	99.42	17,447,469
2624	Pembinaan Bumh Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I								
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,440,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,440,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	188,058,000	190,089,000	190,066,623	190,066,623	0	190,066,623	99.99	22,377
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	188,058,000	190,089,000	190,066,623	190,066,623	0	190,066,623	99.99	22,377
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	398,878,000	448,878,000	441,542,941	441,542,941	0	441,542,941	98.37	7,335,059
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,800,000	19,500,000	19,380,000	19,380,000	0	19,380,000	99.38	120,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81,780,000	90,186,000	86,200,000	86,200,000	0	86,200,000	95.58	3,986,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40,400,000	40,400,000	40,400,000	40,400,000	0	40,400,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	540,858,000	598,964,000	587,522,941	587,522,941	0	587,522,941	98.09	11,441,059
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	730,356,000	789,053,000	777,589,564	777,589,564	0	777,589,564	98.55	11,463,436

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 21
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2624.001	730,356,000	789,053,000	777,589,564	777,589,564	0	777,589,564	98.55	11,463,436
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I yang profesional								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	60,000,000	47,350,000	47,350,000	0	47,350,000	78.92	12,650,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	60,000,000	47,350,000	47,350,000	0	47,350,000	78.92	12,650,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	160,882,000	154,000,000	154,000,000	154,000,000	0	154,000,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	526,440,000	411,720,000	206,410,000	206,410,000	0	206,410,000	50.13	205,310,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	43,125,000	57,960,000	52,040,125	52,040,125	0	52,040,125	89.79	5,919,875
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	730,447,000	623,680,000	412,450,125	412,450,125	0	412,450,125	66.13	211,229,875
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	22,000,000	19,200,000	18,800,000	18,800,000	0	18,800,000	97.92	400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	329,211,000	254,060,000	253,580,000	253,580,000	0	253,580,000	99.81	480,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	351,211,000	273,260,000	272,380,000	272,380,000	0	272,380,000	99.68	880,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	133,280,000	125,467,000	125,157,227	125,157,227	0	125,157,227	99.75	309,773
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42,450,000	16,350,000	16,240,000	16,240,000	0	16,240,000	99.33	110,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	121,096,000	221,030,000	214,190,346	214,190,346	0	214,190,346	96.91	6,839,654
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	296,826,000	362,847,000	355,587,573	355,587,573	0	355,587,573	98.00	7,259,427
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,378,484,000	1,319,787,000	1,087,767,698	1,087,767,698	0	1,087,767,698	82.42	232,019,302

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 22
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2624.002	1,378,484,000	1,319,787,000	1,087,767,698	1,087,767,698	0	1,087,767,698	82.42	232,019,302
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2624	2,108,840,000	2,108,840,000	1,865,357,262	1,865,357,262	0	1,865,357,262	88.45	243,482,738
2625	Pembinaan Bumh Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata II								
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata II								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	23,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	23,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	125,235,000	125,235,000	117,841,154	117,841,154	0	117,841,154	94.10	7,393,846
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	125,235,000	125,235,000	117,841,154	117,841,154	0	117,841,154	94.10	7,393,846
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	20,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	20,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	299,170,000	350,699,000	348,416,032	348,416,032	0	348,416,032	99.35	2,282,968
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	168,900,000	355,770,000	349,465,427	349,465,427	0	349,465,427	98.23	6,304,573
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	503,070,000	741,469,000	732,881,459	732,881,459	0	732,881,459	98.84	8,587,541
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	672,105,000	866,704,000	850,722,613	850,722,613	0	850,722,613	98.16	15,981,387
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2625.001	672,105,000	866,704,000	850,722,613	850,722,613	0	850,722,613	98.16	15,981,387

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, May 6,
Halaman : 23
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Industri Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata II yang profesional								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	0	0	0	0	0	0.00	0
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	197,299,000	197,299,000	156,585,000	156,585,000	0	156,585,000	79.36	40,714,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	78,660,000	128,453,000	106,953,527	106,953,527	0	106,953,527	83.26	21,499,473
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	275,959,000	325,752,000	263,538,527	263,538,527	0	263,538,527	80.90	62,213,473
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	61,200,000	35,700,000	29,700,000	29,700,000	0	29,700,000	83.19	6,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	317,018,000	199,744,000	186,450,000	186,450,000	0	186,450,000	93.34	13,294,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	378,218,000	235,444,000	216,150,000	216,150,000	0	216,150,000	91.81	19,294,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	287,258,000	287,258,000	286,826,160	286,826,160	0	286,826,160	99.85	431,840
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	280,830,000	120,330,000	119,535,000	119,535,000	0	119,535,000	99.34	795,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	206,000,000	206,000,000	206,000,000	206,000,000	0	206,000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	774,088,000	613,588,000	612,361,160	612,361,160	0	612,361,160	99.80	1,226,840
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,428,265,000	1,174,784,000	1,092,049,687	1,092,049,687	0	1,092,049,687	92.96	82,734,313
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2625.002	1,428,265,000	1,174,784,000	1,092,049,687	1,092,049,687	0	1,092,049,687	92.96	82,734,313
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2625	2,100,370,000	2,041,488,000	1,942,772,300	1,942,772,300	0	1,942,772,300	95.16	98,715,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 24
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2627	Pembinaan Bumh Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media I								
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Pertambangan, Industri Strategi dan Media I								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	92,854,000	122,308,000	122,305,700	122,305,700	0	122,305,700	100.00	2,300
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	56,685,000	56,685,000	55,565,800	55,565,800	0	55,565,800	98.03	1,119,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	149,539,000	178,993,000	177,871,500	177,871,500	0	177,871,500	99.37	1,121,500
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	25,600,000	25,600,000	25,600,000	25,600,000	0	25,600,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	66,295,000	101,094,000	98,450,000	98,450,000	0	98,450,000	97.38	2,644,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	91,895,000	126,694,000	124,050,000	124,050,000	0	124,050,000	97.91	2,644,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	764,536,000	732,371,000	732,239,418	732,239,418	0	732,239,418	99.98	131,582
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51,000,000	51,000,000	32,200,000	32,200,000	0	32,200,000	63.14	18,800,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	99,540,000	90,305,000	83,590,700	83,590,700	0	83,590,700	92.56	6,714,300
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	286,040,000	301,321,000	301,320,844	301,320,844	0	301,320,844	100.00	156
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,201,116,000	1,174,997,000	1,149,350,962	1,149,350,962	0	1,149,350,962	97.82	25,646,038
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	77,350,000	0	0	0	0	0.00	77,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	77,350,000	0	0	0	0	0.00	77,350,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,442,550,000	1,558,034,000	1,451,272,462	1,451,272,462	0	1,451,272,462	93.15	106,761,538

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, May 6,
Halaman : 25
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2627.001	1,442,550,000	1,558,034,000	1,451,272,462	1,451,272,462	0	1,451,272,462	93.15	106,761,538
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Pertambangan, Industri Strategi dan Media I yang profesional								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	48,000,000	47,210,000	47,210,000	0	47,210,000	98.35	790,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	48,000,000	47,210,000	47,210,000	0	47,210,000	98.35	790,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	114,854,000	97,495,000	97,240,000	97,240,000	0	97,240,000	99.74	255,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	26,240,000	107,500,000	107,443,800	107,443,800	0	107,443,800	99.95	56,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	141,094,000	204,995,000	204,683,800	204,683,800	0	204,683,800	99.85	311,200
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	25,600,000	25,600,000	25,600,000	25,600,000	0	25,600,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	387,801,000	215,500,000	213,940,000	213,940,000	0	213,940,000	99.28	1,560,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	413,401,000	241,100,000	239,540,000	239,540,000	0	239,540,000	99.35	1,560,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	178,305,000	259,797,000	257,574,153	257,574,153	(50,000)	257,524,153	99.13	2,272,847
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	284,300,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	462,605,000	289,797,000	287,574,153	287,574,153	(50,000)	287,524,153	99.23	2,272,847
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,017,100,000	783,892,000	779,007,953	779,007,953	(50,000)	778,957,953	99.38	4,934,047
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2627.002	1,017,100,000	783,892,000	779,007,953	779,007,953	(50,000)	778,957,953	99.38	4,934,047
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2627	2,459,650,000	2,341,926,000	2,230,280,415	2,230,280,415	(50,000)	2,230,230,415	95.23	111,695,585

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 26
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2628	Pembinaan Bumh Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II								
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	104,404,000	104,204,000	94,673,980	94,673,980	0	94,673,980	90.85	9,530,020
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	147,680,000	240,976,000	240,306,810	240,306,810	0	240,306,810	99.72	669,190
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	252,084,000	345,180,000	334,980,790	334,980,790	0	334,980,790	97.05	10,199,210
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	47,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,000,000,000	179,765,000	0	0	0	0	0.00	179,765,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,047,800,000	179,765,000	0	0	0	0	0.00	179,765,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	802,193,000	593,992,000	578,386,528	578,386,528	0	578,386,528	97.37	15,605,472
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,250,000	23,250,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	90.32	2,250,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	104,055,000	191,705,000	190,795,000	190,795,000	0	190,795,000	99.53	910,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	191,840,000	212,858,000	212,732,075	212,732,075	0	212,732,075	99.94	125,925
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,121,338,000	1,021,805,000	1,002,913,603	1,002,913,603	0	1,002,913,603	98.15	18,891,397
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	304,122,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	304,122,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,725,344,000	1,546,750,000	1,337,894,393	1,337,894,393	0	1,337,894,393	86.50	208,855,607

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, May 6,
Halaman : 27
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2628.001	3,725,344,000	1,546,750,000	1,337,894,393	1,337,894,393	0	1,337,894,393	86.50	208,855,607
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II yang profesional								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,100,000	78,005,000	77,987,460	77,987,460	0	77,987,460	99.98	17,540
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	22,100,000	78,005,000	77,987,460	77,987,460	0	77,987,460	99.98	17,540
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	114,946,000	114,946,000	112,512,230	112,512,230	0	112,512,230	97.88	2,433,770
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	80,427,000	79,012,400	79,012,400	0	79,012,400	98.24	1,414,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	114,946,000	195,373,000	191,524,630	191,524,630	0	191,524,630	98.03	3,848,370
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	137,046,000	273,378,000	269,512,090	269,512,090	0	269,512,090	98.59	3,865,910
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2628.002	137,046,000	273,378,000	269,512,090	269,512,090	0	269,512,090	98.59	3,865,910
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2628	3,862,390,000	1,820,128,000	1,607,406,483	1,607,406,483	0	1,607,406,483	88.31	212,721,517
2629	Pembinaan BumN Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I								
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	90,000,000	189,615,000	171,270,000	171,270,000	0	171,270,000	90.33	18,345,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	299,691,000	299,691,000	277,147,440	277,147,440	0	277,147,440	92.48	22,543,560
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	389,691,000	489,306,000	448,417,440	448,417,440	0	448,417,440	91.64	40,888,560

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 28
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	103,800,000	57,800,000	51,700,000	51,700,000	0	51,700,000	89.45	6,100,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	206,899,000	286,447,000	285,340,000	285,340,000	0	285,340,000	99.61	1,107,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	310,699,000	344,247,000	337,040,000	337,040,000	0	337,040,000	97.91	7,207,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,005,894,000	859,059,000	848,299,132	848,299,132	0	848,299,132	98.75	10,759,868
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,560,000	16,432,000	16,431,500	16,431,500	0	16,431,500	100.00	500
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	216,672,000	236,512,000	226,228,840	226,228,840	0	226,228,840	95.65	10,283,160
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	345,904,000	372,864,000	322,569,912	322,569,912	0	322,569,912	86.51	50,294,088
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,588,030,000	1,484,867,000	1,413,529,384	1,413,529,384	0	1,413,529,384	95.20	71,337,616
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,288,420,000	2,318,420,000	2,198,986,824	2,198,986,824	0	2,198,986,824	94.85	119,433,176
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2629.001	2,288,420,000	2,318,420,000	2,198,986,824	2,198,986,824	0	2,198,986,824	94.85	119,433,176
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I yang profesional								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	0	0	0	0	0	0.00	0
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	104,640,000	74,640,000	73,679,400	73,679,400	0	73,679,400	98.71	960,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	104,640,000	74,640,000	73,679,400	73,679,400	0	73,679,400	98.71	960,600
5221	Belanja Jasa								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 29
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522191	Belanja Jasa Lainnya	65,000,000	65,000,000	64,830,000	64,830,000	0	64,830,000	99.74	170,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	65,000,000	65,000,000	64,830,000	64,830,000	0	64,830,000	99.74	170,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	169,640,000	139,640,000	138,509,400	138,509,400	0	138,509,400	99.19	1,130,600
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2629.002	169,640,000	139,640,000	138,509,400	138,509,400	0	138,509,400	99.19	1,130,600
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2629	2,458,060,000	2,458,060,000	2,337,496,224	2,337,496,224	0	2,337,496,224	95.10	120,563,776
2630	Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II								
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	70,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	176,145,000	246,145,000	246,109,745	246,109,745	0	246,109,745	99.99	35,255
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	246,145,000	246,145,000	246,109,745	246,109,745	0	246,109,745	99.99	35,255
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0.00	10,200,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	200,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,210,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0.00	10,200,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	385,190,000	913,320,000	852,810,627	852,810,627	0	852,810,627	93.37	60,509,373
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0.00	6,000,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	93,300,000	71,230,000	71,170,000	71,170,000	0	71,170,000	99.92	60,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 30
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	287,925,000	165,770,000	98,286,048	98,286,048	0	98,286,048	59.29	67,483,952
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	802,415,000	1,156,320,000	1,022,266,675	1,022,266,675	0	1,022,266,675	88.41	134,053,325
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,258,760,000	1,412,665,000	1,268,376,420	1,268,376,420	0	1,268,376,420	89.79	144,288,580
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2630.001	2,258,760,000	1,412,665,000	1,268,376,420	1,268,376,420	0	1,268,376,420	89.79	144,288,580
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II yang profesional								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36,020,000	36,020,000	35,909,200	35,909,200	0	35,909,200	99.69	110,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	36,020,000	36,020,000	35,909,200	35,909,200	0	35,909,200	99.69	110,800
5221	Belanja Jasa								
522191	Belanja Jasa Lainnya	130,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	130,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49,200,000	23,650,000	23,650,000	23,650,000	0	23,650,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87,600,000	43,875,000	43,875,000	43,875,000	0	43,875,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	136,800,000	67,525,000	67,525,000	67,525,000	0	67,525,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	302,820,000	103,545,000	103,434,200	103,434,200	0	103,434,200	99.89	110,800
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2630.002	302,820,000	103,545,000	103,434,200	103,434,200	0	103,434,200	99.89	110,800
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2630	2,561,580,000	1,516,210,000	1,371,810,620	1,371,810,620	0	1,371,810,620	90.48	144,399,380
2631	Pembinaan BumN Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan III								
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 31
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III								
5212	BELANJA BARANG								
521211	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	50,000,000	50,000,000	49,714,500	49,714,500	0	49,714,500	99.43	285,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	203,990,000	203,990,000	203,447,700	203,447,700	0	203,447,700	99.73	542,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	253,990,000	253,990,000	253,162,200	253,162,200	0	253,162,200	99.67	827,800
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	123,600,000	34,400,000	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	55.23	15,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	184,395,000	184,395,000	183,507,500	183,507,500	0	183,507,500	99.52	887,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	307,995,000	218,795,000	202,507,500	202,507,500	0	202,507,500	92.56	16,287,500
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	304,500,000	707,034,000	610,510,152	610,510,152	0	610,510,152	86.35	96,523,848
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,400,000	16,800,000	15,240,000	15,240,000	0	15,240,000	90.71	1,560,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	290,800,000	155,162,000	141,480,000	141,480,000	0	141,480,000	91.18	13,682,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	252,488,000	266,309,000	264,191,100	264,191,100	0	264,191,100	99.20	2,117,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	874,188,000	1,145,305,000	1,031,421,252	1,031,421,252	0	1,031,421,252	90.06	113,883,748
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	287,343,000	406,000	0	0	0	0	0.00	406,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	287,343,000	406,000	0	0	0	0	0.00	406,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,723,516,000	1,618,496,000	1,487,090,952	1,487,090,952	0	1,487,090,952	91.88	131,405,048
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2631.001	1,723,516,000	1,618,496,000	1,487,090,952	1,487,090,952	0	1,487,090,952	91.88	131,405,048
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Konstruksi dan Sarana								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 32
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	dan Prasarana Perhubungan III yang profesional								
5211	BELANJA BARANG								
521111	Belanja Barang Operasional								
	Belanja Keperluan Perkantoran	0	29,442,000	23,770,000	23,770,000	0	23,770,000	80.74	5,672,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	29,442,000	23,770,000	23,770,000	0	23,770,000	80.74	5,672,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	50,000,000	50,000,000	49,588,000	49,588,000	0	49,588,000	99.18	412,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	114,204,000	97,361,000	97,360,300	97,360,300	0	97,360,300	100.00	700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	164,204,000	147,361,000	146,948,300	146,948,300	0	146,948,300	99.72	412,700
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	61,800,000	17,400,000	17,400,000	17,400,000	0	17,400,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	256,390,000	226,391,000	219,520,000	219,520,000	0	219,520,000	96.96	6,871,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	318,190,000	243,791,000	236,920,000	236,920,000	0	236,920,000	97.18	6,871,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	54,132,000	49,335,994	49,335,994	0	49,335,994	91.14	4,796,006
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40,580,000	65,280,000	44,522,201	44,522,201	0	44,522,201	68.20	20,757,799
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	40,580,000	119,412,000	93,858,195	93,858,195	0	93,858,195	78.60	25,553,805
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	522,974,000	540,006,000	501,496,495	501,496,495	0	501,496,495	92.87	38,509,505
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2631.002	522,974,000	540,006,000	501,496,495	501,496,495	0	501,496,495	92.87	38,509,505
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2631	2,246,490,000	2,158,502,000	1,988,587,447	1,988,587,447	0	1,988,587,447	92.13	169,914,553
2632	Pembinaan Bumh Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan I								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 33
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	175,659,000	50,000,000	48,862,000	48,862,000	0	48,862,000	97.72	1,138,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	135,516,000	250,252,000	244,490,389	244,490,389	0	244,490,389	97.70	5,761,611
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	311,175,000	300,252,000	293,352,389	293,352,389	0	293,352,389	97.70	6,899,611
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	100,000,000	20,000,000	13,380,000	13,380,000	0	13,380,000	66.90	6,620,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	100,000,000	20,000,000	13,380,000	13,380,000	0	13,380,000	66.90	6,620,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	296,018,000	579,285,000	578,052,031	578,052,031	(376,000)	577,676,031	99.72	1,608,969
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	250,520,000	328,012,000	328,012,000	328,012,000	0	328,012,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	396,285,000	244,659,000	244,655,296	244,655,296	0	244,655,296	100.00	3,704
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	942,823,000	1,151,956,000	1,150,719,327	1,150,719,327	(376,000)	1,150,343,327	99.89	1,612,673
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,353,998,000	1,472,208,000	1,457,451,716	1,457,451,716	(376,000)	1,457,075,716	99.00	15,132,284
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2632.001	1,353,998,000	1,472,208,000	1,457,451,716	1,457,451,716	(376,000)	1,457,075,716	99.00	15,132,284
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I yang profesional								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,700,000	20,700,000	20,700,000	20,700,000	0	20,700,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	20,700,000	20,700,000	20,700,000	20,700,000	0	20,700,000	100.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 34
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5221	Belanja Jasa								
522191	Belanja Jasa Lainnya	130,000,000	11,790,000	11,790,000	11,790,000	0	11,790,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	130,000,000	11,790,000	11,790,000	11,790,000	0	11,790,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	150,700,000	32,490,000	32,490,000	32,490,000	0	32,490,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2632.002	150,700,000	32,490,000	32,490,000	32,490,000	0	32,490,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2632	1,504,698,000	1,504,698,000	1,489,941,716	1,489,941,716	(376,000)	1,489,565,716	99.02	15,132,284
2633	Pembinaan Bumh Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II								
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	50,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	170,154,000	261,334,000	232,018,870	232,018,870	0	232,018,870	88.78	29,315,130
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	220,154,000	261,334,000	232,018,870	232,018,870	0	232,018,870	88.78	29,315,130
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	12,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	150,580,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	163,180,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	697,129,000	697,129,000	696,911,031	696,911,031	0	696,911,031	99.97	217,969
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	109,400,000	109,400,000	109,348,700	109,348,700	0	109,348,700	99.95	51,300
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	99,950,000	248,450,000	204,482,251	204,482,251	0	204,482,251	82.30	43,967,749

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 35
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	906,479,000	1,054,979,000	1,010,741,982	1,010,741,982	0	1,010,741,982	95.81	44,237,018
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,289,813,000	1,319,913,000	1,246,360,852	1,246,360,852	0	1,246,360,852	94.43	73,552,148
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2633.001	1,289,813,000	1,319,913,000	1,246,360,852	1,246,360,852	0	1,246,360,852	94.43	73,552,148
	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II yang profesional								
	BELANJA BARANG								
	5211 Belanja Barang Operasional								
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	0	47,420,000	42,270,000	42,270,000	0	42,270,000	89.14	5,150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	47,420,000	42,270,000	42,270,000	0	42,270,000	89.14	5,150,000
	5212 Belanja Barang Non Operasional								
	521211 Belanja Bahan	70,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,975,000	44,991,000	44,907,000	44,907,000	0	44,907,000	99.81	84,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	88,975,000	44,991,000	44,907,000	44,907,000	0	44,907,000	99.81	84,000
	5221 Belanja Jasa								
	522151 Belanja Jasa Profesi	31,680,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	522191 Belanja Jasa Lainnya	279,884,000	207,598,000	204,775,000	204,775,000	0	204,775,000	98.64	2,823,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	311,564,000	207,598,000	204,775,000	204,775,000	0	204,775,000	98.64	2,823,000
	5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
	524111 Belanja Perjalanan Biasa	365,468,000	395,398,000	385,590,854	385,590,854	(20,000,000)	365,590,854	92.46	29,807,146
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84,600,000	125,100,000	124,933,000	124,933,000	0	124,933,000	99.87	167,000
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37,100,000	37,100,000	37,100,000	37,100,000	0	37,100,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	487,168,000	557,598,000	547,623,854	547,623,854	(20,000,000)	527,623,854	98.21	29,974,146

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 36
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	887,707,000	857,607,000	839,575,854	839,575,854	(20,000,000)	819,575,854	97.90	38,031,146
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2633.002	887,707,000	857,607,000	839,575,854	839,575,854	(20,000,000)	819,575,854	97.90	38,031,146
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2633	2,177,520,000	2,177,520,000	2,085,936,706	2,085,936,706	(20,000,000)	2,065,936,706	95.79	111,583,294
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04.90.06	26,398,318,000	23,046,092,000	21,808,922,134	21,808,922,134	(23,511,000)	21,785,411,134	94.63	1,260,680,866
06	Program Pembinaan BUMN								
5808	Restrukturisasi dan Pendayagunaan Potofolio Kepemilikan Negara Minoritas								
002	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN dalam restrukturisasi dan entitas usaha dengan kepemilikan negara minoritas								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	20,000,000	20,000,000	18,601,000	18,601,000	0	18,601,000	93.01	1,399,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	78,920,000	0	0	0	0	0	0.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	142,828,000	144,524,000	143,466,650	143,466,650	0	143,466,650	99.27	1,057,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	241,748,000	164,524,000	162,067,650	162,067,650	0	162,067,650	98.51	2,456,350
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	15,000,000	29,000,000	18,600,000	18,600,000	0	18,600,000	64.14	10,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	15,000,000	29,000,000	18,600,000	18,600,000	0	18,600,000	64.14	10,400,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	616,776,000	602,181,000	546,969,422	546,969,422	0	546,969,422	90.83	55,211,578
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,000,000	45,000,000	32,660,000	32,660,000	0	32,660,000	72.58	12,340,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123,360,000	207,765,000	195,981,440	195,981,440	0	195,981,440	94.33	11,783,560

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, May 6,
Halaman : 37
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	142,650,000	231,600,000	231,218,000	231,218,000	0	231,218,000	99.84	382,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	927,786,000	1,086,546,000	1,006,828,862	1,006,828,862	0	1,006,828,862	92.66	79,717,138
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	173,467,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	173,467,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,358,001,000	1,280,070,000	1,187,496,512	1,187,496,512	0	1,187,496,512	92.77	92,573,488
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5808.002	1,358,001,000	1,280,070,000	1,187,496,512	1,187,496,512	0	1,187,496,512	92.77	92,573,488
003	Pencapaian pengelolaan BUMN dalam restrukturisasi yang profesional								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	48,000,000	47,370,000	47,370,000	0	47,370,000	98.69	630,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	48,000,000	47,370,000	47,370,000	0	47,370,000	98.69	630,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	80,000,000	134,000,000	133,017,500	133,017,500	0	133,017,500	99.27	982,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	72,877,000	72,877,000	65,884,440	65,884,440	0	65,884,440	90.40	6,992,560
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	152,877,000	206,877,000	198,901,940	198,901,940	0	198,901,940	96.15	7,975,060
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	8,000,000	8,000,000	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	85.00	1,200,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	448,900,000	201,911,000	185,355,500	185,355,500	0	185,355,500	91.80	16,555,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	456,900,000	209,911,000	192,155,500	192,155,500	0	192,155,500	91.54	17,755,500
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 38
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524111	Belanja Perjalanan Biasa	190,992,000	190,992,000	172,584,016	172,584,016	0	172,584,016	90.36	18,407,984
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	85,170,000	85,170,000	83,160,000	83,160,000	0	83,160,000	97.64	2,010,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	221,900,000	221,900,000	217,262,716	217,262,716	0	217,262,716	97.91	4,637,284
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	498,062,000	498,062,000	473,006,732	473,006,732	0	473,006,732	94.97	25,055,268
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,107,839,000	962,850,000	911,434,172	911,434,172	0	911,434,172	94.66	51,415,828
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5808.003	1,107,839,000	962,850,000	911,434,172	911,434,172	0	911,434,172	94.66	51,415,828
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5808	2,465,840,000	2,242,920,000	2,098,930,684	2,098,930,684	0	2,098,930,684	93.58	143,989,316
5809	Pengembangan Usaha dan Privatisasi								
002	Pencapaian pengembangan BUMN yang selaras dengan strategi pembangunan bangsa								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	151,000,000	201,362,000	118,826,400	118,826,400	0	118,826,400	59.01	82,535,600
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,800,000	13,800,000	13,750,430	13,750,430	0	13,750,430	99.64	49,570
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	164,800,000	215,162,000	132,576,830	132,576,830	0	132,576,830	61.62	82,585,170
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	161,000,000	308,000,000	301,491,472	301,491,472	0	301,491,472	97.89	6,508,528
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	161,000,000	308,000,000	301,491,472	301,491,472	0	301,491,472	97.89	6,508,528
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	325,800,000	523,162,000	434,068,302	434,068,302	0	434,068,302	82.97	89,093,698
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5809.002	325,800,000	523,162,000	434,068,302	434,068,302	0	434,068,302	82.97	89,093,698
003	Pencapaian perencanaan kebijakan yang berkualitas dan implementatif								
52	BELANJA BARANG								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 39
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	71,600,000	49,986,000	49,985,750	49,985,750	0	49,985,750	100.00	250
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	751,710,000	513,516,000	437,330,000	437,330,000	0	437,330,000	85.16	76,186,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	155,525,000	248,463,000	193,499,915	193,499,915	0	193,499,915	77.88	54,963,085
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	978,835,000	811,965,000	680,815,665	680,815,665	0	680,815,665	83.85	131,149,335
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	108,000,000	166,600,000	110,500,000	110,500,000	0	110,500,000	66.33	56,100,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	239,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	547,200,000	166,600,000	110,500,000	110,500,000	0	110,500,000	66.33	56,100,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	335,763,000	497,503,000	443,536,912	443,536,912	0	443,536,912	89.15	53,966,088
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	84,000,000	61,500,000	58,650,000	58,650,000	0	58,650,000	95.37	2,850,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	718,192,000	401,360,000	389,045,000	389,045,000	(2,872,500)	386,172,500	96.22	15,187,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	257,100,000	484,800,000	465,959,100	465,959,100	0	465,959,100	96.11	18,840,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,395,055,000	1,445,163,000	1,357,191,012	1,357,191,012	(2,872,500)	1,354,318,512	93.91	90,844,488
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,921,090,000	2,423,728,000	2,148,506,677	2,148,506,677	(2,872,500)	2,145,634,177	88.64	278,093,823
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5809.003	2,921,090,000	2,423,728,000	2,148,506,677	2,148,506,677	(2,872,500)	2,145,634,177	88.64	278,093,823
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5809	3,246,890,000	2,946,890,000	2,582,574,979	2,582,574,979	(2,872,500)	2,579,702,479	87.64	367,187,521
5810	Penatakelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN								
002	Pelaksanaan Tata Kelola BUMN sesuai ketentuan								
52	BELANJA BARANG								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 40
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	161,000,000	146,788,500	146,788,500	0	146,788,500	91.17	14,211,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	161,000,000	146,788,500	146,788,500	0	146,788,500	91.17	14,211,500
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	111,141,000	162,782,000	145,183,060	145,183,060	0	145,183,060	89.19	17,598,940
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	46,140,000	79,800,000	39,875,000	39,875,000	0	39,875,000	49.97	39,925,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	276,313,000	366,039,000	294,303,600	294,303,600	(2,300,000)	292,003,600	79.77	74,035,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	433,594,000	608,621,000	479,361,660	479,361,660	(2,300,000)	477,061,660	78.76	131,559,340
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	351,900,000	263,437,000	189,100,000	189,100,000	0	189,100,000	71.78	74,337,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	455,000,000	86,250,000	72,384,625	72,384,625	0	72,384,625	83.92	13,865,375
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	806,900,000	349,687,000	261,484,625	261,484,625	0	261,484,625	74.78	88,202,375
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	468,230,000	156,190,000	153,517,957	153,517,957	0	153,517,957	98.29	2,672,043
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,750,000	6,750,000	6,180,000	6,180,000	(443,040)	5,736,960	84.99	1,013,040
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	807,110,000	527,620,000	495,060,500	495,060,500	(889,000)	494,171,500	93.66	33,448,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,367,590,000	1,040,656,000	1,033,755,300	1,033,755,300	(2,561,800)	1,031,193,500	99.09	9,462,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,649,680,000	1,731,216,000	1,688,513,757	1,688,513,757	(3,893,840)	1,684,619,917	97.53	46,596,083
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,890,174,000	2,850,524,000	2,576,148,542	2,576,148,542	(6,193,840)	2,569,954,702	90.37	280,569,298
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5810.002	3,890,174,000	2,850,524,000	2,576,148,542	2,576,148,542	(6,193,840)	2,569,954,702	90.37	280,569,298
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5810	3,890,174,000	2,850,524,000	2,576,148,542	2,576,148,542	(6,193,840)	2,569,954,702	90.37	280,569,298
5811	Penatakelolaan Data dan Teknologi Informasi								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 41
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
006	Pencapaian pengelolaan korporasi yang modern								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,850,600,000	5,650,520,000	5,587,056,505	5,587,056,505	0	5,587,056,505	98.88	63,463,495
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,850,600,000	5,650,520,000	5,587,056,505	5,587,056,505	0	5,587,056,505	98.88	63,463,495
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	92,911,000	319,647,000	307,410,950	307,410,950	0	307,410,950	96.17	12,236,050
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	624,430,000	758,920,000	730,330,000	730,330,000	(225,000)	730,105,000	96.20	28,815,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,129,735,000	649,001,000	611,962,133	611,962,133	0	611,962,133	94.29	37,038,867
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,847,076,000	1,727,568,000	1,649,703,083	1,649,703,083	(225,000)	1,649,478,083	95.49	78,089,917
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,585,100,000	504,900,000	504,900,000	504,900,000	0	504,900,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	717,800,000	638,700,000	550,250,000	550,250,000	0	550,250,000	86.15	88,450,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,834,436,000	3,237,590,000	3,085,159,750	3,085,159,750	0	3,085,159,750	95.29	152,430,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,137,336,000	4,381,190,000	4,140,309,750	4,140,309,750	0	4,140,309,750	94.50	240,880,250
5231	Belanja Pemeliharaan								
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,031,190,000	829,415,000	759,011,905	759,011,905	0	759,011,905	91.51	70,403,095
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	1,717,782,000	1,694,821,600	1,694,821,600	0	1,694,821,600	98.66	22,960,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,031,190,000	2,547,197,000	2,453,833,505	2,453,833,505	0	2,453,833,505	96.33	93,363,495
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	229,629,000	202,965,000	181,089,144	181,089,144	0	181,089,144	89.22	21,875,856

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 42
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	112,680,000	80,820,000	40,150,000	40,150,000	(332,500)	39,817,500	49.27	41,002,500
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,803,846,000	707,896,000	643,668,000	643,668,000	(95,000)	643,573,000	90.91	64,323,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,318,658,000	2,309,701,000	2,236,056,693	2,236,056,693	(931,000)	2,235,125,693	96.77	74,575,307
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,464,813,000	3,301,382,000	3,100,963,837	3,100,963,837	(1,358,500)	3,099,605,337	93.93	201,776,663
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	20,331,015,000	17,607,857,000	16,931,866,680	16,931,866,680	(1,583,500)	16,930,283,180	96.16	677,573,820
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,272,215,000	6,136,848,000	6,122,842,850	6,122,842,850	0	6,122,842,850	99.77	14,005,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	6,272,215,000	6,136,848,000	6,122,842,850	6,122,842,850	0	6,122,842,850	99.77	14,005,150
5361	Belanja Modal Lainnya								
536111	Belanja Modal Lainnya	0	858,526,000	858,510,000	858,510,000	0	858,510,000	100.00	16,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	858,526,000	858,510,000	858,510,000	0	858,510,000	100.00	16,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	6,272,215,000	6,995,374,000	6,981,352,850	6,981,352,850	0	6,981,352,850	99.80	14,021,150
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5811.006	26,603,230,000	24,603,231,000	23,913,219,530	23,913,219,530	(1,583,500)	23,911,636,030	97.20	691,594,970
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5811	26,603,230,000	24,603,231,000	23,913,219,530	23,913,219,530	(1,583,500)	23,911,636,030	97.20	691,594,970
5812	Pelayanan Hukum BUMN								
001	Pencapaian manajemen resiko yang efektif								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	12,000,000	11,697,000	11,697,000	0	11,697,000	97.48	303,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	12,000,000	11,697,000	11,697,000	0	11,697,000	97.48	303,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 43
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521211	Belanja Bahan	0	141,080,000	139,200,000	139,200,000	0	139,200,000	98.67	1,880,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	602,500,000	85,400,000	85,400,000	85,400,000	0	85,400,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	64,257,000	225,735,000	223,423,536	223,423,536	0	223,423,536	98.98	2,311,464
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	666,757,000	452,215,000	448,023,536	448,023,536	0	448,023,536	99.07	4,191,464
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	233,400,000	127,400,000	126,300,000	126,300,000	0	126,300,000	99.14	1,100,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	195,000,000	27,000,000	26,850,000	26,850,000	0	26,850,000	99.44	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	428,400,000	154,400,000	153,150,000	153,150,000	0	153,150,000	99.19	1,250,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	92,128,000	83,842,000	83,749,600	83,749,600	0	83,749,600	99.89	92,400
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	1,500,000	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000	74.67	380,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	184,928,000	351,594,000	281,594,000	281,594,000	0	281,594,000	80.09	70,000,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	690,527,000	1,010,789,000	1,010,165,493	1,010,165,493	(5,234,000)	1,004,931,493	99.42	5,857,507
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	971,183,000	1,447,725,000	1,376,629,093	1,376,629,093	(5,234,000)	1,371,395,093	95.09	76,329,907
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,066,340,000	2,066,340,000	1,989,499,629	1,989,499,629	(5,234,000)	1,984,265,629	96.28	82,074,371
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5812.001	2,066,340,000	2,066,340,000	1,989,499,629	1,989,499,629	(5,234,000)	1,984,265,629	96.28	82,074,371
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5812	2,066,340,000	2,066,340,000	1,989,499,629	1,989,499,629	(5,234,000)	1,984,265,629	96.28	82,074,371
5813	Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan								
002	Pencapaian pengembangan BUMN yang mendukung kemandirian masyarakat dan keseimbangan lingkungan								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Wednesday, May 6,
 Halaman : 44
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521211	Belanja Bahan	100,000,000	212,800,000	188,430,000	188,430,000	0	188,430,000	88.55	24,370,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,100,000	0	0	0	0	0	0.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	274,580,000	249,395,000	240,201,306	240,201,306	0	240,201,306	96.31	9,193,694
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	386,680,000	462,195,000	428,631,306	428,631,306	0	428,631,306	92.74	33,563,694
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	287,100,000	54,600,000	38,100,000	38,100,000	0	38,100,000	69.78	16,500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	832,052,000	788,741,000	676,653,000	676,653,000	0	676,653,000	85.79	112,088,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,119,152,000	843,341,000	714,753,000	714,753,000	0	714,753,000	84.75	128,588,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	756,265,000	1,129,064,000	1,087,253,607	1,087,253,607	(3,094,200)	1,084,159,407	96.02	44,904,593
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,000,000	24,050,000	24,050,000	24,050,000	0	24,050,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	246,430,000	156,960,000	156,930,000	156,930,000	0	156,930,000	99.98	30,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,018,838,000	428,555,000	428,373,500	428,373,500	0	428,373,500	99.96	181,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,039,533,000	1,738,629,000	1,696,607,107	1,696,607,107	(3,094,200)	1,693,512,907	97.58	45,116,093
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,545,365,000	3,044,165,000	2,839,991,413	2,839,991,413	(3,094,200)	2,836,897,213	93.29	207,267,787
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5813.002	3,545,365,000	3,044,165,000	2,839,991,413	2,839,991,413	(3,094,200)	2,836,897,213	93.29	207,267,787
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5813	3,545,365,000	3,044,165,000	2,839,991,413	2,839,991,413	(3,094,200)	2,836,897,213	93.29	207,267,787
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04.90.06	41,817,839,000	37,754,070,000	36,000,364,777	36,000,364,777	(18,978,040)	35,981,386,737	95.35	1,772,683,263
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04.90	208,269,902,000	208,269,902,000	202,604,306,219	202,604,306,219	(80,928,558)	202,523,377,661	97.28	5,746,524,339
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 04	208,269,902,000	208,269,902,000	202,604,306,219	202,604,306,219	(80,928,558)	202,523,377,661	97.28	5,746,524,339
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	208,269,902,000	208,269,902,000	202,604,306,219	202,604,306,219	(80,928,558)	202,523,377,661	97.28	5,746,524,339

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, May 6,
Halaman : 45
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	208,269,902,000	208,269,902,000	202,604,306,219	202,604,306,219	(80,928,558)	202,523,377,661	97.28	5,746,524,339
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KP	208,269,902,000	208,269,902,000	202,604,306,219	202,604,306,219	(80,928,558)	202,523,377,661	97.28	5,746,524,339
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	208,269,902,000	208,269,902,000	202,604,306,219	202,604,306,219	(80,928,558)	202,523,377,661	97.28	5,746,524,339
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	208,269,902,000	208,269,902,000	202,604,306,219	202,604,306,219	(80,928,558)	202,523,377,661	97.28	5,746,524,339

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 06-05-20
 Halaman : 1
 Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSAKSI KAS							
01	RUPIAH MURNI							
0	RM							
04	EKONOMI							
90	EKONOMI LAINNYA							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN							
2617	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi							
952	Layanan Perencanaan							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5212	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional							
521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	0	0	6,975,000	6,975,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	0	0	6,975,000	6,975,000	0.00	0
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	60,000	60,000	0.00	0
524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	150,000	150,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	210,000	210,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	7,185,000	7,185,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2617.952	0	0	0	7,185,000	7,185,000	0.00	0
954	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 06-05-20
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	5,910,000	5,910,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	5,910,000	5,910,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	5,910,000	5,910,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2617.954	0	0	0	5,910,000	5,910,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2617	0	0	0	13,095,000	13,095,000	0.00	0
2617	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi							
994	Layanan Perkantoran							
51	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI							
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	0	0	13,744,100	13,744,100	0.00	0
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	18,176	798	18,974	0.00	0
511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	1,329,120	1,329,120	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111	0	0	18,176	15,074,018	15,092,194	0.00	0
5124	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	0	0	2,955,824	2,955,824	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124	0	0	0	2,955,824	2,955,824	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51	0	0	18,176	18,029,842	18,048,018	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2617.994	0	0	18,176	18,029,842	18,048,018	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2617	0	0	18,176	18,029,842	18,048,018	0.00	0
2619	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Keuangan, Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol							
956	Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)							

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 06-05-20
 Halaman : 3
 Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	5,748,000	5,748,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	5,748,000	5,748,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	5,748,000	5,748,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2619.956	0	0	0	5,748,000	5,748,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2619	0	0	0	5,748,000	5,748,000	0.00	0
2620	Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN							
965	Layanan Audit Internal							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5212	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional							
521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	0	0	1,275,000	1,275,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	0	0	1,275,000	1,275,000	0.00	0
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	273,500	0	273,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	273,500	0	273,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	273,500	1,275,000	1,548,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2620.965	0	0	273,500	1,275,000	1,548,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2620	0	0	273,500	1,275,000	1,548,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 04.90.01	0	0	291,676	38,147,842	38,439,518	0.00	0
06	Program Pembinaan BUMN							
2623	Pembinaan Bumn Sektor Industri Agro dan Farmasi II							

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 06-05-20
 Halaman : 4
 Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi II							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	3,085,000	3,085,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	3,085,000	3,085,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	3,085,000	3,085,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2623.001	0	0	0	3,085,000	3,085,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2623	0	0	0	3,085,000	3,085,000	0.00	0
2627	Pembinaan BumN Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media I							
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Pertambangan, Industri Strategi dan Media I yang profesional							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	50,000	50,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	50,000	50,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	50,000	50,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2627.002	0	0	0	50,000	50,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2627	0	0	0	50,000	50,000	0.00	0
2632	Pembinaan BumN Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan I							
001	Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 06-05-20
 Halaman : 5
 Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	376,000	376,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	376,000	376,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	376,000	376,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2632.001	0	0	0	376,000	376,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2632	0	0	0	376,000	376,000	0.00	0
2633	Pembinaan Bumh Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II							
002	Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II yang profesional							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2633.002	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2633	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 04.90.06	0	0	0	23,511,000	23,511,000	0.00	0
06	Program Pembinaan BUMN							
5809	Pengembangan Usaha dan Privatisasi							
003	Pencapaian perencanaan kebijakan yang berkualitas dan implementatif							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 06-05-20
 Halaman : 6
 Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	2,872,500	2,872,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	2,872,500	2,872,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	2,872,500	2,872,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 5809.003	0	0	0	2,872,500	2,872,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 5809	0	0	0	2,872,500	2,872,500	0.00	0
5810	Penatakelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN							
002	Pelaksanaan Tata Kelola BUMN sesuai ketentuan							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5212	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional							
521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0.00	0
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	443,040	443,040	0.00	0
524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	889,000	889,000	0.00	0
524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	2,561,800	2,561,800	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	3,893,840	3,893,840	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	2,300,000	3,893,840	6,193,840	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 5810.002	0	0	2,300,000	3,893,840	6,193,840	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 5810	0	0	2,300,000	3,893,840	6,193,840	0.00	0
5811	Penatakelolaan Data dan Teknologi Informasi							
006	Pencapaian pengelolaan korporasi yang modern							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 06-05-20
 Halaman : 7
 Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5212	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional							
521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	0	225,000	0	225,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	0	225,000	0	225,000	0.00	0
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	332,500	0	332,500	0.00	0
524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	95,000	95,000	0.00	0
524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	931,000	931,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	332,500	1,026,000	1,358,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	557,500	1,026,000	1,583,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 5811.006	0	0	557,500	1,026,000	1,583,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 5811	0	0	557,500	1,026,000	1,583,500	0.00	0
5812	Pelayanan Hukum BUMN							
001	Pencapaian manajemen resiko yang efektif							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	5,234,000	0	5,234,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	5,234,000	0	5,234,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	5,234,000	0	5,234,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 5812.001	0	0	5,234,000	0	5,234,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 5812	0	0	5,234,000	0	5,234,000	0.00	0
5813	Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan							
002	Pencapaian pengembangan BUMN yang mendukung kemandirian masyarakat dan							

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 06-05-20
 Halaman : 8
 Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	keseimbangan lingkungan							
5241	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
52411	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	3,094,200	0	3,094,200	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	3,094,200	0	3,094,200	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	3,094,200	0	3,094,200	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 5813.002	0	0	3,094,200	0	3,094,200	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 5813	0	0	3,094,200	0	3,094,200	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 04.90.06	0	0	11,185,700	7,792,340	18,978,040	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04.90	0	0	11,477,376	69,451,182	80,928,558	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04	0	0	11,477,376	69,451,182	80,928,558	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0	0	0	11,477,376	69,451,182	80,928,558	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01	0	0	11,477,376	69,451,182	80,928,558	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KP	0	0	11,477,376	69,451,182	80,928,558	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS	0	0	11,477,376	69,451,182	80,928,558	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	0	0	11,477,376	69,451,182	80,928,558	0.00	0

NERACA PERCOBAAN

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 06-05-20
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	601,380,961	
0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	379,285,240	
0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak		12,933,631
0	115212	Piutang Lainnya	379,490,055	
0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	3,500,004	
0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB		105,989,319
0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		2,226,495
0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		17,500
0	117111	Barang Konsumsi	1,716,681,205	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7,366,150	
0	117131	Bahan Baku	735,350	
0	117199	Persediaan Lainnya	6,492,420	
0	131111	Tanah	1,448,189,807,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	125,125,261,746	
0	133111	Gedung dan Bangunan	396,488,627,387	
0	134113	Jaringan	3,201,056,420	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,066,410,162	
0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,647,770,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		100,730,167,953
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		18,434,322,660
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		1,076,136,491
0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	28,964,410	
0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi		144,822
0	162151	Software	15,962,893,725	
0	162161	Lisensi	7,283,298,925	
0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	151,433,500	
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		15,491,280,760
0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi		2,709,045,699
0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		68,021,600
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		65,881,340
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		37,000,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 06-05-20
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka		3,278,144,675
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		202,523,377,661
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	9,523,210,937	
0	391111	Ekuitas		1,716,875,542,868
0	391114	Revaluasi Aset Tetap		149,738,942,000
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166,381,552	
0	391119	Koreksi Lainnya		27,559,254
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		4,557,123,828
3	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		50,494,911
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		68
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		95,980,885
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		127,087,102
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	15,577,623,094	
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS		13,744,100
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	262,935	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		18,974
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,037,086,714	
3	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS		1,329,120
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	317,962,109	
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2,321,304,400	
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	66,900,000	
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	108,308,761	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	764,320,680	
3	511129	Beban Uang Makan PNS	1,807,408,000	
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	550,710,000	
3	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	144,835,055	
3	511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	290,267,200	
3	511337	Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	140,000,000	
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	34,611,545,741	
3	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		2,955,824
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	5,707,677,374	
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	79,582,500	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,410,969,927	

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 06-05-20
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	809,092,258	
3	521211	Beban Bahan	4,185,278,049	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,743,970,000	
3	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan		8,475,000
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	14,185,081,939	
3	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya		2,300,000
3	522111	Beban Langganan Listrik	4,942,160,641	
3	522112	Beban Langganan Telepon	127,957,488	
3	522113	Beban Langganan Air	316,563,823	
3	522131	Beban Jasa Konsultan	865,215,000	
3	522141	Beban Sewa	6,485,867,100	
3	522151	Beban Jasa Profesi	3,277,190,491	
3	522191	Beban Jasa Lainnya	28,583,027,224	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	461,997,282	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,870,376,536	
3	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,434,500	
3	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,444,649,340	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	14,338,132,056	
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		26,605,200
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	529,025,500	
3	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		775,540
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,572,027,995	
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		4,190,000
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17,625,203,911	
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		20,534,800
3	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	300,841,000	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,565,089,483	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7,409,582,402	
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	88,216,628	
3	592115	Beban Amortisasi Software	701,717,550	
3	592116	Beban Amortisasi Lisensi	737,256,054	
3	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	7,571,675	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 06-05-20
Halaman : 4

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ESELON I : 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	16,746,900	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,998,520,287	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	142,703,770	
3	593114	Beban Persediaan suku cadang	3,206,500	
3	593131	Beban Persediaan bahan baku	600,600	
3	593149	Beban Persediaan Lainnya	5,742,686	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	57,542,222	
3	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP		336,711,601
3	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi		25,000
3	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	6,050,000	
3	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	10,462,600	
3	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	116,173,552	
		J U M L A H	2,216,425,086,681	2,216,425,086,681

LAPORAN PERSEDIAAN

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tanggal : 05/05/20 9:47 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_persediaan_kl

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	17,497,927
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	918,342
1010301003	Penjepit Kertas	31,367,349
1010301004	Penghapus/Korektor	3,259,928
1010301005	Buku Tulis	15,774,625
1010301006	Ordner Dan Map	178,678,477
1010301007	Penggaris	70,711
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	1,502,088
1010301009	Pita Mesin Ketik	561,715
1010301010	Alat Perekat	4,007,853
1010301014	Barang Cetak	5,727,630
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	78,314,671
1010302001	Kertas HVS	175,602,555
1010302002	Berbagai Kertas	10,899,864
1010302003	Kertas Cover	625,440
1010302004	Amplop	31,374,476
1010302005	Kop Surat	11,564,500
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	22,383,624
1010304004	Tinta/Toner Printer	1,014,990,600
1010304006	USB/Flash Disk	3,775,290
1010304010	Mouse	3,520,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	2,970,000
1010306001	Kabel Listrik	19,800,000
1010306002	Lampu Listrik	2,970,000
1010306004	Saklar	2,105,400
1010306010	Batu Baterai	12,762,640
1010306999	Alat Listrik Lainnya	1,320,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,190,000
1010701002	Minuman	3,817,000
1010701999	Natura Lainnya	57,328,500
Jumlah Barang Konsumsi		1,716,681,205
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	539,880
1010305007	Peralatan Ledeng	109,450
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	6,716,820
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		7,366,150
117131	Bahan Baku	
1010101012	Besi Beton	116,600
1010105006	Karet (Bahan Baku)	618,750
Jumlah Bahan Baku		735,350
117199	Persediaan Lainnya	
1020201002	Pipa Air Besi Tuang	810,920
1020203999	Pipa Baja Lainnya	5,225,000
1020206001	Pipa Plastik PVC	456,500

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tanggal : 05/05/20 9:47 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_persediaan_kl

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Persediaan Lainnya	6,492,420
	TOTAL	1,731,275,125

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |

A

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 05/05/20 9:46 AM

Halaman : 1

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kd

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	17,776	1,307,839,814,000	0	140,349,993,000	0	0	17,776	1,448,189,807,000
20101	TANAH PERSIL	17,776	1,307,839,814,000	0	140,349,993,000	0	0	17,776	1,448,189,807,000
132111	Peralatan dan Mesin	8,362	122,026,524,215	346	6,597,881,372	200	3,499,143,841	8,508	125,125,261,746
30103	ALAT BANTU	19	24,153,623,017	0	0	0	0	19	24,153,623,017
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	25	6,282,584,600	0	0	0	0	25	6,282,584,600
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	14	33,214,500	0	0	0	0	14	33,214,500
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	94	2,930,256,437	0	0	0	0	94	2,930,256,437
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	19	31,135,650	0	0	0	0	19	31,135,650
30303	ALAT UKUR	2	2,234,100	0	0	0	0	2	2,234,100
30401	ALAT PENGOLAHAN	19	36,710,960	0	0	0	0	19	36,710,960
30501	ALAT KANTOR	2,108	12,795,057,116	29	1,668,353,750	9	117,418,590	2,128	14,345,992,276
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,687	30,197,395,205	246	678,287,472	76	66,544,185	4,857	30,809,138,492
30601	ALAT STUDIO	54	3,266,098,502	7	46,585,000	8	121,353,210	53	3,191,330,292
30602	ALAT KOMUNIKASI	198	474,537,800	0	0	8	25,305,500	190	449,232,300
30603	PERALATAN PEMANCAR	1	114,524,679	0	0	0	0	1	114,524,679
30701	ALAT KEDOKTERAN	31	40,301,250	0	0	0	0	31	40,301,250
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	6	5,963,762,972	0	0	0	0	6	5,963,762,972
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	50	303,863,450	0	0	0	0	50	303,863,450
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2	48,400,000	0	0	0	0	2	48,400,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	19	704,992,800	0	0	0	0	19	704,992,800
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	2	26,313,980	0	0	0	0	2	26,313,980
30902	Persenjataan non senjata API	2	11,530,200	0	0	0	0	2	11,530,200
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	29,920,000	0	0	0	0	1	29,920,000
31001	KOMPUTER UNIT	576	11,953,938,798	34	463,468,550	0	0	610	12,417,407,348
31002	PERALATAN KOMPUTER	421	22,523,976,349	30	3,741,186,600	99	3,168,522,356	352	23,096,640,593
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	10	99,132,000	0	0	0	0	10	99,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	3,019,850	0	0	0	0	2	3,019,850
133111	Gedung dan Bangunan	3	335,875,758,538	0	60,884,384,849	0	271,516,000	3	396,488,627,387
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	335,875,758,538	0	60,884,384,849	0	271,516,000	3	396,488,627,387
134113	Jaringan	3	3,201,056,420	0	0	0	0	3	3,201,056,420
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	2,572,515,000	0	0	0	0	1	2,572,515,000
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	451,399,180	0	0	0	0	1	451,399,180
50403	JARINGAN TELEPON	1	177,142,240	0	0	0	0	1	177,142,240
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 05/05/20 9:46 AM

Halaman : 2

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	2,957	1,046,413,262	90	19,996,900	0	0	3,047	1,066,410,162
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2,936	556,913,262	90	19,996,900	0	0	3,026	576,910,162
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	21	489,500,000	0	0	0	0	21	489,500,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	30	883,831,124	200	3,499,143,841	230	4,382,974,965	0	0
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	2,508,000	0	0	1	2,508,000	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	1	6,765,000	9	117,418,590	10	124,183,590	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	320,019,810	76	66,544,185	77	386,563,995	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	8	121,353,210	8	121,353,210	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	1	170,500,000	8	25,305,500	9	195,805,500	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	1	188,788,314	0	0	1	188,788,314	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	25	195,250,000	0	0	25	195,250,000	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	99	3,168,522,356	99	3,168,522,356	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1,770,873,397,559		211,351,399,962		8,153,634,806		1,974,071,162,715

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 05/05/20 9:47 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kl

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	720	149,963,075	8	6,050,000	100	16,149,625	628	139,863,450
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	367,950	0	0	0	0	4	367,950
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	6	1,122,000	0	0	0	0	6	1,122,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	580	124,659,800	8	6,050,000	0	0	588	130,709,800
30601	ALAT STUDIO	2	326,700	0	0	0	0	2	326,700
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	8	1,529,000	0	0	0	0	8	1,529,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	858,000	0	0	0	0	10	858,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	110	21,099,625	0	0	100	16,149,625	10	4,950,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	100	16,149,625	100	16,149,625	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	100	16,149,625	100	16,149,625	0	0
TOTAL			149,963,075		22,199,625		32,299,250		139,863,450

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
ASET TAK BERWUJUD

LAPORAN BARANG PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 05/05/20 9:39 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_kl

UAPB : 041

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	218	15,621,822,665	32	341,071,060	0	0	250	15,962,893,725
80101	ASET TAK BERWUJUD	218	15,621,822,665	32	341,071,060	0	0	250	15,962,893,725
162161	Lisensi	2,015	7,411,624,925	0	0	380	128,326,000	1,635	7,283,298,925
80101	ASET TAK BERWUJUD	2,015	7,411,624,925	0	0	380	128,326,000	1,635	7,283,298,925
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5	23,107,500	380	128,326,000	0	0	385	151,433,500
80101	ASET TAK BERWUJUD	5	23,107,500	380	128,326,000	0	0	385	151,433,500
TOTAL			23,056,555,090		128,326,000		469,397,060		23,397,626,150

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 04/05/20 10:39 PM

Halaman : 1

UAPB : 041

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kode Lap : lap_kdp_kl

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		JUMLAH S/D 1 JANUARI 2019	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	47,802,332,780	3,337,347,440	49,491,910,220	1,647,770,000	
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	0	89,950,000	0	89,950,000	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	47,802,332,780	3,247,397,440	49,491,910,220	1,557,820,000	
TOTAL		47,802,332,780	3,337,347,440	49,491,910,220	1,647,770,000	

A

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tanggal : 05/05/20 9:38 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	1,716,681,205
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7,366,150
117131	Bahan Baku	735,350
117199	Persediaan Lainnya	6,492,420
131111	Tanah	1,448,189,807,000
132111	Peralatan dan Mesin	125,125,261,746
133111	Gedung dan Bangunan	396,488,627,387
134113	Jaringan	3,201,056,420
135121	Aset Tetap Lainnya	1,066,410,162
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,647,770,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(100,730,167,953)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(18,434,322,660)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,076,136,491)
162151	Software	15,962,893,725
162161	Lisensi	7,283,298,925
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	151,433,500
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(15,491,280,760)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(2,709,045,699)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	(68,021,600)
J U M L A H		1,862,338,858,827

A

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2019 (SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tanggal : 05/05/20 9:39 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	1,598,611,585
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	18,545,230
117114	Suku Cadang	3,206,500
117131	Bahan Baku	1,335,950
117199	Persediaan Lainnya	12,235,106
131111	Tanah	1,307,839,814,000
132111	Peralatan dan Mesin	122,026,524,215
133111	Gedung dan Bangunan	335,875,758,538
134113	Jaringan	3,201,056,420
135121	Aset Tetap Lainnya	1,046,413,262
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	47,802,332,780
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(92,638,266,811)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(10,858,358,706)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(987,919,863)
162151	Software	15,621,822,665
162161	Lisensi	7,411,624,925
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	883,831,124
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	23,107,500
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	(882,577,124)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(14,789,563,210)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(2,010,287,445)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	(21,952,125)
J U M L A H		1,721,177,294,516

A

LAPORAN PENYUSUTAN INTRAKOMPTABEL

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 05/05/20 9:46 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	8,508	125,125,261,746	92,638,266,811	11,552,946,473	(3,461,045,331)	100,730,167,953	24,395,093,793
30103	ALAT BANTU	19	24,153,623,017	16,045,696,395	3,175,736,732	0	19,221,433,127	4,932,189,890
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	25	6,282,584,600	5,588,877,449	462,471,434	0	6,051,348,883	231,235,717
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	14	33,214,500	33,214,500	0	0	33,214,500	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	94	2,930,256,437	501,875,502	292,063,144	0	793,938,646	2,136,317,791
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	19	31,135,650	26,662,230	1,278,120	0	27,940,350	3,195,300
30303	ALAT UKUR	2	2,234,100	2,234,100	0	0	2,234,100	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	19	36,710,960	36,710,960	0	0	36,710,960	0
30501	ALAT KANTOR	2,128	14,345,992,276	10,226,900,707	1,019,989,394	(117,418,590)	11,129,471,511	3,216,520,765
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,857	30,809,138,492	26,750,459,405	986,519,331	(53,433,175)	27,683,545,561	3,125,592,931
30601	ALAT STUDIO	53	3,191,330,292	1,883,445,463	531,758,910	(121,353,210)	2,293,851,163	897,479,129
30602	ALAT KOMUNIKASI	190	449,232,300	419,295,800	12,408,000	(25,305,500)	406,398,300	42,834,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	1	114,524,679	5,726,234	11,452,468	0	17,178,702	97,345,977
30701	ALAT KEDOKTERAN	31	40,301,250	40,301,250	0	0	40,301,250	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	6	5,963,762,972	5,323,070,354	87,638,206	0	5,410,708,560	553,054,412
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	50	303,863,450	172,189,181	20,257,580	0	192,446,761	111,416,689
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2	48,400,000	48,400,000	0	0	48,400,000	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	19	704,992,800	399,495,880	46,999,528	0	446,495,408	258,497,392
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	2	26,313,980	4,349,807	2,631,398	0	6,981,205	19,332,775
30902	Persenjataan Non Senjata Api	2	11,530,200	11,530,200	0	0	11,530,200	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	29,920,000	3,740,000	7,480,000	0	11,220,000	18,700,000
31001	KOMPUTER UNIT	610	12,417,407,348	8,015,498,195	2,030,591,237	0	10,046,089,432	2,371,317,916
31002	PERALATAN KOMPUTER	352	23,096,640,593	17,070,790,349	2,853,757,791	(3,143,534,856)	16,781,013,284	6,315,627,309
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	10	99,132,000	24,783,000	9,913,200	0	34,696,200	64,435,800
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	3,019,850	3,019,850	0	0	3,019,850	0
133111	Gedung dan Bangunan	3	396,488,627,387	10,858,358,706	7,409,582,402	166,381,552	18,434,322,660	378,054,304,727
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	396,488,627,387	10,858,358,706	7,409,582,402	166,381,552	18,434,322,660	378,054,304,727
134113	Jaringan	3	3,201,056,420	987,919,863	88,216,628	0	1,076,136,491	2,124,919,929
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	2,572,515,000	739,598,062	64,312,876	0	803,910,938	1,768,604,062
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	451,399,180	173,036,349	15,046,640	0	188,082,989	263,316,191
50403	JARINGAN TELEPON	1	177,142,240	75,285,452	8,857,112	0	84,142,564	92,999,676
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	882,577,124	0	(882,577,124)	0	0
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 05/05/20 9:46 AM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	1,254,000	0	(1,254,000)	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	6,765,000	0	(6,765,000)	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	320,019,810	0	(320,019,810)	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	170,500,000	0	(170,500,000)	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	188,788,314	0	(188,788,314)	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	195,250,000	0	(195,250,000)	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		8,514	524,814,945,553	105,367,122,504	19,050,745,503	(4,177,240,903)	120,240,627,104	404,574,318,449

LAPORAN PENYUSUTAN

EKSTRAKOMPTABEL

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 05/05/20 9:47 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kl

UAKPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	Kuantitas	Nilai Perolehan	AKUMULASI PENYUSUTAN				Nilai Buku
				SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	628	139,863,450	134,581,980	2,940,800	(11,622,830)	125,899,950	13,963,500
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	367,950	367,950	0	0	367,950	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	6	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	588	130,709,800	114,534,800	2,855,000	0	117,389,800	13,320,000
30601	ALAT STUDIO	2	326,700	326,700	0	0	326,700	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	8	1,529,000	1,529,000	0	0	1,529,000	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	858,000	128,700	85,800	0	214,500	643,500
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	10	4,950,000	16,572,830	0	(11,622,830)	4,950,000	0
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	57,790,653,385	0	(57,790,653,385)	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	57,790,653,385	0	(57,790,653,385)	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		628	139,863,450	57,925,235,365	2,940,800	(57,802,276,215)	125,899,950	13,963,500

A

AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 04/05/20 10:39 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_kl

UAPB : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
162151	Software	250	15,962,893,725	14,789,563,210	744,351,431	(42,633,881)	15,491,280,760	471,612,965
80101	ASET TAK BERWUJUD	250	15,962,893,725	14,789,563,210	744,351,431	(42,633,881)	15,491,280,760	471,612,965
162161	Lisensi	1,635	7,283,298,925	2,010,287,445	737,256,054	(38,497,800)	2,709,045,699	4,574,253,226
80101	ASET TAK BERWUJUD	1,635	7,283,298,925	2,010,287,445	737,256,054	(38,497,800)	2,709,045,699	4,574,253,226
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	385	151,433,500	21,952,125	7,571,675	38,497,800	68,021,600	83,411,900
80101	ASET TAK BERWUJUD	385	151,433,500	21,952,125	7,571,675	38,497,800	68,021,600	83,411,900
JUMLAH		2,270	23,397,626,150	16,821,802,780	1,489,179,160	(42,633,881)	18,268,348,059	5,129,278,091

A

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 13 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935747, Website: www.bumn.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR: BAR-02/KPB.MBU/04/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Vedi Noviana Suherman
NIP : 19671121 199003 1 001
Jabatan : Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Kementerian BUMN, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- II. Nama : Sukamdani Eko Basuki
NIP : 19840410 200602 1 001
Jabatan : Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Kementerian BUMN, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara BMN pada lingkup Kementerian BUMN dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan BMN yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk Tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN

No	Akun Neraca	Nilai BMN Tahun 2019		
		Nilai SIMAK-BMN	Nilai SAIBA	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	1,872,342,616,067	1,872,342,616,067	0
A	ASET LANCAR	1,731,275,125	1,731,275,125	0
1	Persediaan	1,731,275,125	1,731,275,125	0
B	ASET TETAP	1,855,478,305,611	1,855,478,305,611	0
1	Tanah	1,448,189,807,000	1,448,189,807,000	0
2	Peralatan dan Mesin	125,125,261,746	125,125,261,746	0
3	Gedung dan Bangunan	396,488,627,387	396,488,627,387	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,201,056,420	3,201,056,420	0
5	Aset Tetap Lainnya	1,066,410,162	1,066,410,162	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,647,770,000	1,647,770,000	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(120,240,627,104)	(120,240,627,104)	0
C	ASET LAINNYA	6,236,006,310	6,236,006,310	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	23,246,192,650	23,246,192,650	0
3	Aset Lain-Lain	151,433,500	151,433,500	0
4	Akumulasi Penyusutan atas Aset Lain-Lain	(68.021.600)	(68.021.600)	0
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(18.200.326.459)	(18.200.326.459)	0
II	BMN NON NERACA	7,542,414,402	0	(7,542,414,402)
A	EKSTRAKOMPTABEL	13,963,500	0	(13,963,500)*
1	BMN Ekstrakomptabel	139,863,450	0	(139,863,450)*
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel	(125,899,950)	0	125,899,950*
B	BARANG RUSAK BERAT	7,528,450,902	0	(7,528,450,902)**

*) Barang Milik Negara Ekstrakomptabel disajikan dalam Laporan BMN dan tidak disajikan dalam Laporan Keuangan

**) Barang rusak berat berupa Aset Tetap yang telah diusulkan kepada Pengguna Barang atau Pengelola Barang dikeluarkan dari neraca Laporan Keuangan namun tetap disajikan dalam Laporan BMN



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 13 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935747, Website: www.bumn.go.id

-2-

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Tahun 2019, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Kepala Subbagian Perlengkapan dan
Rumah Tangga**

A **Vedi Noviana Suherman**
NIP 19671121 199003 1 001

Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi

Sukamdani Eko Basuki
NIP 19840410 200602 1 001

**LAPORAN TINDAK LANJUT/RENCANA
TINDAK TEMUAN BPK**

MATRIKS HASIL PEMANTAUAN TL BPK RI PADA KEMENTERIAN BUMN - STATUS BELUM SELESAI (BS)
PERIODE SEMESTER II - 2019

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
	LK TAHUN 2013						
9-SPI	Mitra Binaan Program Kemitraan BUMN Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Usaha Kecil Serta Berpotensi Macet dan Merugikan Minimal Sebesar Rp33.262.454.320,00	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar memerintahkan BUMN Pembina untuk melakukan verifikasi dan perjanjian ulang dengan Mitra Binaan sesuai peraturan mengenai program kemitraan dan menyampaikan laporannya ke BPK RI.	1	Laporan skeduliing dari Bank mandiri dan Telkom telah disampaikan, namun belum disertai dengan laporan verifikasi ulang	S	Asdep TJSL	Telah disampaikan ke Tim BPK: - Risalah Rapat di Saripan - Surat dari Telkom beserta Dokumen verifikasi dan reschedulling Selasa, 23 Juli 2019
10-SPI	Penyaluran Program Kemitraan Kepada Mitra Binaan di 72 BUMN Macet Minimal Sebesar Rp901.997.824.811,00	BPK RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar: a. Menyusun mekanisme penghapusan piutang pinjaman PK yang tak bisa ditagih	1	Masih diperlukan kajian untuk memastikan status dana program PKBL	BS	Asdep TJSL	Telah dibuat Draft Permen BUMN tentang Mekanisme Penghapusan
		JUMLAH LK 2013	2				
	LK TAHUN 2014						
	Sudah Selesai (Tuntas) seluruhnya						
	LK TAHUN 2015						
	SPI 2015						
3	Penyampaian LK Audited BUMN ke Kementerian BUMN Belum Tertib Aturan dan 17 (Tujuh Belas) BUMN Belum Menyerahkan Laporan Tepat Waktu	BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan ke deputian terkait untuk memerintahkan seluruh BUMN untuk menyampaikan LKPN tepat waktu kepada Menteri BUMN dan memberi sanksi kepada BUMN yang tidak patuh dengan sanksi yang memberi efek jera	1	dipantau surat dari Kedeputan Teknis untuk memberikan teguran kepada BUMN yang terlambat menyampaikan Laporan	BS	Asdep Data dan TI	

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II- 2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
6	Penyelesaian Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Program Bina Lingkungan Peduli Tahun 2012 Senilai Rp127.488.185.885,00 Berlarut-Larut	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan kepada Keasdepan Teknis (TJSL) untuk melakukan koordinasi lebih lanjut terkait rekomendasi BPK mengenai pembukaan rekening khusus atas nama KBUMN untuk penampungan sisa dana BL Peduli dan apabila tidak diperkenankan agar meminta satu rekening khusus dari Kementerian Keuangan untuk penampungan dana tersebut serta melakukan monitoring penyetoran yang dilakukan	1	per April 2018 : Dipantau s.d sisa dana BL Peduli telah disetor sesuai mekanisme yang diatur oleh Kementerian Keuangan sesuai Surat dari Kementerian Keuangan/DJPB No. S-7594/PB.3/2017	S	TJSL	Sesuai dengan Lapkeu KBUMN Tahun 2018 telah dinyatakan bahwa semua Program BL Peduli telah selesai seluruhnya, dan semua saldo BL Peduli telah NIHIL Telah disampaikan CALK Laporan Keuangan KBUMN TA 2018 Kamis, 25 Juli 2019
		JUMLAH LK 2015	2				
	LK 2016						
	SPI						
1	Pengendalian Sewa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor Kementerian BUMN Belum Memadai	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan kepada Sekretaris KBUMN memerintahkan Kepala Biro Umum untuk:					
		d. Merumuskan dan menyepakati metode, waktu dan jatuh tempo pembayaran sewa dengan para penyewa dan menuangkannya pada dokumen perjanjian sewa serta menagih piutang sewa sebesar Rp4.065.450.271,00;	1	menunggu bukti pembayaran dari prabunara dan telkomsel	S	Biro Umum dan Humas	Prabunara dan Telkomsel telah melunasi seluruhnya. Bukti setor telah disampaikan ke Tim BPK Selasa, 23 Juli 2019
3	Pengelolaan Aset Tetap Kementerian BUMN Belum Memadai	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar memerintahkan Sekretaris KBUMN untuk:					
		a. Menyusun SOP terkait pengamanan aset;	1	SOP Pengamanan Aset telah disampaikan ke BPK, namun SOP-nya belum diberi nomor dan tanggal pengesahan	S	Biro Umum dan Humas	SOP telah ditandatangani. Telah disampaikan ke Tim BPK Selasa, 23 Juli 2019

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
5	Belum Seluruh BUMN Menyampaikan Laporan PKBL dan Pengelolaan PK Belum Optimal sehingga Terdapat Angsuran dari Mitra Binaan yang Belum Teridentifikasi Minimal Sebesar Rp15.433.662.704,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar memerintahkan Deputi Infrastruktur Bisnis untuk melaksanakan koordinasi dengan ke deputian teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan angsuran yang tidak teridentifikasi penyetornya pada BUMN-BUMN terkait	1	Dipantau s/d surat Menteri BUMN kepada Deputi Infrastruktur Bisnis untuk melaksanakan koordinasi dengan ke deputian teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan angsuran yang tidak teridentifikasi penyetornya pada BUMN-BUMN terkait	BS	TJSL	Akan mengundang Kedeputian Teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan angsuran yang tidak teridentifikasi. Akan mengundang BUMN-BUMN terkait untuk penyelesaian angsuran tak teridentifikasi.
		JUMLAH LK 2016	3				
	LK 2017						
	SPI						
7	Belum Seluruh BUMN Menyampaikan Laporan PKBL dan Pengelolaan PK Belum Optimal Sehingga Terdapat Angsuran dari Mitra Binaan yang Belum Teridentifikasi Minimal sebesar Rp12.797.324.295,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Deputi Infrastruktur Bisnis, khususnya Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk: c. Melaksanakan koordinasi dengan ke deputian teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan angsuran yang tidak teridentifikasi penyetornya pada BUMN-BUMN terkait.	1	Masih menunggu penyelesaian terkait dengan angsuran yang belum teridentifikasi penyetornya pada BUMN.	BS	TJSL	Akan mengundang Kedeputian Teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan angsuran yang tidak teridentifikasi. Akan mengundang BUMN-BUMN terkait untuk penyelesaian angsuran tak teridentifikasi.
		JUMLAH LK 2017	1				
	LK 2018						
	SPI						

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II- 2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
1	Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin belum Dilengkapi dengan Komitmen Layanan Penyedia melalui Klausul <i>Service Level Agreement</i>	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar menambahkan klausul <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada setiap perjanjian pemeliharaan peralatan mesin serta sistem pengendalian realisasi <i>down time</i> pada setiap tagihan rekanan pekerjaan jasa pemeliharaan peralatan mesin.	1	<i>Agar dilengkapi kertas kerja notulen justifikasi teknis</i>	BS		Klausul SLA telah dimasukkan dalam Perjanjian Pemeliharaan antara PPK3 dengan rekanan dalam kontrak tahun anggaran 2019
2	Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pengelola Keuangan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk:					
		a. Memerintahkan atasan langsung Bendahara agar menginstruksikan PPK dan staf pengelola keuangan PPK agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan;	1		S		Telah diterbitkan Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 perihal Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi
		b. Memerintahkan pelaksana anggaran di KBUMN agar melaksanakan pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan yang berlaku; dan	1		S		Telah diterbitkan Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 perihal Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi
		c. Menambahkan klausul sanksi bagi pelaksana anggaran yang tidak mematuhi aturan internal yang mengatur mengenai batas waktu penyampaian pertanggungjawaban dan bukti pengembalian sisa pertanggungjawaban.	1	<i>SE belum mengatur klausul sanksi</i>	BS		Telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan kembali Surat Edaran KPA kepada seluruh PPK dan Pelaksana Anggaran, sesuai Surat Nomor S-10/KPA.MBU/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Penegasan Pelaksanaan Pengembalian Berkas/SPJ Rampung dan Sisa Belanja
3	Tujuh BUMN Belum Menyampaikan Laporan PKBL dan Angsuran dari Mitra Binaan pada Program Kemitraan Belum Teridentifikasi Minimal sebesar Rp19.748.967.054,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Deputi Infrastruktur Bisnis, khususnya Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk:					

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
		a. Meminta BUMN yang belum menyampaikan laporan PKBL untuk segera menyampaikan dan meng-upload di portal PKBL; dan	1	Kurang Jiwasraya dan PTPN III	BS		1. S-966/MBU/D7/09/2019 4 Sept 2019 2. Nota Dinas Nomor ND-973/D7.MBU/10/2019
		b. Menginstruksikan BUMN agar melakukan penatausahaan atas dana Program Kemitraan yang disalurkanannya.	1	Kurang Surat atau informasi dari 13 BUMN yang sudah menelusuri angsuran tak teridentifikasi	BS		S-1154/MBU/D7/10/2019 24 Okt 2019 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK terkait Angsuran Tidak Teridentifikasi PK BUMN
	KEPATUHAN						
1	Kementerian BUMN terlambat menerima pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan gedung sebesar Rp1.835.029.708,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar:					
		a lebih tegas menjalankan ketentuan pemanfaatan BMN termasuk ketentuan pembayaran sewa, dan menambahkan klausul denda keterlambatan pembayaran dalam perjanjian sewa BMN di lingkungan KBUMN; dan	1		S		Telah diterbitkan Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 perihal Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi
		b memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan agar lebih cermat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan kantor KBUMN.	1		S		Telah diterbitkan Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 perihal Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi
2	Kementerian BUMN belum mengenakan hukuman disiplin dan pemotongan tunjangan kinerja atas akumulasi ketidakhadiran pegawai	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan:					
		a. Para Kepala unit kerja agar menegur dan memerintahkan atasan langsung para pegawai yang melanggar disiplin jam kerja agar:	1	Kurang bukti pelanggaran disiplin Nota Dinas Kepala Biro PSDMO ke Semua Kepala Unit Kerja	BS		1. Memo Sesmen MO-2/S.MBU/10/2019
		1) meningkatkan pengawasan disiplin kerja bawahannya; dan					

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
		2) segera melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin jam kerja serta memprosesnya sesuai ketentuan SDM yang berlaku;					
		b. Pengelola Kinerja Pegawai (PKP) yang terdiri dari unsur Bagian Manajemen SDM, Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja serta Inspektorat agar lebih cermat melakukan monitoring penyampaian capaian SKP bulanan seluruh PNS KBUMN.	1		S		1. Memo Sesmen MO-2/S.MBU/10/2019 2. Risalah Rapat Realisasi SKP Bulanan
3	Kelebihan Pembayaran Honorarium dan Tunjangan Staf Khusus Menteri sebesar Rp31.043.377,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi:					
		a. Melalui PPK 1 agar:					
		1) Meminta Staf Khusus II untuk memulihkan kelebihan bayar tunjangan kinerja sebesar Rp26.465.504,00 (Rp35.594.789,00 - Rp9.129.285,00) dan menyetorkan ke kas negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;	1		BS		Telah ditindaklanjuti dengan: a. 1) Menerbitkan Surat kepada Staf Khusus II Sdri. Judith Jubalina D Nomor : S-64/S.MBU/1/09/2019 tgl : 11 September 2019 perihal : Hak-Hak Keuangan Staf Khusus II Menteri BUMN Tahun 2018.
		2) Membayar kekurangan pembayaran honorarium Staf Khusus Menteri sebesar Rp4.551.412,00.	1		BS		Kekurangan pembayaran honorarium sedang diusulkan revisi anggaran.
		b. Memberi sanksi sesuai ketentuan SDM kepada PPK 1 dan PPABP agar mengikuti ketentuan yang berlaku dan lebih cermat melakukan pengujian daftar tunjangan dan honor	1	Kurang bukti sanksi Teguran tertulis dari atasan langsung PPK1 dan PPABP	BS		Telah diterbitkan Memo Sesmen MO-2/S.MBU/10/2019 ttg. Teguran/instruksi kepada PPK1 dan PPABP agar mengikuti ketentuan dan lebih cermat

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
4	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Housekeeping, Keamanan, dan Pengemudi Karena Belum Memperhitungkan Realisasi Volume Pengemudi dan Nilai PPN sebesar Rp107.487.700,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas:					
		a. melalui PPK 3 agar meminta PT PI untuk memulihkan kelebihan bayar sebesar Rp107.487.700,00 dan menyetorkan ke kas negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;	1		BS		a. PPK 3 telah mengirimkan Surat Tagihan ke PT PI sesuai surat Nomor : NO. : S-45/PPK3.MBU/2019 tgl 10 September 2019 Telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp65.808.792,00 Kurang setor Rp41.678.908,00
		b. untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan SDM kepada PPK 3 agar mengikuti ketentuan yang berlaku dan melakukan pembayaran sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan dan PPSPM agar lebih cermat mengidentifikasi jenis penerimaan.	1	Kurang bukti sanksi Teguran tertulis dari atasan langsung PPK3	BS		b. Telah diterbitkan Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 perihal Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi
5	Kesalahan Penganggaran Belanja Sebesar Rp9.805.927.751,00 Mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran KBUMN TA 2018 Tidak Mencerminkan Kegiatan Sesuai Jenis Belanja	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN agar memerintahkan:					
		a. Kepala Biro Perencanaan SDM dan Organisasi memerintahkan:					

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II- 2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
		1) penanggungjawab pelaksana anggaran Biro Umum dan Humas, Biro Hukum, Asdep Data dan Teknologi Informasi, Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN dan Bidang Data dan Riset, Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Keasdepan Layanan Hukum, Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, dan Deputy Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha lebih memperhatikan ketentuan penganggaran dan melakukan penelaahan ulang atas penganggaran belanja;	1		S		Telah diterbitkan Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 perihal Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendas
		2) Tim penyusun anggaran dhi. Subbagian Perencanaan dan Anggaran lebih cermat dalam menelaah usulan anggaran belanja dari <i>user/unit</i> pengusul;	1		S		Telah diterbitkan Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 perihal Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendas
		b. Inspektur Kementerian BUMN agar lebih cermat dalam melaksanakan reviu dokumen usulan anggaran kementerian.	1		S		Telah diterbitkan Memo Inspektur Nomor MO-1/INSPT.MBU/11/2019 perihal Instruksi kepada Auditor agar lebih cermat dalam melakukan reviu Dokumen Usulan Anggaran
6	Terdapat Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alat Penguat Sinyal HT (<i>Repeater</i>) yang Belum Selesai	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas:					
		a. Melalui PPK 3 agar meminta CV DAP segera menyelesaikan perijinan ISR dan membayar BHP spektrum frekuensi radio untuk 1 tahun;	1	Kurang Dokumen TL: - Surat Penolakan KemenKominfo - Surat Pengajuan Perijinan Ulang ke KemenKominfo	BS		a. Surat Pengajuan perijinan Repeater ke Kemkominfo mengalami penolakan karena pembatasan ijin, Rekomendasi Kominfo agar mengajukan perijinan ulang. Saat ini sedang dalam proses pengajuan kembali oleh CV DAP.

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II- 2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
		b. Untuk memberikan teguran sesuai ketentuan SDM kepada PPK 3 dan PPHP agar mengikuti ketentuan yang berlaku dan lebih cermat dalam menerima hasil pekerjaan sesuai realisasi pekerjaan.	1		S		Telah diterbitkan Memo Sesmen Nomor MO-2/S.MBU/10/2019 perihal Teguran dan Instruksi Sesmen sesuai rekomendasi
		JUMLAH LK 2018	20				S = 9 BS = 11
	Kinerja Pengangkatan dan Pemberhentian DIRKOM BUMN						
A.	Prosedur dan kebijakan terkait kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris/dewan pengawas BUMN pada Kementerian BUMN						
4.	Jumlah Komisaris Independen pada BUMN Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang Merangkap Jabatan	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera memperhatikan dan menertibkan komposisi komisaris independen dalam suatu BUMN dan larangan rangkap jabatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN.	1	Dipantau sampai dengan penataan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi semua BUMN sesuai dengan ketentuan (salah satu contoh: penataan terkait dengan komposisi Komisaris Independen)	BS	Asdep MSDME	

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II- 2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
5.	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Pengangkatan Direksi BUMN Tidak Tepat Waktu dan Masa Jabatan Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera: 2) Memonitor masa jabatan direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN untuk pengambilan keputusan yang tepat dan transparan.	1	Dipantau sampai ada konsistensi perkembangan <i>updating</i> data di portal-portal BUMN yang bisa dipantau oleh KBUMN. dan dilampirkan hasil print screen yang terdapat di portal, sesuai dengan kondisi ter-update, serta print screen log system admin di data base portal SDM	BS	Asdep MSDME	
B.	Sistem informasi yang digunakan untuk seleksi direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN pada Kementerian BUMN						
1.	Sistem Informasi Belum Mendukung Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Secara Optimal	BPK merekomendasikan Kementerian BUMN d.h.i. Menteri BUMN untuk segera: 2) Memasukan ketersediaan dan kemutakhiran data BUMN pada Portal SDM dan Portal FIS sebagai salah satu KPI Direksi BUMN;	1	Dipantau s.d. dokumen pemenuhan portal menjadi salah satu KPI hingga disampaikan KPI semua BUMN yang memasukkan indikator "ketersediaan dan kemutakhiran data BUMN pada portal SDM dan portal FIS" serta bukti parameter pada portal tersebut.	BS	Asdep MSDME	
		JUMLAH Kinerja PP DIRKOM	3				

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II- 2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
	Program BL Peduli Th 2012-Smt1-2013						
2	Kementerian BUMN Tidak Melakukan Pemantauan dan Pengendalian yang Memadai atas Dana Kegiatan BL BUMN Peduli	b. Menetapkan status sisa/saldo dana Kegiatan BL BUMN Peduli yang masih ada di Kelompok Kerja masing-masing kegiatan	1	Dipantau sampai dengan penyetoran seluruh pengembalian dana berdasarkan laporan monitoring pengembalian sisa dana BL Peduli	S	Asdep TJSL	Sesuai dengan Lapkeu KBUMN Tahun 2018 telah dinyatakan bahwa semua Program BL Peduli telah selesai seluruhnya, dan semua saldo BL Peduli telah NIHIL Telah disampaikan CALK Laporan Keuangan KBUMN TA 2018 Kamis, 25 Juli 2019
		JUMLAH BL Peduli 2012-2013	1				

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
	Program BL Peduli Th 2012-2014						
2	Program BL BUMN Peduli Pengembangan Sorgum						
d	Pembayaran Beberapa Kegiatan Program Pengembangan Sorgum Lebih Bayar Sebesar Rp1.162.124.288,70	BPK merekomendasikan agar PT Batantek agar: 1. Mengembalikan ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN atas penggunaan sebagian dana BL Peduli untuk kegiatan operasional perusahaan diluar program pengembangan sorgum sebesar Rp1.036.750.000,00 yang dilakukan dengan cara meninggikan honor tim pendamping. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	BS	Asdep TJSL	Direksi INUKI periode tersebut telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan dana melalui pemotongan Dana Pensiun Purna Jabatan. (Bukti Surat Pernyataan terlampir)
		2. Meminta kepada Ketua Koperasi Nela selaku pengelola dana pengolahan dan penanaman sorgum untuk mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan serta pembayaran untuk kegiatan yang seharusnya tidak dikeluarkan dan/atau tidak dapat dibuktikan sebesar Rp76.351.500,00 ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	BS	Asdep TJSL	Sudah dibuat Surat Pernyataan dari Ketua Koperasi Nela tentang Kesanggupan untuk mengembalikan Dana PKBL sebesar Rp76.351.500,00
		4. Mengembalikan kelebihan pembayaran harga tiket perjalanan sebesar Rp29.165.100,00 ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	BS	Asdep TJSL	Pengembalian Dana dipantau oleh Tim PKBL Inuki
		5. Meminta penyedia jasa mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp9.017.688,70 ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	BS	Asdep TJSL	

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
e	Penggunaan Dana BL BUMN Peduli Tidak Sesuai Peruntukkan	BPK merekomendasikan agar PT Batantek agar: 1. PT Batantek berkoordinasi sekaligus meminta persetujuan Menteri BUMN sehubungan dengan kerjasama yang telah dilakukannya dengan Koperasi dalam pengelolaan dana BL Peduli dan menetapkan status biji sorgum yang masih tersimpan.	1	Dipantau s.d. Persetujuan Menteri BUMN	BS	Asdep TJSL	Akan dimintakan Surat Permohonan TDD karena Program telah selesai.
		2. PT Batantek mengembalikan pembayaran yang diterima sebesar Rp436.675.680,00 ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	BS	Asdep TJSL	
		3. Koperasi Nela mengembalikan sebesar Rp87.000.000,00 ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN, jika skema kerja sama koperasi tidak disetujui Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	BS	Asdep TJSL	Sudah dibuat Surat Pernyataan dari Ketua Koperasi Nela tentang Kesanggupan untuk mengembalikan Dana PKBL sebesar Rp87.191.500,00
		4. PT Batantek berkoordinasi dengan Menteri BUMN untuk menetapkan status kepemilikan peralatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana BL Peduli.	1	Dipantau s.d. BA divalidasi dari Asdep TJSL dan Inspektorat Hasil koordinasi terkait penetapan status kepemilikan belum disampaikan	BS	Asdep TJSL	BA Validasi sedang dilakukan penandatanganan

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
f	Status Kepemilikan Peralatan, Mesin Agro Industri dan Kendaraan Operasional Hasil Pengadaan Menggunakan Dana BUMN BL Peduli untuk Pengembangan Sorgum Tidak Jelas	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan PT Batantek untuk berkoordinasi dengan Menteri BUMN dalam menetapkan status kepemilikan peralatan, mesin agroindustri, dan kendaraan operasional yang diperoleh menggunakan dana BL Peduli baik di Koperasi Nela maupun Koperasi Wanita, serta mengevaluasi kembali perjanjiannya dengan Koperasi dalam pengelolaan dana BL Peduli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	Dipantau s.d. BA divalidasi dari Asdep TJSL dan Inspektorat Hasil koordinasi terkait penetapan status kepemilikan belum disampaikan	BS	Asdep TJSL	
g	Penggunaan Dana BUMN BL Peduli Sebesar Rp9.978.208.601,00 Untuk Kepentingan Perusahaan	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: b) Mengembalikan dana BL Peduli yang digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha perusahaan sebesar Rp1.054.720.000,00 ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	BS		
						Asdep TJSL	Direksi INUKI periode tersebut telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan dana melalui pemotongan Dana Pensiun Purna Jabatan. (Bukti Surat Pernyataan akan disampaikan Senin 10 Des 2018)

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
3	Program BL BUMN Peduli Pembibitan Sapi						
a	Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Beberapa Pekerjaan Terkait Program BUMN BL Peduli Sapi Tidak Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Berdikari (Persero) No.030/05/BDK/DIR/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Berdikari (Persero)	2. Memerintahkan PT Berdikari untuk mengembalikan ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN atas keuntungan yang diberikan kepada PT BULS atas pekerjaan pengadaan sapi sebesar Rp718.100.000,00 yang sebenarnya dilaksanakan sendiri oleh PT Berdikari. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana dan dokumen terkait disampaikan	BS	Asdep TJSL	Telah dibuat Surat Pernyataan Dirkeu kesanggupan untuk menyelesaikan rekomendasi.
c	Pembayaran Pakan Ternak oleh PT Berdikari kepada PT BULS Tanpa Didukung Dokumen Pertanggungjawaban Pemakaian Pakan Ternak yang Valid sehingga Terjadi Kelebihan Bayar Sebesar Rp434.931.116,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: 2. Memerintahkan PT Berdikari untuk meminta kelebihan bayar pakan ternak kepada PT BULS sebesar Rp434.931.116,00 dan mengembalikannya ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. pengembalian dana tersebut	BS	Asdep TJSL	Telah dibuat Surat Pernyataan Dirkeu kesanggupan untuk menyelesaikan rekomendasi.
e	PT Berdikari (Persero) Menggunakan Uang Hasil Penjualan Sapi yang Dijual Paksa pada Daerah Konawe Selatan Sebesar Rp29.300.000,00 untuk Operasional Perusahaan	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar 2. Memerintahkan Dirut PT Berdikari untuk segera mengembalikan penggunaan dana penjualan paksa sapi sebesar Rp29.300.000,00 kepada peternak yang berhak. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	BS	Asdep TJSL	Dana sudah tersedia. Akan dikembalikan sebesar Rp29.300.000,00 kepada peternak yang berhak. (Info Ka.SPI) Jumat, 26 Juli 2019
f	PT Berdikari (Persero) Mempertanggungjawaban	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar:					

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
	Penggunaan Dana BL Menyalahi Ketentuan Perjanjian dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Surat Menteri BUMN Nomor S-128/MBU/2014 Sebesar Rp300.606.165,00, Terdapat Pengeluaran Sebesar Rp232.764.625,00 Tidak Didukung Pertanggungjawaban yang Memadai dan Terdapat Dana Sebesar Rp114.642.905,00 Tidak Diketahui Peruntukannya	2. Memerintahkan Dirut PT Berdikari untuk mengembalikan dana BL BUMN Peduli sebesar Rp416.299.070,00 (Rp300.606.165,00 + Rp115.692.905,00) ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	BS	Asdep TJSL	Telah dibuat Surat Pernyataan Dirkeu kesanggupan untuk menyelesaikan rekomendasi.
		3. Mengevaluasi kembali pelaksanaan program pembibitan sapi oleh PT Berdikari sesuai dengan tujuan awal pemanfaatan dana BL BUMN Peduli, terutama atas penyelesaian hak dan kewajiban PT Berdikari atas hasil pembibitan sapi.	1	dipantau sampai dengan surat penjelasan terkait penyelesaian hak dan kewajiban atas pembibitan sapi	BS		Dirkeu PT Berdikari diminta membuat Surat Pernyataan berupa penjelasan terkait penyelesaian hak dan kewajiban atas Program pembibitan sapi
4	Program Pembangunan Rumah Susun						
b	Pelelangan Terbatas yang Menetapkan PT Utama Karya Sebagai Pelaksana Rancang Bangun Rusun Tower A4 dan A5 Kemayoran Sesungguhnya Tidak Pernah Dilaksanakan dan PT Utama Karya Tidak Melaksanakan Pekerjaan Sesuai dengan Ketentuan Kontrak	BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur Utama Perum Perumnas dan Direktur Utama PT Utama Karya karena pelaksanaan pelelangan yang melibatkan kedua perusahaan tidak akuntabel dan transparan.	1	Dipantau s.d. sanksi diberikan	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalhnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur termasuk bunga deposito telah dikembalikan.
		2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada konsultan Manajemen Konstruksi yang kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.	1	Dipantau s.d. sanksi diberikan	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalhnya program ini oleh Perumnas

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
		3. Menginstruksikan kepada Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut yang intensif terkait penyelesaian pembangunan rusun Kemayoran sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.	1	Dipantau s.d. diberikan instuksi Menteri BUMN	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Dltindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur termasuk bunga deposito telah dikembalikan
		4. Menginstruksikan Direktur Utama Perum Perumnas agar menindaklanjuti hasil hammer test yang menunjukkan adanya indikasi beberapa bagian struktur yang mutu betonnya dibawah K-300 atau 25 Mpa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Melakukan UPV test pada 27 lokasi yang mutu betonnya diindikasikan dibawah K-300 atau 25 Mpa; b) Melakukan Coring pada 12 lokasi, yaitu 4 lokasi Shear Wall, 5 lokasi balok, dan 3 lokasi pelat; c) Membuat korelasi antara hasil UPV dan Coring/Crushing Test; d) Langkah-langkah lain yang dianggap perlu. Jika ternyata hasil uji inti beton (hasil coring) tidak memenuhi syarat penerimaan, maka harus dilakukan perhitungan struktur kembali dengan mutu beton eksisting untuk mengetahui apakah diperlukan perkuatan atau tidak.	1	Dipantau s.d. diberikan instuksi Menteri BUMN	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Dltindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur termasuk bunga deposito telah dikembalikan.
		5. Menginstruksikan Dirut Perum Perumnas untuk: a) Memperhitungkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.561.349.827,59 dalam pembayaran termin selanjutnya atau memperhitungkannya dalam addendum kontrak, jika ada.	1	Dipantau s.d. Perhitungan kelebihan pembayaran	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Dltindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
		b) Tidak menyetujui faktor tambahan (waste) 5% dari volume terpasang yang diperhitungkan oleh PT Utama Karya.	1	Dipantau s.d. Perhitungan volume terpasang (Penolakan faktor tambahan (waste) 5% dari volume terpasang)	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur
c	Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Teknis Bangunan dalam Rangka Pengurusan IMB Rusun Tower A4 dan A5 Kemayoran Tidak Sesuai Ketentuan Kontrak dan Terdapat Pengeluaran Biaya Perijinan Senilai Rp401.599.000,00 yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur Utama PT Utama Karya dan Direktur Utama PT Yodya Karya yang telah membuat perikatan kontrak secara formalitas.	1	Dipantau s.d. sanksi diberikan	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur
		3. Memerintahkan Direktur Utama Perum Perumnas untuk: a) Tidak merealisasikan pembayaran biaya perencanaan diluar yang sudah direalisasikan oleh Perum Perumnas senilai Rp592.000.000,00 (=Rp550.000.000,00 + Rp42.000.000,00).	1	Dipantau s.d. Bukti realisasi pembayaran biaya perencanaan diberikan	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur
		b) Memulihkan kerugian negara dari biaya pengurusan IMB dan biaya perencanaan teknis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan masing-masing sebesar Rp357.788.200,00 dan Rp8.000.000,00 (biaya operasional yang tidak ada SPJ nya) dengan menyetorkannya ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur termasuk bunga deposito telah dikembalikan.
		c) Mengembalikan biaya THR dan biaya pengurusan PBB Pondok Kopi ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1	Dipantau s.d. Pengembalian dana tersebut	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II- 2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
d	Pelelangan Terbatas yang Menetapkan PT Indra Karya Sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Sesungguhnya Tidak Pernah Dilaksanakan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Tidak Sesuai dengan Ketentuan Kontrak Sebesar Rp448.595.000,00	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur Utama Perum Perumnas yang telah melanggar SOP terkait pengadaan barang/jasa.	1	Dipantau s.d. Sanksi telah diberikan	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur
		2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur Utama PT Indra Karya yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	1	Dipantau s.d. Sanksi telah diberikan	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur termasuk bunga deposito telah dikembalikan.
		3. Memerintahkan Direktur Utama Perum Perumnas untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada General Manager Regional III dan Manager Kawasan Kemayoran Perum Perumnas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen konstruksi.	1	Dipantau s.d. Sanksi telah diberikan	Usul TDD	Asdep TJSL	Telah disampaikan Surat Deputi IBIS untuk mengusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) atas temuan Program Pembangunan Rumah Susun, mengingat Program telah selesai dengan diambilalihnya program ini oleh Perumnas dan Seluruh Dana BUMN Donatur termasuk bunga deposito telah dikembalikan.
6	Program Pelestarian Alam dan Lingkungan						
a	Pelaksanaan Kegiatan Sektor Pelestarian Alam dan Lingkungan	BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar:					

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II- 2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
	TA 2012 Tidak Tertib	3. Memerintahkan Direksi Perum Perhutani untuk mengembalikan sisa dana sebesar Rp659.727.362,00 ke rekening khusus penampungan yang dibentuk Menteri BUMN. Bukti pengembalian disampaikan ke BPK.	1		BS	Asdep TJSL	Dalam proses penyetoran ke kas Negara
		4. Memerintahkan Direksi PT BUMN HL I untuk mempertanggungjawabkan penggunaan riil dana BL BUMN Peduli sektor Pelestarian Alam dan Lingkungan sebesar Rp115.513.376.846,00 tahun 2010-2012 disertai dengan bukti-bukti yang valid dan sah. Hasilnya disampaikan ke BPK.	1		BS	Asdep TJSL	Telah mengundang Perhutani dan PT BUMN HL pd tanggal 7 Februari 2019 untuk menindaklanjuti temuan BPK tsb.
							Telah disampaikan Surat dari Direksi PT BUMN HL terkait kronologis pengelolaan dana BL Peduli utk Pelestarian Alam. Dan LAI atas LK PT BUMN HL Tahun 2012-2014
							Senin, 29 Juli 2019
		JUMLAH BL Peduli 2012-2014	30				Perhutani/BUMN HL akan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban ke BPK

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II- 2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
	PENGUNAAN PMN						
1	Kebijakan penggunaan investasi dan modal kerja belum mendukung tujuan PMN	Kementerian Keuangan agar lebih cermat dan disiplin dalam pencairan dana PMN kepada BUMN sesuai jadual (time frame) yang ditentukan dalam kajian bersama;	1	Dipantau : Kajian / notulen rapat dengan Kemenkeu terkait pencairan dana (kendala dan hambatan)	BS	Asdep PUPB	PMN seluruhnya telah dicairkan pada tahun 2015
		Kementerian BUMN agar segera menyusun dan menetapkan Juknis atas Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN;	1	Dipantau s.d Juknis atas Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN telah ditetapkan	BS	Asdep PUPB	Telah diterbitkan Permen 08/2015
		Kementerian BUMN agar memerintahkan Direktur Utama BUMN, untuk: 1) Membuat roadmap per komoditi dan mereviu sesuai roadmap BUMN 2015-2019; 2) Merancang strategi leverage dana PMN agar tercapainya perputaran/ revolving modal kerja dan investasi secara optimal; 3) Membuat manajemen kinerja keuangan dan operasional dana PMN Tahun 2015 secara tegas tanpa bercampur dengan kegiatan non PMN; 4) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) perputaran/ revolving modal kerja yang bersumber dari dana PMN Tahun 2015; 5) Memperbaharui asumsi bisnis dalam kajian feasibility study untuk kegiatan investasi agar dapat segera dilaksanakan sesuai esensi pemanfaatan dana PMN dalam kajian bersama.	1	Roadmap pada PT Pertani dan cek list sesuai rekomendasi pada SHS, PT Garam, Pertani dan BULOG	S	Asdep IAF2	Telah disampaikan Roadmap PT Pertani Senin, 29 Juli 2019
		Kementerian BUMN melakukan reviu atas roadmap dan SOP perputaran yang disusun BUMN.	1	dipantau hasil reviu dari KBUMN (IAF)	BS	Asdep IAF2	Menunggu hasil Reviu KBUMN atas Roadmap dan SOP Perputaran dari BUMN

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
4	Dana PMN untuk modal kerja PT SHS direalisasikan untuk membayar hutang kepada petani sebesar Rp 4.547.414.000,00 dan proses verifikasi atas tagihan pembayaran benih membutuhkan waktu lama sehingga kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp53.036.969.968,61	Mengkaji skema penyelesaian utang kepada petani dan mitra sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan;	1	Dipantau s.d seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan	BS	Asdep IAF2	Ditunggu Dokumen Skema penyelesaian utang SHS kepda petani
		Mengkaji strategi leverage penggunaan Dana PMN supaya kemampuan modal dapat optimal;	1	Dipantau s.d seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan	BS	Asdep IAF2	Ditunggu Dokumen Strategi Leverage penggunaan dana PMN dari SHS
		Memulihkan rekening khusus PMN atas pembayaran utang sebesar Rp4.547.414.000,00;	1	Dipantau hasil verifikasi dan berita acara verifikasi atas pembayaran utang sebesar Rp4.547.414.000,00	BS	Asdep IAF2	Menunggu Dokumen hasil verifikasi pembayaran utang
		Segera melaksanakan revitalisasi dan investasi mesin dan bangunan gedung sesuai dengan Kajian Bersama.	1	Didukung realisasi investasi	BS	Asdep IAF2	Kegiatan revitalisasi sedang berjalan, namun belum selesai
5	Pengelolaan modal kerja dan investasi PT Garam (Persero) belum sesuai kajian bersama	Mempercepat pelaksanaan investasi sesuai kajian bersama;	1	Dipantau antara realisasi dengan estimasi progress	BS	Asdep IAF2	Realisasi NTT telah selesai. Realisasi Madura estimasi awal 2019
6	Kajian feasibility study PTPN IX untuk kegiatan investasi belum memadai	Direktur Utama PTPN IX memerintahkan anak perusahaan melakukan evaluasi strategi investasi yang menjamin terlaksananya program ketahanan pangan sesuai roadmap BUMN 2015-2019;	1	Dipantau s.d seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan	BS	Asdep IAF1	Menunggu Dokumen evaluasi strategi investasi
		Direktur Utama PTPN IX agar mengkaji strategi leverage dana PMN secara optimal sebagai modal usaha;	1		BS	Asdep IAF1	Menunggu Dokumen Kajian Strategi Leverage
		Direktur Utama PTPN IX merevisi kajian ketersediaan bahan baku dan kecukupan pasokan tebu dalam perencanaan revitalisasi PG Mojo dan PG Rendeng dengan berdasarkan data yang aktual.	1		BS	Asdep IAF1	Menunggu Dokumen Kajian Ketersediaan Bahan Baku PG Mojo dan PG Rendeng
7	Roadmap program pembiayaan, perasuransi dan penjaminan Tahun 2015-2019 belum ditetapkan	BPK merekomendasikan kepada Kementerian BUMN agar menginstruksikan Direktur Utama BUMN, untuk:					

No. Tem.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi		Kesimpulan BPK RI Per Semester II-2019	STATUS per Smt II-2019	PIC	Progres Semester II-2019 dan/atau Rencana Aksi Tindak Lanjut (Inspektorat, 2 Januari 2020)
	Judul	Uraian	Jml				
1	2	3	4	7	8	10	10
		3. Hasil roadmap pendukung dan SOP tersebut agar diserahkan ke Kementerian BUMN untuk direviu agar sesuai dengan Roadmap BUMN Tahun 2015-2019.	1	Dipantau s.d. Hasil reviu selesai dilaksanakan	BS	Asdep JKJSK2	Menunggu hasil Reviu KBUMN atas Roadmap dan SOP dari Askrindo dan Jamkrindo
9	Perum Jamkrindo Tidak Membuat Rekening Terpisah Khusus untuk Menampung Tambahan Dana PMN Tahun 2015	BPK merekomendasikan agar Direksi Perum Jamkrindo membuat rekening terpisah khusus pada Bank BUMN untuk menampung dana PMN Tahun 2015.	1	Dipantau surat pernyataan rek khusus dan rek khususnya dan bukti pemindahbukuan dari rekening biasa	BS	Asdep JKJSK2	
10	PT BPUI tidak mampu mencicil kewajiban non pokok sesuai jadwal yang ditentukan	1. Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan Membuat langkah strategis atas ketidakmampuan penyelesaian utang non pokok PT BPUI (Persero) dengan skema penyelesaian cicilan sesuai ketentuan;	1	dipantau surat persetujuan Menteri BUMN dan Risalah pembahasan penyelesaian cicilan antara KBUMN dan KMK	BS	Asdep JKJSK1 & JKJSK2	
		2. Direktur Utama dalam pelaksanaan penyelesaian utang non pokok menjadi indikator dalam key performance indicator (KPI) setiap tahun.	1	menunggu laporan hasil kajian penyelesaian utang non pokok pinjaman RDI khususnya yang menyajikan secara rinci langkah strategis atas ketidakmampuan penyelesaian hutang non pkok PT BPUI (persero) sebagaimana yang dimaksud dalam point V.4	BS	Asdep JKJSK1	
		Jumlah PMN	16				
				JML S =	15		Masih dalam tahap verifikasi oleh BPK
		TOTAL REKOMENDASI	78	JML BD =	0		
				JML BS =	50		
	JUMLAH LHP	10 LHP		JML BS Usul TDD =	13		